



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TERNATE
TAHUN 2009**

TESIS

**AGUSMAWANDA
0906590811**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Agusmawanda

NPM : 0906590811

Tanda tangan : 

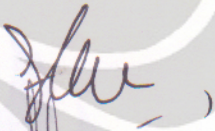

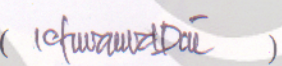

Tanggal : Senin, 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Agusmawanda
NPM : 0906590811
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Tesis : Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam
Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si ()
Penguji : Dr. Valina Singka, M.Si ()
Penguji : Wawan Ichwanuddin, M.Si ()
Penguji : Nurul Nurhandjati, M.Si ()

Detetapkan di :

Tanggal : Senin, 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulisan hasil Tesis yang berjudul Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009, pada akhirnya selesai ditulis dan dipertahankan untuk meraih gelar Magister Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2011.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bangkitnya gerakan yang mengatasnamakan masyarakat adat sebagai salah satu kekuatan politik di daerah pasca Reformasi. Tampilnya simbol-simbol adat pemilu sebagai wujud nyata keterlibatan adat dalam politik. Di Ternate, Sultan dan Permaisuri (Boki) tampil dan berhasil memperoleh posisi dalam Pemilu 2004 dan 2009 atas dukungan masyarakat adat Ternate. Pengaruh Sultan dan Boki dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009 terhadap perubahan komposisi kursi partai di DPRD Kota mendorong penulis untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan pikiran. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dibutuhkan untuk perbaikan serta untuk tujuan studi lebih lanjut.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan berupa masukan dan kritik yang membangun untuk melengkapi penulisan ini. Melalui kesempatan ini, saya juga memohon maaf karena sering mengganggu ditengah kesibukan ibu di PUSKAPOL.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr.Valina Singka, M.Si dan Ibu Nurul Nurhandjati, S.IP, M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Pascasarjana Ilmu Politik, yang selalu memotivasi dan merancang program yang membantu mahasiswa selesai tepat pada waktunya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Wawan Ichwanuddi, M.Si yang bersedia menjadi penguji ahli dalam sidang tesis ini. Terimakasih juga disampaikan kepada seluruh

staf pengajar dalam Program Pascasarjana Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih pada staf administrasi Program Pascasarjana Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses perkuliahan selama ini.

Selanjutnya penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H Yunus Namsa dan Bapak Kasman Hi Ahmad M.Pd selaku mantan Rektor dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang telah memberikan izin untuk studi di Universitas Indonesia dan teman-teman FISIP UMMU terutama Bapak Muchlis Hafel, Bapak Halil Hi. Ibrahim, Irmon Machmud, dan Aziz Marsaoly. Terima kasih juga penulis ingin sampaikan kepada teman-teman S-2 seangkatan, Mas Joko Parwoto, Yana Syafriana, Sulaisi, Idil Akbar, Melvin dan Adinda Ujang atas dukungannya atas semua ini dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu .

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta, terutama ibunda Famelleri (Alm) dan ayahanda Jafar Latif (Alm) atas ketulusan merawat dan membesarkan penulis. Ucapan terima kasih diperuntukkan juga untuk keluarga besar bapak dan ibu mertua (Ibu Sariyah dan Bapak Sumiarto) atas pengertian dan dukungan selama masa studi, terutama dukungan berupa pinjaman motor Honda Grand keluaran tahun 1993 yang setia menemani. Ucapan terima kasih penuh cinta kepada istri dan anak tercinta Agustin Rahayu, SKM dan Yazid Arif Alfatih sebagai inspirator dalam menghadapi masa-masa sulit dalam studi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin.

Salemba, 11 Juli 2011

(Agusmawanda)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agusmawanda
NPM : 0906590811
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2009.

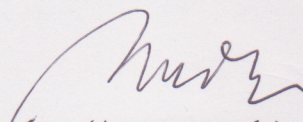
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Yang Menyatakan


(Agusmawanda)

ABSTRAK

Nama : Agusmawanda
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2009, xv +133 halaman, 3 lampiran, 36 buku, 4 media online dan 2 wawancara nara sumber.

Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di enam kelurahan di Kota Ternate dengan total sampel sebanyak 120 responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis.

Hasil survei menunjukkan perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 adalah perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki.

Berdasarkan letak geografis, rata-rata kelurahan yang berada di wilayah Kesultanan Ternate dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan responden yang memiliki keterlibatan dalam adat Ternate juga memiliki kecenderungan memilih Partai Demokrat. Responden yang memiliki kedekatan dengan partai dan caleg sebagian besar memilih partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP. Sedangkan responden yang terpengaruh oleh perilaku Sultan dan Boki bukan termasuk pemilih loyal partai karena sebagian besar mereka merubah pilihan partainya di Pemilu 2009.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan faktor sosiologis dan psikologis dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat adat, temuan dalam penelitian ini juga bukan hal yang baru karena faktor sosiologis dan psikologis dalam penelitian sebelumnya juga berpengaruh dalam penelitian ini. Namun yang berbeda adalah objek penelitian, dimana Kesultanan dan masyarakat adat Ternate yaitu komunitas masyarakat yang memiliki struktur dan kultur yang terbangun sejak abad ke-13.

Kata kunci :

Masyarakat Adat, Kesultanan Ternate, Perilaku Memilih, Pemilu 2009

ABSRTACT

Nama : Agusmawanda
Program Study: Ilmu Politik
Title : The Voting behavior of Ternate Indigenous Peoples in the Legislative Election Kota Ternate in 2009, xv+133pages, 3 appendices, 36 book, 4 on-line sources

This study wishes to determine voting behavior of indigenous peoples of Ternate and the factors that influence voting behavior in the legislative elections of Ternate in 2009. Researchers using quantitative methods with a survey approach in six *kelurahan* in Ternate with 120 respondents.

The survey results showed the voting behavior of indigenous peoples of Ternate Ternate in the Legislative elections of 2009 were voting behavior based on primordial loyalty because the average voter in selecting the party and the candidates on the basis of family, ethnicity, and the figure of Sultan and Boki. The Characteristics primordial voters in the Ternate was influenced by geographic variables, involvement in *adat*, closeness to parties and candidates, and political behavior of the Sultan and Boki.

Based on geographic location, the average *kelurahan* are located in the Sultan Ternate authority was won by the Democrats Party, and respondents who have an involvement in *adat* Ternate also have voted Democrat. Respondents who have a closeness with the party and candidate most choose the old parties such as Golkar, PPP and PDI-P. While the respondents are influenced by the political behavior of the *Sultan* and *Boki* not including the loyal party voters because most of them change his party's choice in the 2009 election.

Theoretical implication show that in this study is nothing new, because the sociological and psychological factors in previous studies was also influential in this study. But what is different is the object of research, where the Sultanate of Ternate and the community of indigenous communities that have a structure and culture that was established since the 13th century.

Keywords:

Indigenous Peoples, the Sultanate of Ternate, Voting Behavior, Election in 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Konsep dan Teori	15
1.6 Model Analisis	26
1.7 Hipotesis	26
1.8 Definisi Operasional	27
1.9 Metode Penelitian, Populasi dan Sampel	30
1.10 Sistematika Penulisan	32
2. MASYARAKAT ADAT DAN KESULTANAN TERNATE	
2.1 Profil Kota Ternate	33
2.2 Sejarah Kesultanan dan Masyarakat Adat Ternate	38
2.3 Makna Adat dan Stratifikasi Sosial Kesultanan Ternate	46
2.4 Masyarakat Adat dan Dinamika Politik Lokal	56
3. PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE	
3.1 Perilaku dalam Memilih Partai Politik	60
3.2 Alasan dalam Memilih Partai dan Caleg Partai	65
3.3 Konsistensi Memilih Parpol pada Pemilu Tahun 2004 dan 2009	71
3.4 Kesimpulan	76
4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE	
4.1 Faktor Sosiologis Pemilih Masyarakat Adat	78
4.2 Faktor Psikologi Pemilih Masyarakat Adat	105
4.3 Hubungan Antar Variabel	118
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Signifikansi Teoritis	129



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Periode 2004-2009	6
Tabel 1.2	Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Ternate Tahun 2009	7
Tabel 1.3	Perbandingan Perolehan Kursi Partai pada Pemilu Legislatif Kota Ternate 2004 dan 2009	8
Tabel 1.4	Distribusi Jumlah Penduduk dan Jiwa Pilih per Kecamatan	9
Tabel 1.5	Rekapitulasi Distribusi Suara di Daerah Pemilihan II (Dapil) pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009	10
Tabel 1.6	Definisi Operasional	28
Tabel 1.7	Distribusi Sampel di Tiap Kelurahan yang Terpilih	31
Tabel 2.1	Luas Wilayah Pulau-Pulau di Ternate	34
Tabel 2.2	Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan	35
Tabel 2.3	Distribusi Penduduk per Kecamatan Tahun 2009	36
Tabel 2.4	Nama-Nama Sultan (Kolano) dan Periode Kepemimpinan	45
Tabel 2.5	Kelompok Marga/Klan dan sub Klan (Soa)	49
Tabel 2.6	Komposisi Keanggotaan Bobato-18	52
Tabel 3.1	Distribusi Partai Pilihan Masyarakat Adat Ternate pada Pemilu Legislatif Tahun 2009	62
Tabel 3.2	Hasil Perolahan Suara Partai Perkelurahan	63
Tabel 3.3	Distribusi Responden menurut Pilihan Partai dan Alasan Memilih Partai	67
Tabel 3.4	Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Berdasarkan Kelompok Umur	69
Tabel 3.5	Distribusi Responden menurut Alasan Memilih Caleg Per Partai Politik	70
Tabel 3.6	Distribusi Responden menurut Pegetahuan Identitas Caleg dan Partai	71
Tabel 3.7	Distribusi Responden menurut Konsistensi Memilih Partai pada Pemilu Tahun 2004 dan 2009	73
Tabel 3.8	Alasan Memilih Partai yang Berbeda Pada Pemilu 2009	74
Tabel 3.9	Distribusi Responden menurut Alasan untuk Memilih Partai yang Sama Tahun 2004 dan 2009	75
Tabel 4.1	Distribusi Responden menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	79
Tabel 4.2	Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	80
Tabel 4.3	Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Tabel 4.4	Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin	82
Tabel 4.5	Distribusi Responden menurut Rata-rata Pengeluaran per Bulan	84
Tabel 4.6	Distribusi Responden menurut Etnis per Kelurahan	85
Tabel 4.7	Distribusi Responden menurut Tingkat Pengetahuan	

	mengenai Kelompok Marga	87
Tabel 4.8	Distribusi Responden menurut Kecenderungan Kelompok Marga Terhadap Parpol.....	88
Tabel 4.9	Distribusi Responden yang Memiliki Hubungan Keturunan dengan Komunitas Awal.....	90
Tabel 4.10	Distribusi Responden menurut Kecenderungan Komunitas Awal dengan Partai Pilihan	92
Tabel 4.11	Keterlibatan dalam Struktur Pemerintahan Adat Ternate	93
Tabel 4.12	Distribusi Responden menurut Keterlibatan Dalam Struktur Pemerintahan Adat dan Pilihan Partai	95
Tabel 4.13	Distribusi Responden menurut Tingkat Pengetahuan Mengenai Falsafah Adat	96
Tabel 4.14	Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Terhadap Pengetahuan Falsafah Adat	98
Tabel 4.15	Distribusi Responden menurut Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Adat	100
Tabel 4.16	Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Terkait Stratifikasi Sosial Adat	100
Tabel 4.17	Sosialisasi Politik dalam Keluarga	103
Tabel 4.18	Distribusi Responden Berdasarkan Pilihan Partai dan Orang yang Berpengaruh dalam Keluarga	104
Tabel 4.19	Distribusi Responden menurut Kedekatan dengan Partai Politik	107
Tabel 4.20	Distribusi Responden menurut Tingkat Kedekatan Popularitas dan Kedekatan Caleg	109
Tabel 4.21	Distribusi Responden menurut Ketertarikan Pemilih Terhadap Isu	111
Tabel 4.22	Distribusi Responden menurut Pengaruh Perilaku Politik Sultan dan Boki terhadap Perilaku Memilih	114
Tabel 4.23	Distribusi Responden menurut Alasan dalam Memilih Sultan dan Boki	115
Tabel 4.24	Persepsi Masyarakat Adat Atas Keterlibatan Sultan dan Boki dalam politik	116
Tabel 4.25	Distribusi Responden menurut Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Sultan dan Boki dalam Politik	117
Tabel 4.26	Hasil Uji Chi-square antar Variabel	119
Tabel 4.27	Distribusi Responden menurut Partai yang Dipilih Responden per Kelurahan	120
Tabel 4.28	Keterlibatan Keluarga dalam Struktur Pemerintahan Adat	122
Tabel 4.29	Analisa Regresi.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Analisis Penelitian	26
Gambar 2.1	Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate	53
Gambar 3.1	Distribusi Responden menurut Alasan Pemilih dalam Memilih Partai	66
Gambar 4.1	Distribusi Responden menurut Kedekatan dengan Parpol dan Kecenderungan Memilih	106



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan pada masa Reformasi menciptakan peluang bagi masyarakat adat untuk tampil dalam politik. Keterlibatan masyarakat adat dalam politik di berbagai daerah di Indonesia selalu melibatkan ikatan primordial yang terkait dengan hubungan darah, suku, etnis, agama, asal daerah dan adat istiadat. Di Ternate, keterlibatan kesultanan dalam politik seperti proses pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Pemilihan Umum pasca Reformasi selalu melibatkan dukungan dari Masyarakat Adat Ternate.

Gerakan politik mengatasnamakan adat di daerah yang lain juga terjadi, di Bali gerakan masyarakat desa yang mengatasnamakan adat menentang pembangunan proyek pariwisata skala besar dan menolak penjualan tanah kepada orang luar yang tidak terlibat agama Hindu. Gerakan lain yang mengatasnamakan adat juga terjadi di Sulawesi Tengah dan Flores. Di Sulawesi Tengah, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat menuntut hak warisan tanah nenek moyang mereka di sekitar Taman Nasional Lore Lindu. Di Manggarai Flores, masyarakat adat berusaha mengembalikan fungsi lembaga adat yang dibatasi pada masa Orde Baru untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.

Selain gerakan adat yang telah disebutkan sebelumnya, gerakan adat juga ditandai oleh kebangkitan para raja dan sultan dalam politik. Berdasarkan temuan Gerry Van Klinken², dari 70 kerajaan/kesultanan yang ada, sepertiga dari jumlah tersebut mulai bangkit setelah vakum selama fase Orde Lama ke Orde Baru. Kebangkitan tersebut ditandai dengan upaya masyarakat adat mencari jati diri, menggali sejarah dan menghidupkan suasana adat istiadat kerajaan/kesultanan yang telah lama ditinggalkan masyarakat.

¹Baca tulisan Carol Warre, Arianto Sangaji dan Maribeth Erb dalam Jamie S. Davison (ed.) *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2010, hal. 187, 269 dan 347. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya "The Revival Of Tradition In Indonesian Politic: The Deployment Of Adat From Colonialism To Indigenism."

² Baca Gerry Van Klinken "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal", *Ibid.*, hal. 165-170.

Salah satu kesultanan seperti yang di sebutkan Klinken, yaitu Kesultanan di Maluku Utara, di antaranya Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Bentuk kebangkitan empat kesultanan tersebut dimulai dengan menghidupkan kembali struktur kesultanan yang pernah ada, membangun dan merenovasi kraton, serta keterlibatan sultan dalam politik lokal di Maluku Utara dan Ternate.

David Henley dan Jamie Davison mengidentifikasi kebangkitan masyarakat adat dilatarbelakangi oleh empat faktor³. Pertama, kebangkitan masyarakat adat banyak terinspirasi oleh jaringan internasional yang memelopori isu hak-hak sipil yang terabaikan pada masa kolonial, seperti perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian keberagaman budaya, lingkungan hidup, serta hak memilih dan kesejahteraan. Kedua, sebagai respons masyarakat adat yang mengalami diskriminasi pada masa Orde Baru dengan stigma negatif, seperti masyarakat terasing dan suku pedalaman. Ketiga, peluang-peluang yang timbul dengan adanya perubahan politik pada masa Reformasi. Keempat, kerinduan akan tradisi lokal yang bersifat otentik yang erat kaitannya dengan sejarah, tanah dan hukum.

Sebelum Orde Baru, diskriminasi terhadap kesultanan dan kerajaan telah terjadi pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Gerakan yang mengatasnamakan kaum nasionalis anti-feodalisme menuntut pembubaran kesultanan/kerajaan. Alasan dari tuntutan tersebut karena kesultanan/kerajaan dianggap bersekutu dengan kolonial pada masa penjajah, dampaknya selanjutnya dari gerakan tersebut yaitu para raja dan sultan kehilangan bertahta, seperti Kerajaan Pontianak dan Kesultanan Ternate di Maluku Utara.⁴

Kesultanan Ternate dianggap bersekutu dengan Belanda oleh kaum nasionalis anti-feodalisme, karena Belanda menetap di Ternate pada masa perjuangan kemerdekaan dan menjalin hubungan perdagangan dengan Kesultanan Ternate sejak tahun 1607 hingga pedudukan Jepang. Sebagai konsekuensi dari pilihan politik Kesultanan Ternate pada masa itu, maka kaum nasionalis anti-

³ *Ibid.*, hal. 6-7.

⁴ *Ibid.*, hal. 171

feodalisme menuntut penahanan keluarga kesultanan. Kondisi tersebut menjadi titik awal melemahnya kekuatan politik Kesultanan Ternate pasca kemerdekaan.

Sejarah Kesultanan Ternate telah dimulai sekitar abad ke-13 dengan Sultan pertama bernama Zainal Abidin. Pelantikan Zainal Abidin sebagai Sultan menggantikan ayahnya yang bernama Marhum⁵. Sebelum menggunakan sistem pemerintahan dengan struktur kesultanan, penguasa di wilayah Ternate disebut *kolano*. Penggunaan istilah Sultan atau Kesultanan untuk penguasa di Ternate, merupakan wujud dari pengaruh masuknya agama Islam di Ternate dan diperkenalkannya agama tersebut kepada *kolano-kolano* oleh Datu Maulana Husain yang berasal dari Minangkabau.⁶

Sejak Raja Ternate yang pertama, Kolano Cico atau juga dikenal dengan “Mansur Malamo” berkuasa, hingga sebelum terjadi integrasi nasional setelah kemerdekaan Republik Indonesia, di Ternate telah bermukim empat komunitas masyarakat yaitu *Tubo*, *Tobona*, *Tabanga* dan *Toboleu*. Komunitas *Tubo* adalah mereka yang mendiami lereng bagian utara pulau Ternate, komunitas *Tobona*, yaitu bermukim dibagian selatan pulau Ternate, komunitas *Tabanga* berada di pantai utara dan komunitas *Toboleu* di pantai timur Ternate.⁷ Keempat kelompok masyarakat tersebut merupakan komunitas masyarakat adat yang berada dalam otoritas Kesultanan Ternate.

Kolonial yang melakukan monopoli rempah-rempah di Ternate sejak tahun 1500-an, secara tidak langsung membatasi kekuasaan kesultanan atas masyarakat adat yang secara kultur dan struktur terikat dengan kesultanan tersebut. Perubahan politik dengan berakhirnya era kolonial mengakibatkan perubahan struktur kekuasaan kerajaan dan kesultanan di Nusantara, wujud kongkrit dari perubahan tersebut yaitu kesultanan dan kerajaan tidak lagi menjadi kekuasaan yang otonom, karena telah menjadi bagian dari kekuasaan yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁵Untuk lebih mendalami mengenai Kerajaan Ternate dan masyarakat adat Ternate, baca Adnan Amal, *Kepulauan Rempah Rempah* (Makassar : Gelora Pustaka Indonesia, 2007) hal. 62.

⁶ *Ibid.*, hal. 63.

⁷<http://ternate.wordpress.com/2008/01/22/menelusuri-asal-usul-dan-jejak-sejarah-orang-ternate> (diakses pada tanggal, 12 april2010)

Perubahan struktur kekuasaan dengan adanya NKRI, berpengaruh pada kesetiaan masyarakat adat yang sebelumnya berada dalam struktur kekuasaan Kesultanan Ternate, menjadi kesetiaan kepada NKRI. Keadaan ini mempengaruhi otoritas Kesultanan Ternate atas masyarakat adat sehingga menimbulkan kevakuman dan ketidakstabil Kesultanan Ternate pasca kemerdekaan.⁸

Pada 1966, Mudaffar Syah anak ketiga dari Iskandar Muhammad Djabir Syah, kembali ke Ternate setelah sekian lama tinggal di Jakarta. Salah satu misi kembalinya Mudaffar Syah adalah untuk menata Kesultanan Ternate, kemudian atas desakan masyarakat adat, pada 1975 Mudaffar Syah diangkat menjadi sultan ke 47 oleh *18-bobato*⁹ (18 perwakilan masyarakat adat) setelah Sultan Muhammad Djabir Syah wafat.

Jika dibandingkan dengan kesultanan yang lain di Maluku Utara seperti Tidore, Bacan dan Jailolo, Kesultanan Ternate termasuk mendapat pengecualian. Berdasarkan catatan Klinken, pemerintahan Orde Baru mempunyai perhatian khusus kepada Kesultanan Ternate melalui Golkar, Sultan diberi ruang untuk berperan dalam politik lokal di Maluku.¹⁰

Dengan menjadi Sultan Ternate, posisi Mudaffar Syah makin menguat karena memiliki otoritas dan mendapat legitimasi dalam masyarakat adat Ternate. Sultan adalah patron bagi masyarakat adat, sehingga setiap perilaku politik Sultan akan berpengaruh pada masyarakat adat. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyadari bahwa Mudaffar Syah memiliki basis dukungan politik yang nyata, maka beliau dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku pada periode 1971-1977 dari Fraksi Golongan Karya.

Pada masa Reformasi, Sultan Mudaffar Syah juga terlibat dalam perjuangan pemekaran Provinsi Maluku Utara tahun 1999 sebagai daerah otonom terpisah dengan Maluku. Dengan dukungan masyarakat adat, keterlibatan sultan dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara merupakan upaya Sultan Ternate

⁸ Baca Kompas “Mudaffar Syah, 35 Tahun Berdaulat Rabu”, 14 April 2010

⁹ *Bobato 18 (bobato nyagimoi se tufkange)* adalah semacam lembaga perwakilan yang di tentukan berdasarkan “hukum dodego” (aturan adat) untuk lebih jelasnya baca “Sistem Pemerintahan Dan Perang Lembaga Adat” dalam Rinto Taib, *Gerakan Sosial Masyarakat Adat Kesultanan Ternate*, Ternate : Lembaga Kebudayaan Rakyat Maluku Kie Raha (LeKRra-MKR), 2008, hal. 44.

¹⁰ Davison, *op.cit.*, hal. 171.

untuk memperoleh legitimasi simbol dan kekuatan politik yang nyata di Maluku Utara.

Sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi simbol, Sultan dan Boki Ratu Nita Budhi Susanti (permaisuri Kesultanan Ternate) ikut terlibat dalam persaingan politik di Maluku Utara dan di Kota Ternate. Pada Pemilu 2004 Sultan Mudaffar Syah menjadi calon legislatif (caleg) untuk Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), pada tahun 2007 sebagai calon Gubernur Maluku Utara dan tahun 2009 sebagai caleg DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pada pemilu 2004 Boki sebagai caleg DPD, sedangkan tahun 2005 sebagai calon Walikota Ternate dan tahun 2009 sebagai caleg dari Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2009 terjadi perubahan perilaku politik Sultan dan Boki, dimana Sultan menjadi Caleg DPD dan Boki yang menjadi caleg dari Partai Demokrat. Perubahan tersebut diasumsikan berpengaruh pada perilaku memilih Masyarakat Adat Ternate, karena hasil Pemilu 2009 terjadi pergeseran suara partai dan perolehan kursi antara PDK dan Demokrat.

1.2 Perumusan Masalah

Perubahan politik pada masa Reformasi dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pada pasal 24 ayat (5) , mengenai pemilihan langsung. Menciptakan peluang elit-elit lokal termasuk pemimpin tradisional seperti Sultan, untuk tampil dalam politik dan menjadi kekuatan politik tersendiri dan diperhitungkan karena memiliki basis dukungan berdasarkan ikatan primordial.

Perubahan politik tersebut menjadi dimanfaatkan oleh Sultan Ternate untuk memperoleh legitimasi simbol dan kekuasaan nyata di Maluku Utara. Sultan sebagai elit lokal berbasiskan masyarakat adat Ternate, sebagai modal politik yang dimanfaatkan oleh partai politik pada Pemilu 2004 dan 2009 untuk memperoleh dukungan suara. Misalnya pada Pemilu 2004, Sultan sebagai caleg PDK berhasil menjadi anggota DPR-RI dengan memperoleh 24.692 suara atau 10% dari total suara sah. Pada Pemilu 2009 berhasil menjadi anggota DPD-RI Maluku Utara dengan perolehan 34.037 suara, dan mendapatkan 40% dari 80.378

Universitas Indonesia

suara sah di Kota Ternate, sedangkan 60% sisanya terdistribusi kedalam 26 calon anggota DPD.¹¹ Elit lokal lain yang memiliki kedekatan dengan masyarakat adat yaitu *Boki* (permaisuri) pada Pemilu 2004 sebagai anggota DPD memperoleh suara 60.841 suara atau 14,2%, dan pada Pemilu 2009 dengan menggunakan kendaraan Partai Demokrat menjadi anggota DPR-RI dengan perolehan 24.709 suara atau 10%. Dapat dilihat dari perolehan suara Sultan dan Boki, bahwa dukungan masyarakat adat tidak terpengaruh oleh partai politik sebagai kendaraan politik Sultan maupun Boki, akan tetapi pemilih lebih berorientasi pada figur Sultan dan Boki.

Keberadaan Sultan sebagai bagian dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan aktif dalam kampanye PDK di Ternate dan Maluku Utara pada Pemilu 2004, ternyata berpengaruh pada perolehan kursi partai tersebut di DPRD Kota Ternate (Tabel 1.1). Meski PDK tercatat sebagai partai baru pada Pemilu 2004 dan deklarasinya hanya dua tahun sebelum Pemilu 2004, yaitu 28 Juli 2002, akan tetapi PDK mendapat perolehan kursi terbanyak kedua setelah Golkar di DPRD Kota Ternate Periode 2004-2009.

Tabel 1.1

**Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Ternate Periode 2004-2009**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD	Persentase (%)
1	Partai Golkar	6	24
2	PDK	5	20
3	PAN	3	12
4	PPP	2	8
5	PDI Perjuangan	2	8
6	Partai Demokrat	2	8
7	PBR	2	8
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	8
9	PKPB	1	4
J u m l a h		25	100

Sumber : telah diolah kembali dari data KPUD Kota Ternate " Rekapitulasi Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Ternate 2004

¹¹<http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/01/267/215559/sultan-,asih-berkuasa-di-daerahnya> (diakses pada tanggal, 16 januari 2011). Dan http://malutpost.com/berita/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2001 di akses rabu,19 januari 2011.

Dari hasil perolehan kursi PDK pada Pemilu 2004 (Tabel 1.1), maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan antara keberadaan Sultan dalam partai dengan perolehan kursi PDK di DPRD Kota Ternate Pemilu 2004. Jika dibandingkan dengan dua partai lama dan telah dikenal masyarakat sejak Orde Baru, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang menjadi PDIP dan PPP. Perolehan lima kursi adalah jumlah yang luar biasa, dengan alasan PDK adalah partai yang baru maka popularitasnya lebih kecil dibanding dengan partai lama yang telah dikenal masyarakat. Alasan lain “mesin politik” PDK terbatas karena dalam waktu singkat sulit mempersiapkan kader-kader yang handal.

Pada Pemilu 2009 terjadi perubahan jumlah kursi PDK di DPRD Kota Ternate. Golkar tetap memimpin dengan enam kursi, posisi kedua ditempati oleh Demokrat dengan tiga kursi, PKS, PPP, PAN dan Hanura masing-masing dua kursi, Gerindra, PKPB dan lain-lain masing-masing satu kursi. Partai PDK yang pada Pemilu 2004 mendapat lima kursi di DPRD Kota Ternate, pada pemilu 2009 tidak lagi mendapat kursi (Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Ternate Tahun 2009

NO	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD	Persentase (%)
1	Partai Golkar	6	24
2	Partai Demokrat	3	12
3	PAN	2	8
4	PPP	2	8
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	8
6	Hanura	2	8
7	PDIP	2	8
8	PBB	2	8
9	Gerindra	1	1
10	PKPB	1	1
11	PKB	1	1
12	PBR	1	1
13	PDK	-	-
Jumlah		25	100

Sumber : telah diolah kembali dari data KPUD Kota Ternate ” Rekapitulasi Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Ternate 2009

Perubahan kursi PDK pada Pemilu 2009 diasumsikan karena adanya perubahan perilaku memilih masyarakat adat Ternate, sebagai respon atas perubahan perilaku politik Sultan Ternate yang tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut. Perubahan perilaku politik Sultan dengan mengundurkan diri dari kepengurusan PDK dipengaruhi oleh faktor kekecewaan Sultan atas sikap politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (DPD PDK) yang tidak mendukung pencalonan Sultan Mundaffar Syah, sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013 (Tabel 1.3).

Sebagai pemimpin yang memiliki *traditional authority* dan *religious authority* (otoritas tradisional dan agama), Sultan memiliki kharisma tersendiri dalam masyarakat adat Ternate. Kharisma yang dimiliki Sultan dalam hubungan dengan masyarakat adat menjadi daya tarik politik oleh setiap partai politik di Kota Ternate, karena setiap *event* politik Sultan dan unsur Kesultanan selalu menjadi rebutan partai politik untuk memperoleh dukungan suara. Pada Pemilu 2009, Sultan mendapat tawaran unsur pimpinan di DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS), DPD Partai Kedaulatan, Partai Demokrat untuk mendapat dukungan suara dari Masyarakat Adat Ternate. Namun kemudian, perjuangan politik Sultan Mudaffar Syah pada Pemilu 2009 tidak melewati jalur partai politik, akan tetapi melalui jalur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disisi lain *Boki* (permaisuri) yang sebelumnya adalah perwakilan DPD Maluku Utara, memilih bergabung dengan Partai Demokrat dan menjadi caleg DPR-RI.

Tabel 1.3
**Perbandingan Perolehan Kursi Partai
 Pada Pemilu Legislatif Kota Ternate 2004 Dan 2009**

No	Partai Politik	Pemilu		Keterangan
		2004	2009	
1	Golkar	6	6	-
2	PDK	5	-	Pemilu 2000, Sultan menjadi celeg PDK dan Pemilu 2009 Sultan non-partai sebagai Anggota DPD
3	PAN	3	2	-
4	PPP	2	2	-
5	PDI Perjuangan	2	2	-
6	Demokrat	2	3	Pemilu 2009, Boki (permaisuri) Menjadi caleg Partai Demokrat
7	PBR	2	1	-
8	PKS	2	2	-
9	PKPB	1	1	-
10	PBB	-	2	-
11	Hanura	-	2	-
12	Gerindra	-	1	-
	J u m l a h	25	25	

Sumber : telah diolah kembali dari data KPUD Kota Ternate " Rekapitulasi Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Ternate 2004 dan 2009"

Kecenderungan partai politik selalu menjalin hubungan dengan unsur Kesultanan Ternate, karena berdasarkan rasionalitas politik, kesultanan memiliki basis pemilih yang loyal. Basis pemilih yang dimaksud adalah masyarakat adat dengan pola patron-klien, kedekatan Sultan dengan partai tertentu akan berpengaruh pada perolehan suara partai tersebut karena akan didukung oleh masyarakat adat.

Belum ada penelitian untuk menyebut angka yang pasti mengenai jumlah keseluruhan total masyarakat adat Ternate, namun yang menjadi kesepakatan umum bahwa secara administratif masyarakat adat Kota Ternate berdomisili di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara dan sebagian di Ternate Tengah. Jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut 52,92% dari total 182.000 jiwa penduduk Kota Ternate (Tabel 1.4).

Tabel 1.4
Distribusi Jumlah Penduduk dan Jiwa Pilih Perkecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Pemilih	Keterangan
Kecamatan Pulau Ternate	16.376 jiwa	8,99	9.931	-
Kecamatan Moti	4.681 jiwa	2,57	3.913	-
Kec. Pulau Batang Dua	2.896 jiwa	1,59	1.818	-
Kecamatan Ternate Selatan	61.785 jiwa	33,93	52.296	-
Kecamatan Ternate Tengah	53.997 jiwa	29,65	42.683	Posisi masyarakat adat *
Kecamatan Ternate Utara	42.374 jiwa	23,27	34.729	
Total Penduduk	182.000 Jiwa			
Total Pemilih	145.370 Jiwa			

Sumber : telah diolah kembali dari data Badan Pusat Statistik Kota Ternate (BPS), *Kota Ternate dalam Angka Tahun 2009* dan KPUD Kota Ternate Tahun 2009

* Kedua kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Ternate Utara dan Tengah secara geografis mengapit posisi Kesultanan Ternate. Pada umumnya masyarakat Ternate, mengkategorikan kedua kecamatan tersebut sebagai “utara”, dan diartikan sebagai masyarakat adat atau “orang adat”, meski di kecamatan lain, beberapa orang adat berdiam di sana, akan tetapi tidak sebanyak di dua kecamatan tersebut. Kedua kecamatan tersebut sebagai tempat empat klan yang fungsional di Kesultanan yaitu; Soa Sio, Sangaji, Cim dan Heku.

Kecamatan Ternate Utara dan Tengah, adalah Daerah Pemilihan II (Dapil) berdasarkan dalam pembagian Dapil oleh KPUD Kota Ternate, dan Dapil II Ternate Utara-Tengah adalah basis masyarakat adat, berikut ini rekapitulasi suara partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Ternate (Tabel 1.5).

Tabel 1.5
**Rekapitulasi Distribusi Suara di Daerah Pemilihan II (Dapil) pada
 Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009**

Partai	Total Suara Partai	Nama Caleg	Capaian Suara
DAPIL II (Ternate Utara-Tengah)			
Golkar	9.666 (22,77 %)	M Taufan Andili Asgar Saleh	3.709 (8,73%) 1.489 (3,50%)
Demokrat	5.606 (13,20 %)	Abdullah Tahir	1.621 (3,81%)
PDIP	3.806 (8,96 %)	Merlisa	1.701 (4,00%)
PPP	2.295 (5,40 %)	Faisal Assagaf	541 (1,27%)
PKS	2.425 (5,71 %)	Is Suaib	892 (2,10%)
PAN	3.022 (7,11%)	Husni Bopeng	874 (2,05%)
PBR	2.053 (4,83 %)	Fuad Al Hadi	759 (1,78%)
Hanura	1.710 (4,02%)	Erni Drakel	410 (0,96%)
PBB	1.982 (4,66%)	Abdurrahman Al- Djokja	450 (1,06%)
Suara Sah: 42.450 Kuota Kursi: 10 Angka BPP: 4.245			

Sumber : telah diolah kembali dari data KPUD Kota Ternate ” Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Ternate 2009

Perilaku memilih masyarakat adat menjadi sesuatu studi yang penting karena dua alasan. Pertama, setiap perilaku politik Kesultanan, akan berpengaruh pada perubahan perilaku memilih masyarakat adat Ternate, sehingga menjadi menarik untuk memahami hubungan antara perilaku memilih masyarakat adat dengan perubahan perilaku politik Kesultanan Ternate. Kedua, masyarakat adat memiliki karakteristik yang homogen dan menempati dua kecamatan, yaitu 14 kelurahan di Kecamatan Ternate Utara dan sebagian kelurahan di Ternate Tengah. Secara statistik, 52% penduduk Kota Ternate berada di dua kecamatan tersebut, maka setiap perilaku politik masyarakat di dua kecamatan tersebut, akan berpengaruh terhadap kondisi politik Kota Ternate. Meski dari jumlah masyarakat adat di kedua kecamatan tersebut belum terdapat angka yang pasti, akan tetapi kedua kecamatan tersebut sebagai tempat masyarakat adat bertempat tinggal secara turun-temurun. Kedua kecamatan tersebut, secara geografis adalah tempat bermukim tiga dari empat komunitas awal masyarakat Ternate, yaitu *Tabu*,

Universitas Indonesia

Tabanga dan Tobelevu, serta tempat kelompok klan yang terdiri *Soa-Sio, Sangaji, Cim dan Heku*.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami karakter pemilih masyarakat adat di Kota Ternate, juga dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan partai politik dalam konteks masyarakat adat di Ternate. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai studi perilaku masyarakat adat di Indonesia.

1.4 Kajian Literatur (Signifikansi)

Clifford Geertz dalam studinya mengenai masyarakat Jawa (*Javanese villager*) memperkenalkan konsep *aliran pattern* dalam menjelaskan masyarakat Jawa di pedesaan. Namun kemudian konsep “aliran” diperluas oleh para ilmuwan politik yang tertarik dengan studi perilaku politik di Indonesia, bahkan konsep “politik aliran” sering kali digunakan untuk menggeneralisasi pola perilaku politik di Indonesia. Menurut pandangan Geertz,¹² bahwa “pola aliran” dalam konteks masyarakat Jawa, bersumber dari *religio-cultural pattern*, dimana pola itu

¹² Afan Gaffar, *Javanes Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 10-11.

mengelompokkan masyarakat Jawa kedalam kelompok Santri, Abangan dan Priyayi.

Dalam pandangan Geertz, Masyarakat Abangan adalah kelompok masyarakat yang tetap menjalankan ritual atau tradisi Jawa atau mereka biasa juga disebut kejawen. Santri yaitu mereka yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan kepercayaan Islam. Kelompok selanjutnya yaitu Priyayi, golongan ini dalam masyarakat Jawa memiliki kelas yang lebih tinggi, karena biasanya Priyayi adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan menduduki jabatan dalam birokrasi.

Sementara di lain pihak Afan Gaffar¹³ berpandangan bahwa, *aliran pattern* dalam konteks masyarakat Jawa adalah salah satu sumber dari *social and political cleavage*, karena terbentuk dari pengelompokan sosial berdasarkan kehidupan masyarakat Jawa. Untuk konteks Indonesia, *religio-cultural pattern* menurut penulis juga tetap relevan, karena konsep aliran dalam wujud santri-abangan yang bersumber dari asumsi tersebut, terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya konsep santri yang bersumber tradisi Islam, hal itu juga mewarnai sebagian besar karakteristik pemilih di Indonesia, karena sekitar 80% dari total penduduk Indonesia berkeyakinan Islam.

Selain model *religio-cultural pattern* dalam menjelaskan pola masyarakat di Indonesia, juga terdapat studi lain, yang dilakukan Karl Jackson dengan fokus analisisnya yaitu *traditional authority* pada masyarakat Sunda.¹⁴ Menurut Jackson, bahwa *traditional authority* (otoritas tradisional) adalah kekuasaan personal yang terjadi sebagai akumulasi dari masa lalu dan sekarang, yang di pengaruhi oleh hubungan saling ketergantungan. Jackson juga menambahkan bahwa, Otoritas tradisional adalah bagian dari model patron-klien, dimana yang terjadi adalah hubungan-hubungan yang sifatnya vertikal dan tidak simetris (*asymmetric*) antara patron dan klien.

Berdasarkan studi Gaffar, konsep otoritas tradisional Jackson tidak secara tuntas menjelaskan kepemimpinan tradisional dari pada masyarakat Jawa, yang

¹³ *Ibid.*, hal.12.

¹⁴ Studi yang dilakukan oleh Karl Jackson pada tahun 1973,1980 pada masyarakat Sunda, fokus analisisnya adalah otoritas tradisional kaitannya pemberontakan Darus Islam (DI) di Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya baca. *Ibid.* hal. 12-13.

memiliki peran sebagai orang yang berpengaruh, pelindung, berpendidikan, panuntan dan seterusnya. Begitu juga dengan studi yang dilakukan oleh Harry Tjan Silalahi, mengenai pemimpin (*leader*) dan pengikut (*follower*) dalam konteks hubungan parton-klien, dengan bentuk *paternalism* (bapakism). Kesimpulan Silalahi, bahwa ada tiga model kepemimpinan di pedesaan yang memiliki peran penting dan berpengaruh dalam pemilihan umum, yaitu pemimpin formal, pemimpin tradisional dan pemimpin agama.

Dalam kaitannya dengan studi mengenai pemilih di daerah pedalaman di Jawa, Gaffar¹⁵ berpandangan *socio-cultural beliefs*, *party Identification*, *social status* dan *pattern of leadership*, sebagai faktor yang berpengaruh dalam perilaku politik di Indonesia, khususnya di Jawa. Maka akan timbul pertanyaan, apa yang khas dari studi Gaffar dibanding dengan studi yang dilakukan oleh Geertz, Jackson, dan Silalahi terkait dengan analisis struktur kekuasaan di Indonesia? Sebenarnya studi yang dilakukan oleh Gaffar, hanya mencoba untuk lebih mendalami dan menerjemahkan lebih jauh tentang konsep yang telah dilakukan pendahulunya, kemudian konsep tersebut dihubungkan dengan perilaku pemilih.

Sama halnya studi perilaku pemilih yang dilakukan oleh ilmuwan politik di dunia. Gaffar dalam studinya mengenai pemilih di Jawa mengatakan bahwa variabel agama atau kepercayaan masih menjadi variabel yang utama dalam kajian perilaku pemilih, demikian halnya kesimpulan dari studi Legee dan Kellestedt yang menunjukkan keeratan hubungan antara agama dan politik.¹⁶ Kemudian variabel kedua dalam menjelaskan perilaku pemilih adalah *party identification*, variabel ini lebih terkait dengan kedekatan psikologis dari pemilih. Dalam studi pemilih di Amerika dan Eropa, variabel ini menjadi variabel yang erat hubungannya dengan pilihan preferensi pemilih. Demikian halnya di Indonesia, berdasarkan kajian Donald K Emmerson¹⁷ “Indonesian’s elit”, bahwa terjadi perbedaan kecenderungan, misalnya Abangan memiliki kecenderungan

¹⁵ *Ibid.*, hal.12

¹⁶ Untuk lebih jernih jelas mengenai studi hubungan agama dan politik dalam setting politik Amerika baca David G Legee dan Lyman A Kellestedt, *op.cit.* hal., 3-12.

¹⁷ Lihat Afan Gaffar, *op.cit.*, hal.17

untuk bergabung dengan organisasi sekuler, sedangkan Santri lebih cenderung pada organisasi Islam, yang tentunya juga berkaitan dengan preferensi partai.

Variabel ketiga yang penting menurut Gaffar, yaitu *the pattern of leadership* (pola kepemimpinan). Dalam studi yang telah dilakukan sebelumnya, oleh Indonesianis seperti Herbert Feith (1963) Geertz (1960,1965), Hobstede (1971) Robert Jay (1963,1969), dan ilmuwan berkebangsaan Indonesia, seperti Koentjaraningrat (1965,1985) Sarjono Kartodirdjo (1966,1972,1973,1984),¹⁸ berkesimpulan bahwa dalam masyarakat Jawa, faktor kepemimpinan adalah faktor yang utama yang mempengaruhi dan membentuk perilaku individu.

Dalam konteks masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia pada umumnya, di dalam masyarakat selalu ada yang namanya stratifikasi sosial, namun penggunaan istilah yang digunakan terkadang berbeda satu sama lain. Misalnya dalam masyarakat Jawa, terdapat dua kelompok masyarakat *wong gedhe* dan *wong cilik*¹⁹. Mereka yang *wong gedhe*, biasanya yang menjadi pemimpin dalam masyarakat, sedangkan yang *wong cilik* adalah rakyat biasa dan diatur oleh yang *wong gedhe*. Pada masyarakat lain juga memiliki stratifikasi relatif sama, seperti pada masyarakat Bugis di Sulawesi, ada golongan bangsawan yang biasa bergelar “andi” mereka dalam mitos Bugis adalah keturunan *dewata* (dewa) yang diyakini “berdarah putih”, dan ada yang golongan masyarakat biasa yang dikenal dengan *tau sama* atau *tau maradeka* (orang yang merdeka).²⁰

Studi yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia sebagaimana telah disebutkan diatas, baik Feith maupun Gaffar lebih melihat pada aspek sosiologisnya dan studinya dilakukan sebagian pada masa pemerintahan Orde Baru. Studi setelah Orde Baru atau masa reformasi, seperti yang dilakukan Saiful Mujani dan R. William Liddle, yang melahirkan kesimpulan berbeda dengan studi perilaku-perilaku pemilih di Indonesia yang dilakukan sebelumnya.

¹⁸ *Ibid.*, hal.18.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 18-19.

²⁰ Baca Stratifikasi sosial dalam masyarakat bugis dalam Christian Pelras,*Manusia Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta Paris, 2006 hal.,192-194

Berdasarkan studi Mujani dan Liddle, bahwa perilaku pemilih di Indonesia pasca Orde Baru yaitu pada Pemilu 1999 dan 2004,²¹ dari hasil survei menunjukkan bahwa faktor *leaderships* dari kandidat yang bersangkutan dan *self-indentification* terhadap partai politik memainkan peran dalam pemilu 1999 dan 2004 yang mempengaruhi perilaku pemilih. Hasil survei tersebut sekaligus menjadi pembanding atas studi perilaku pemilih-pemilih sebelumnya, dengan asumsi bahwa faktor sosiologis atau faktor kultural yang menjadi penentu perilaku politik, misalnya agama, etnis dan kelas.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, Mujani dan Liddle berkesimpulan Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa, karena perilaku pemilih masyarakat di Indonesia semakin lama semakin menjadi pemilih yang rasional, indikasinya berdasarkan hasil survei pada pemilu 1999 dan 2004 pemilih cenderung selektif dalam memilih kandidat.

Pada Pemilu 2009 berdasarkan studi Mujani dan Liddle, kedua faktor sebelumnya yaitu faktor *leaderships* dari kandidat dan *party indentification* tetap menjadi sumber pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, akan tetapi kedua variabel tersebut tidak lagi menjadi variabel yang dominan karena telah digeser oleh *media campaigns* (kampanye media) terutama televisi.

Yang menjadi kekhasan penelitian ini, jika dibanding dengan penelitian perilaku sebelumnya adalah objek penelitiannya, dimana masyarakat adat Ternate adalah kelompok masyarakat yang secara struktur dan kultur terikat oleh Kesultanan Ternate yang memiliki sejarah yang sama dan menempati wilayah tersebut secara turun-temurun sejak abad ke-13.

1.5 Kerangka Konsep dan Teori

1.5.1 Konsep Masyarakat Adat

Dalam setiap masyarakat dipastikan memiliki kebudayaan, sedangkan dalam setiap kebudayaan yang ada pasti memiliki ciri yang berbeda antara satu

²¹ Lihat R. William Liddle dan Saiful Mujani “*Leaderships, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior In Indonesia*” dalam R. William Liddle dan Saiful Mujani “*Personality, Party And Voter*” *Journal Of Democracy Volume 21 Number 2 April 2010*, hal. 37. Atau www.jurdil.org/pemilu04downloadpress-release-april-6-i (Di download pada tanggal 20, agustus 2010)

dengan lainnya. Budaya pada setiap masyarakat menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, yang berlaku secara umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut.

Untuk menjadi nilai baku, suatu budaya mengalami proses seleksi yang kemudian dinamakan sebagai pranata, dalam berbagai wujud seperti pranata agama, politik, keluarga dan lain-lain.²² Dengan menggunakan perspektif sosiologi, maka pranata yang ada dapat digolongkan kedalam dua macam pranata yaitu pranata primer dan sekunder.²³ Pranata primer adalah suatu nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia, misalnya harga diri, jati diri dan kelestarian manusia. Poin pokok dalam pranata primer adalah bersifat mendasar dan tidak mudah berubah. Pranata sekunder sebaliknya, dimana nilai-nilainya mudah berubah sesuai dengan pertimbangan rasional yang menguntungkan.

Jika disepakati bahwa masyarakat sebagai definisi kolektif, maka dipastikan di dalamnya terdapat struktur kekuasaan untuk pengaturannya, sehingga di dalamnya juga terdapat pranata politik, baik dalam bentuk kompleks maupun yang sederhana. Masyarakat politik dalam bentuk negara dapat memiliki ragam kebudayaan atau justru kebudayaan yang homogen. Masyarakat dalam bentuk negara yang terdiri atas berbagai golongan suku bangsa, agama, etnik dan bahasa menunjukkan kompleksitas sesuai dengan ragam karakteristik masyarakat tersebut. M.G Smith menyebutkan terdapat tiga golongan masyarakat yaitu masyarakat homogen, masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen.²⁴

Pertama, masyarakat homogen adalah masyarakat yang terdiri dari satu suku bangsa dan kebudayaannya menjadi pedoman hidup sehari-hari. Sehingga pranata yang digunakan dalam keluarga, kekerabatan serta kehidupan sehari-hari adalah sama, karena bersumber dari kebudayaan yang satu, untuk konteks negara salah satu contoh model ini yang dapat dijumpai yaitu negara Jepang.²⁵

²² Lihat Parsudin Suparlan, *Orang Sakai Di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hal. 4

²³ *Ibid.*, hal. 6

²⁴ Lihat G.M. Smith dalam Suparlan, *Ibid.*, hal. 8

²⁵ *Ibid.*, hal. 9

Kedua, masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari sejumlah suku bangsa yang hidup berdampingan dalam kemajemukan tersebut. Dalam kehidupan sosial sejumlah suku bangsa dan kebudayaan berinteraksi, kemudian menghasilkan kebudayaan setempat atau kebudayaan yang bersifat lokal, yang tercipta atas kesepakatan bersama. Kemajemukan dalam konteks negara diramu menjadi kebudayaan nasional, melalui konsep ideologi negara yang kemudian melahirkan kebudayaan nasional. Kemajemukan yang ada seringkali menjadi sumber konflik dalam politik, karena terjadi ketimpangan distribusi struktur politik yang tidak mencerminkan kemajemukan kebudayaan.

Ketiga, masyarakat heterogen adalah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kemajuan kehidupan ekonomi dan teknologi yang tinggi, kemajemukan yang ada telah menyatu kedalam kebudayaan nasional. Kekuatan-kekuatan politik yang bersumber dari suku bangsa telah dilemahkan oleh sistem nasional, terutama hak kepemilikan tanah atau ulayat yang menjadi landasan utama kekuatan politik suku bangsa, yang telah dikuasai oleh negara.²⁶

Dengan meminjam terminologi M.G.Smith mengenai golongan masyarakat yaitu masyarakat homogen, majemuk dan heterogen. Maka masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai masyarakat majemuk, karena berdasarkan data mengenai jumlah suku bangsa sebanyak 300 suku, ragam bahasa 400 bahasa dan 12.000 jumlah pulau dan yang dihuni sekitar 6000-an pulau. Fakta ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk dan multikultural. Multikultural yang ada telah dijamin dalam ideologi negara berupa " *Bhinneka Tunggal Ika*" dimana kemajemukan dirangkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun masyarakat Indonesia digolongkan dalam kategori masyarakat majemuk, tetapi pada tingkat lokal masih ada masyarakat yang bercorak homogen, dimana suku bangsa atau pun kelompok masyarakat kecil tetap mempertahankan kebudayaan dan pola-pola tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Biasanya kelompok masyarakat ini diidentifikasi sebagai suku

²⁶ Suparlan *op.cit.*, hal.12.

asli, pribumi dan minoritas,²⁷ atau istilah yang sekarang sedang populer yaitu “masyarakat adat,” dalam ungkapan bahasa Inggris sepadan dengan *indigenous people*.

Masyarakat adat adalah terjemahan dari *indigenous people*, yang pada masa kolonial dikenal dengan istilah “Bumiputra”. Terminologi tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah penjajah dalam pengelolaan daerah jajahan. Kolonial dalam pengelolaan daerah jajahan, menggunakan dua hukum yaitu hukum Eropa bagi orang asing yang terdiri dari Eropa, Arab, China dan India, sedangkan hukum adat berlaku bagi Bumiputra atau *inlander*. Kemudian dengan adanya kemerdekaan pada 1945, penggunaan Bumiputra dianggap tidak relevan karena bermakna rasis sehingga diganti dengan “Orang Indonesia Asli”.²⁸ Namun penggunaan kata *indigenous people* pada masa kolonial dianggap kurang tepat, karena semua pribumi dianggap sebagai *indigenous people* atau masyarakat adat.

Menurut Stavenhagen dan Kingsburry, “masyarakat adat adalah keturunan dari orang yang menghuni suatu wilayah, sebelum wilayah itu diserang, ditaklukkan oleh kekuatan asing atau masyarakat lain”. Namun, definisi masyarakat adat yang lebih lengkap dapat dijumpai pada tulisan Sandra Moniaga, bahwa masyarakat adat adalah mereka yang mempunyai asal usul geografis tertentu dan satu sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan pengelolaan tanah yang khas.²⁹

Penggunaan kata “masyarakat adat” sebagai suatu identitas masyarakat untuk menggantikan terminologi Orde Baru yaitu “orang asli”, “pribumi atau bumiputra” dan “masyarakat tradisional”. Penggantian terminologi tersebut,

²⁷ Beberapa masyarakat yang masih bertahan dengan adat kebiasaan tradisional yang diwariskan secara tradisi, mereka diidentifikasi sebagai: suku asli (*tribals*), orang asli (*aborigines*), pribumi (*native*) dan lain-lain, untuk lebih jelasnya baca kata pengantar Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes (ed.), *Suku Asli Dan Pembangunan Di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal. 3. Terjemahan dari *Tribal People And Development In Southeast Asia*.

²⁸ Berdasarkan catatan Sandra Moniaga dalam tulisannya “Dari Bumiputra Ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang Dan Membingungkan”, bahwa kesepakatan akan penggunaan istilah “masyarakat adat” yang sepadan dengan “Orang Asli”, “Masyarakat Tradisional” dan “*Indigenous people*” pertama pada tahun 1993, sebagai hasil kesepakatan dari pertemuan Tanah Toraja (Sulawesi Selatan) yang difasilitasi oleh WALHI dan melibatkan pimpinan masyarakat adat dan aktivis HAM. Lihat Sandra Moniaga “Dari Pribumi Ke Masyarakat Adat” dalam Jamie S. Davison (ed.), *op.cit.*, hal. 309-310.

²⁹ *Ibid.*, hal. 303,310.

diperkenalkan pada pertemuan perwakilan adat seluruh Indonesia yang dikenal dengan kesepakatan Tanah Toraja pada tahun 1993. Kemudian pada tanggal 15-22 Maret 1999, diadakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama (KMAN I) yang diikuti oleh deklarasi penolakan terminologi Orde Baru yang merugikan masyarakat adat, misalnya *suku terasing*, *peladang liar*, *penebang liar* dan *masyarakat primitif*.³⁰ Semua istilah tersebut sebagai padanan untuk masyarakat adat, pada masa Orde Baru memiliki kecenderungan merendahkan masyarakat tersebut. Untuk membatasi terminologi yang merugikan masyarakat adat, maka KMAN I mengeluarkan definisi sendiri, yang merupakan penyempurnaan lokakarya Tana Toraja tahun 1993³¹:

Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Kesimpulan dari ketiga definisi mengenai masyarakat adat yang telah disebutkan sebelumnya, baik dari Moniaga, Stavenhagen dan Kingsburry, maupun definisi yang dikeluarkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KAMAN), bahwa masyarakat adat selalu diidentifikasi dengan pendekatan geografis, nilai tertentu serta kedaulatan atas tanah. Sehingga untuk membatasi masyarakat adat berbeda dengan masyarakat lain, seminimal mungkin harus meliputi tiga indikator yaitu berada dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki tata nilai khusus, serta mempunyai kedaulatan atas tanah.

Dengan mengacu pada letak geografis dan tata nilai yang khas pada masyarakat adat Ternate, serta undang-undang terdahulu yang terkait,³² maka

³⁰ Baca Gerg Acciaioli “ Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Kedaulatan Adat: Konseptualisasi-Ulang Ruang Lingkup dan Signifikasi Masyarakat Adat Dalam Indonesia Kontemporer”. *Ibid.*, hal. 327-329

³¹ *Ibid.*, hal.128.

³² Undang-Undang yang dimaksud adalah pertama, UU No.5 Tahun 1960, tentang pokok-pokok agraria. Kedua UU No.5 Tahun 1992 tentang cagar budaya. Ketiga UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. keempat UU No.11 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Ternate. Kelima UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Keenam No.10 tahun

Pemerintah Kota Ternate, mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009, Tentang perlindungan hak-hak adat dan budaya masyarakat adat Kesultanan Ternate. Dalam Perda No. 13 Tahun 2009, menyebutkan definisi “Adat” dan “masyarakat adat”. Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1, ayat 6 menyebutkan “adat” adalah kebiasaan budaya yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada ayat 8, menyebutkan “ masyarakat adat” adalah masyarakat yang memiliki tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan dilaksanakan secara turun-temurun.

Pada pasal II, ayat 3 dan 4 dalam Perda Kota Ternate No. 13 tahun 2009, menjelaskan makna adat-istiadat yang berupa pengakuan terhadap tata nilai/norma yang berlaku secara turun-temurun, yang mengatur hubungan manusia hamba dan sang Khalik, hubungan antara masyarakat dan pimpinan dan sebaliknya, serta hubungan masyarakat dengan masyarakat. Adat istiadat yang dimaksud adalah: *Adat se Atorang* (tata nilai), *Se Kabasarang* (saling menghormati), *Ghalib se Likudi* (Manusia Sebagai Mahluk Sosial), *Cing se Cara*, *Baso se Rasai* (tenggang rasa) dan *Sere Seduniru* (kesenian tradisional).³³

Merujuk pada definisi Moniaga, KMAN, Stavenhagen dan Kingsburry, serta Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2009 mengenai “masyarakat adat”, maka penulis mendefinisikan bahwa, yang dimaksud “Masyarakat Adat Ternate” adalah mereka yang berada dalam wilayah kesultanan, terikat secara struktur dan kultur dengan kesultanan Ternate. Definisi yang mengacu pada hasil wawancara dengan dewan pakar kesultanan Ternate³⁴:

Untuk memahami batasan masyarakat adat Ternate, maka kita tidak boleh lepas dari konteks sejarah awal Kesultanan Ternate, bahwa Kesultanan Ternate dibentuk dari empat komunitas awal secara geografis yaitu *Tubo*,

2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketujuh UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kedelapan, Peraturan Agraria/ kepala Badan pertahanan nasional No.5 Tahun 1999 tentang pendoman penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

³³ Baca Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2009(lampiran 3) dalam Rinto Taib, *op.cit.*, hal. 192-195.

³⁴ Hasil wawancara singkat dengan Ketua Dewan Pakar Kesultanan Ternate, Rinto Taib, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2011 Jam 10.47

Tobonan, Tabanga dan Tobelevu. Serta struktur yang tetap fungsional dari dulu hingga sekarang yang terdiri dari Sangaji, Soa-sio, Cim dan Heku.

Untuk tujuan penelitian perilaku memilih masyarakat adat Ternate, maka masyarakat adat Ternate yang menjadi objek penelitian, yaitu hanya dibatasi pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara dan Ternate Tengah atau mereka yang berada pada daerah pemilihan (Dapil) Ternate Utara-Tengah. Pertimbangan peneliti dalam memilih kedua kecamatan tersebut, karena secara geografis dan tata nilai berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Kedua kecamatan tersebut, juga mewakili ketiga komunitas awal Ternate yaitu *Tabo, Tabangan dan Toboleu*, serta mewakili struktur fungsional kesultanan yang terdiri dari *sangaji, soa-sio, cim dan heku* yang sekarang berbentuk kelurahan.

1.5.2 Teori Perilaku Memilih

Untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009, maka penelitian ini menggunakan teori perilaku pemilih. Teori perilaku memilih dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis.

Studi tentang perilaku pemilih, adalah sebagai studi yang penting dalam kajian demokrasi liberal, karena perilaku pemilih berkaitan dengan partisipasi politik warga negara dalam peristiwa politik, dalam menentukan dan mengambil keputusan-keputusan politik. Studi ini juga sebagai sub bagian dalam kajian ilmu politik yang lahir dari perkembangan pendekatan *behavioral* dalam ilmu politik di tahun 50-an. Yang menjadi inti dalam studi ini adalah bagaimana para pemilih menentukan pilihannya atau sampai pada keputusan, untuk memilih partai X atau Y, kandidat A atau B dan seterusnya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Definisi Perilaku Pemilih

- Sebagai studi yang menggeluti kebiasaan dan kecenderungan pilihah rakyat dalam pemilu serta latar belakang mereka dalam melakukan pilihan (Jack C. Plano).

Universitas Indonesia

- ❑ Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan memilih atau tidak memilih dalam Pemilu (Ramlan Surbakti 1999).
- ❑ Perilaku pemilih dapat digambarkan dalam dua dimensi yaitu *preference* (preferensi) dan *activity* (aktivitas) (Huge A Bone, Austin Ranney: 1976).

Di Indonesia, studi tentang perilaku pemilih menjadi menarik pasca berakhirnya 32 tahun rezim otoriter Presiden Soeharto, karena setiap individu maupun kelompok memiliki peluang yang sama dalam menentukan pilihan. Dengan keterbukaan dan kebebasan dalam menentukan pilihan, maka akan beragam pula pertimbangan atau alasan untuk sampai pada pilihan tersebut. Dalam menentukan pilihan kelompok ataupun individu, sangat tergantung pada latar belakang kelompok dan individu tersebut. Latar belakang bisa dalam wujud pendidikan, komunitas tertentu, status sosial dan lain-lain. Selain latar belakang sosial, faktor kedekatan atau hubungan emosional turut menentukan kecenderungan sikap seseorang.

Untuk memahami perilaku pemilih terdapat tiga model pendekatan yang sering digunakan dalam studi *voting behavior*. Pertama *sociological model* (yang juga dikenal struktural), kedua *psychological model* dan ketiga *rational voter model*.³⁵ Ketiga pendekatan ini lahir sebagai reaksi atas pendekatan sebelumnya, atau untuk menyempurnakan pendekatan tersebut. Namun menurut penulis, ketiga pendekatan tersebut justru saling melengkapi satu sama lain, karena terkadang akan ditemui kesulitan dalam menjelaskan perilaku pemilih jika terfokus hanya pada satu model pendekatan saja.

Selain ketiga model di atas yaitu sosiologis, psikologis dan pilihan rasional, Ramlan juga menambahkan dua model yang lain dalam studi tentang perilaku pemilih. Kedua model atau pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan

³⁵ *Sociological model* adalah yang juga dikenal dengan model struktural, pertama digunakan oleh peneliti Colombia pada tahun 1940 dalam menjelaskan pemilu. Sedangkan *social-psychological model* pertama kali digunakan oleh *Michigan Survey Research center* pada tahun 1952, yang kemudian disusul oleh *rational voter model*. Untuk lebih detail baca, Richard G Niemi, Herbert F Weisberg, *Controversies In Voting Behavior*, Washington DC: Congressional Quarterly Inc, 1984

struktural dan pendekatan ekologis.³⁶ Pendekatan struktural, yang dimaksud Ramlan dengan pendekatan struktural adalah suatu model yang menganalisa dan menganggap perilaku pemilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, baik berupa struktur sosial, sistem partai dan pemilu, maupun permasalahan dan program yang dikedepankan oleh partai.

Maksud dari pendekatan ekologis, yaitu suatu model perilaku pemilih yang menekankan pada aspek teritorial atau kewilayahan. Pendekatan ini menjadi penting jika dalam suatu daerah pemilihan terjadi perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan teritorial. Namun menurut penulis, kedua pendekatan yang ditambahkan Ramlan dalam menambah khasanah teoritis untuk meneropong perilaku pemilih adalah merupakan pengembangan model sosiologis yang telah ada sebelumnya.

Namun dalam penelitian ini, mengenai perilaku memilih masyarakat adat Ternate, akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *sociological model* dan *psychological model*, sedangkan *rational voter model* kurang tepat untuk menggambarkan perilaku memilih karena tidak nampak kompetisi kelas yang berdimensi kepentingan ekonomi dalam menentukan perilaku memilih masyarakat adat yang homogen.

1.5.2.1 Faktor Sosiologis

Dalam *sociological model* (model sosiologis) untuk memahami perilaku pemilih, melihat perilaku berkaitan erat dengan latar belakang sosial seseorang. Latar belakang sosial yang dimaksud dapat berupa latar belakang demografi, sosial ekonomi, agama dan pendidikan.³⁷ Menurut Hoge A. Bone Austin Ranney lebih mempertajam latar belakang sosial kedalam tiga kategori³⁸. Pertama, *categoric-group memberships*, dalam kategorisasi ini ada berbagai macam karakteristik, misalnya pendidikan, jenis kelamin dan kelompok umur. Meskipun kelompok karakteristik tersebut tidak secara yang langsung berafiliasi dengan

³⁶ Lihat Ramlan Surbakti *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 145.

³⁷ Ramlan, *op.cit.*, hal.145-147

³⁸ Baca Hugh A. Bone dan Austin Ranney, *Politic And Voters*, USA : McGraw-Hill, 1976), hal.17-19.

organisasi politik tertentu, akan tetapi perilaku politik mereka sangat ditentukan oleh reaksi kelompok karakteristik terhadap berbagai macam isu yang terkait dengan mereka. Reaksi atas isu tersebut tergantung pada peristiwa politik, misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas pajak untuk kelompok usia 60 tahun, maka perilaku politik mereka pasti akan mendukung partai pemerintah.

Kedua, *secondary group*, kelompok ini jauh berbeda dengan kelompok yang pertama, karena mereka menyadari identitas kelompoknya dan memiliki tujuan tersendiri dalam rangka mempertahankan tujuan kelompok. Dengan kesadaran akan identitas dan tujuan kelompok, maka *secondary group* yang terdiri dari status sosial ekonomi atau kelas sosial, kelompok pekerjaan dan etnis, menjadi kekuatan politik tersendiri yang dapat dimobilisasi.

Dengan kesadaran akan identitas, maka kelompok ini mudah untuk dimobilisasi dukungannya, karena kelompok ini dapat menghasilkan kedekatan secara psikologis dengan memperkuat identifikasi individu atas kelompok, sehingga mereka sadar bahwa mereka adalah etnis tertentu, anggota buruh dan lain-lain. Keterlibatan secara langsung dan tidak langsung pemimpin kelompok, akan mempengaruhi dukungan mereka karena pertimbangan loyalitas atas kelompok.

Ketiga, *primary groups*, kelompok ini terdiri dari orang-orang yang intens bertemu dan berinteraksi setiap hari, misalnya suami dengan istri, anak dengan orang tua dan teman-teman. Pengaruh kelompok ini dalam menentukan perilaku pemilih seseorang sangatlah berarti, misalnya berdasarkan studi perilaku pemilih ditahun 1950-an oleh Angus Campbell dan kawan-kawan, bahwa 90 sampai 95 persen pasangan suami-istri memiliki preferensi yang sama atau rata-rata anak yang memiliki hak memiliki mempunyai pilihan yang sama dengan orang tuanya.³⁹

Model sosiologis adalah pendekatan awal yang dikenal dalam studi perilaku pemilih, dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakter sosiologisnya, baik agama, etnis, status sosial dan lain-lain. Namun para ilmuwan

³⁹ Lihat Angus Campbell, Gerald Gurin dan Warren E Miller “ *The Voter Decide*”, Dalam Hugh A.Bone dan Austin Ranney, *Ibid.*, hal. 26.

dalam pendekatan ini sering melakukan penekanan khusus pada aspek tertentu, misalnya Seymour Martin Lipset dan Stein Rokka dalam melihat perilaku pemilih dengan lebih menekankan pada identitas sosial, seperti pekerjaan dan status sosial sebagai faktor yang berpengaruh.⁴⁰

Dalam penelitian ini, faktor sosiologis yang akan diteliti pertama, yaitu demografi masyarakat adat dalam hubungannya dengan perilaku memilih, yang terdiri dari agama, usia, jenis kelamin, status pernikahan, suku, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan serta letak geografis pemilih. Faktor sosiologis yang kedua, terkait dengan hubungan struktur fungsional masyarakat adat yang bersumber pada empat kelompok klan yaitu *soa-sio*, *sangaji*, *heku* dan *cim*. Ketiga, faktor pengaruh stratifikasi sosial adat Ternate, yang terdiri dari golongan *Jou*, *dano*, *soangare* dan *bala*, terhadap kecenderungan pilihan partai. Aspek sosiologis yang keempat, yang akan di analisis adalah hubungan antara status dalam keluarga yang terdiri dari suami/istri (kepala rumah tangga), anak, anak *piara* (anak asuh) dan famili yang lain, dalam hubungannya dengan perilaku memilih partai.

1.5.2.2 Faktor Psikologis

Psychological model (model psikologis) yang ditekankan dalam model ini adalah perilaku pemilih ditentukan dari kedekatan emosional, misalnya dalam bentuk dukungan pada partai dan kandidat tertentu yang didasarkan atas faktor emosional atau kedekatan, bukan faktor lain. Menurut pendekatan ini, kelas sosial, etnis, agama dalam model sosiologis tidak menggambarkan kelompok sosial (*social group*) karena bersifat abstrak. Oleh karena identifikasi pemilih terhadap partai lebih disebabkan *feeling* atau hubungan emosional.⁴¹

Pendekatan ini lahir sebagai respon atas pendekatan sebelumnya. Model psikologis menemukan kekurangan yang ada dalam model sosiologis, dimana dalam model sosiologis memiliki kelemahan dalam hal metodologi, karena bersifat abstrak, seperti telah disebutkan sebelumnya. Persoalan yang dihadapi

⁴⁰ Baca Seymour Martin Lipset dan Stain Rokkan “*Party System And Voter Alignments*” dalam Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rule And Political Behavior*, New York: Cambridge University Press, 2004, hal. 96

⁴¹ Alan S. Zuckerman (ed.) *The Political Logic: Personal Networks As Contexts for Political Behavior* Philadelphia: Temple University Press, 2005, hal.9.

terkait cara dalam melakukan pengukuran-pengukuran atas konsep-konsep sosiologis seperti kelas, agama, pendidikan dan lain-lain.⁴² Menurut mahzab Michigan, bahwa perilaku individu hanya sebagai *intervining variable* yang disebabkan oleh faktor lain, jadi perilaku individu terbentuk dari akumulasi proses yang telah terjadi sebelumnya, proses ini terjadi melalui sosialisasi dari lingkungan dimana individu tumbuh dan berkembang.

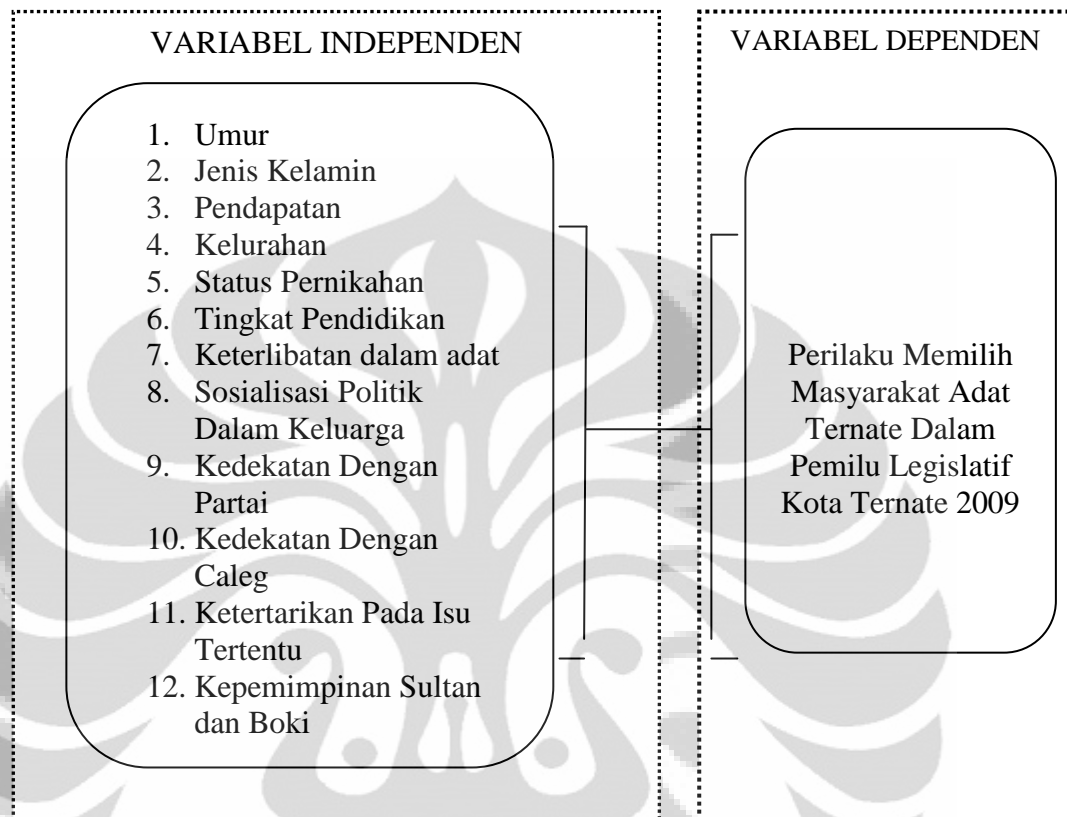
Pendekatan ini adalah model yang pertama kali digunakan oleh Michigan Survey Research Center di tahun 1952 dalam menjelaskan pemilu ada tiga aspek psikologis yang menentukan perilaku pemilih seseorang.⁴³ Pertama, *person's attachment to the party (party identification)*; kedua, *person's orientation toward the issue*; dan ketiga, *person's orientation toward candidate*.

Faktor psikologis masyarakat adat yang akan diteliti dalam penelitian perilaku memilih masyarakat adat Ternate adalah pertama, faktor hubungan kedekatan masyarakat adat dengan partai tertentu terhadap perilaku memilih pada pemilu legislatif Kota Ternate. Kedua, hubungan antara ketertarikan terhadap isu dengan pilihan partai. Ketiga, faktor kedekatan masyarakat dengan calon anggota legislatif, dengan kecenderungan pilihan partai. Keempat, faktor perilaku politik Sultan dan Boki (permaisuri) dalam pemilu tahun 2009.

⁴² Lihat Richard L.Meritt, Arend Lijphart, dalam Afan Gaffar, *op.cit*, hal.7.

⁴³ Richard G Niemi, Herbert F Weisberg. *op.cit.*,hal.12.

1.6 Model Analisis
Gambar 1.1
Model Analisis Penelitian



1.7 Hipotesis

1. Tidak ada hubungan antara perilaku memilih masyarakat adat Ternate dengan variabel umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan/pengeluaran, status perkawinan, status dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, keterlibatan dalam adat, sosialisasi politik dalam keluarga, kedekatan dengan partai, kedekatan dengan caleg, ketertarikan pada isu tertentu dan pola kepemimpinan Kesultanan Ternate.
2. Ada hubungan antara perilaku memilih masyarakat adat Ternate dengan variabel umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan/pengeluaran, status perkawinan, status dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, keterlibatan dalam adat, sosialisasi politik dalam keluarga, kedekatan dengan partai, kedekatan dengan caleg, ketertarikan pada isu tertentu dan pola kepemimpinan Kesultanan Ternate.

Universitas Indonesia

1.8 Definisi Operasional

1.8.1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel yang akan yang diteliti adalah variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau tergantung pada variabel lain. Variabel dependen yang dimaksud adalah perilaku memilih partai masyarakat adat Ternate pada pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009. Masyarakat adat yang akan diteliti yaitu pemilih di Dapil II Ternate Utara dan Tengah, dengan skala pengukuran yaitu skala nominal.

Definisi operasional terkait dengan variabel dependen yang perlu di jelaskan adalah perilaku memilih dan masyarakat adat. **Perilaku memilih** yaitu pilihan partai masyarakat adat dalam pemilu legislatif Kota Ternate Tahun 2009. **Masyarakat Adat Ternate** adalah kelompok masyarakat yang di Ternate memiliki hubungan keturunan dengan Komunitas Awal Ternate, Kelompok Marga, serta Etnis yang terdiri dari Ternate, Tidore, Makian, Tobelo, Galela, Bacan dan Sanana.

1.8.2. Variabel Independen

Variabel berikutnya adalah variabel independen, yaitu variabel yang berfungsi menjelaskan variabel terikat atau juga dikenal dengan variabel bebas yang diturunkan model sosiologis dan psikologis. Variabel independen tersebut terdiri dari: umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan/pengeluaran, status perkawinan, status dalam rumah tangga, tingkat pendidikan, keterlibatan dalam adat, sosialisasi politik dalam keluarga, kedekatan dengan partai, kedekatan dengan caleg, ketertarikan pada isu tertentu dan pola kepemimpinan Kesultanan Ternate. Berikut definisi operasional variabel independen:

Umur adalah usia pemilih pada saat mereka mengikuti pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009.

Jenis Kelamin adalah kelompok responden berdasarkan pada klasifikasi laki-laki dan perempuan.

Jenis Pekerjaan adalah profesi dalam upaya memperoleh nafkah untuk bertahan hidup.

Pendapatan/pengeluaran adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam setiap bulan.

Universitas Indonesia

Status Perkawinan adalah keadaan seseorang yang dikategorikan menikah, belum menikah, duda dan janda.

Status Dalam Rumah Tangga adalah status seseorang dalam keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak kandung, Anak *Piarah*, dan kerabat dekat.

Tingkat Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah di tempuh oleh pemilih.

Keterlibatan dalam Adat adalah kerlibatan atau pengetahuan pemilih akan adat Ternate yang terdiri dari keterlibatan dalam marga, stratifikasi sosial adat, struktur pemerintahan adat dan tingkat pengetahuan terhadap falsafah adat.

Sosialisasi Politik dalam Keluarga adalah pengaruh keluarga dalam menentukan pilihan partai pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009.

Kedekatan dengan Partai adalah perasaan atau kedekatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

Kedekatan dengan Caleg adalah hubungan serta perasaan terhadap caleg partai tertentu.

Keterarikan pada Isu adalah kecenderungan pemilih terhadap pemasalahan tertentu yang diangkat oleh partai pada saat kampanye.

Kepemimpinan Sultan dan Boki adalah pengaruh perilaku politik Sultan dari partai PDK ke Caleg DPD dan Boki dari DPD ke caleg Demokrat terhadap perilaku memilih masyarakat adat Ternate.

Tabel 1.6
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen		
Perilaku Memilih Masyarakat Adat Pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009	Partai pilihan pada pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009	Nominal
Variabel Independent		
1. Umur		Ordinal
2. Jenis Kelamin	Laki-laki, perempuan	Nominal
3. Kelurahan	Akehuda, Dufa-Dufa, Soa-Sio, Sangaji, Makasar Timur, dan salahuddin	Nominal
4. Pendapatan/Pengeluaran		Interval
5. Status Pernikahan	Kawin, Belum Kawin, Duda dan Janda	Nominal
6. Tingkat Pendidikan	SD, SMP, SMA, Akademi dan PT	Ordinal
7. Keterlibatan dalam adat	-Terasuk Dalam Kelompok marga -Ada Hubungan dengan komunitas awal Ternate - Terlibat dalam struktur pemerintahan adat - Mengetahui falsafah adat - Mengetahui Ritual Adat	Nominal Nominal Nominal Nominal
8. Sosialisasi Politik Dalam Keluarga	- Pembicaraan masalah politik - Pengaruh keluarga dalam memilih partai	Nominal Nominal
9. Kedekatan Dengan Partai	Tingkat hubungan dengan partai	Nominal
10. Kedekatan Dengan Caleg	Tingkat Hubungan dengan Caleg	Nominal
11. Ketertarikan Pada Isu	Permasalahan yang dihadapi	Nominal
12. Kepemimpinan Sultan dan Boki	- Pengaruh perilaku politik Sultan - Pengaruh perilaku politik Boki	Nominal Nominal

1.9 Metode Penelitian, Populasi dan Sampel

1.9.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh data-data kualitatif dari studi dokumen yang terkait dan wawancara dengan Dewan Pakar Kesultanan Ternate. Penulis melakukan survei lapangan terkait dengan perilaku pemilih masyarakat adat Ternate dalam pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009. Survei lapangan yang dilakukan merupakan survei pasca pemilihan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat Ternate.

1.9.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan menggunakan hasil survei lapangan melalui kuesioner terhadap perilaku pemilih masyarakat adat yang secara administratif pemerintahan berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara dan sebagian Ternate Tengah. Karena populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Ternate yang memiliki hak pilih pada pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009, maka jumlah populasi dari kedua kecamatan tersebut dihitung berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kedua kecamatan, dimana Kecamatan Ternate Utara 34.792 jiwa dan Ternate Tengah 42.683 jiwa, sehingga total populasi adalah 77.412 jiwa.

Dengan diketahuinya jumlah populasi dari kedua kecamatan tersebut, dan karakteristik populasi yang cenderung homogen, maka teknik sampling yang digunakan adalah teknik Sampling Taro Yamane⁴⁴, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} \\
 &= \frac{77.412}{(77.412)(0,01)+1} \\
 &= \frac{77.412}{774,12 + 1} \\
 &= \frac{77.412}{775,12}
 \end{aligned}$$

⁴⁴ Ridwan dan Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisa Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 253-254.

$$= 99,87 \approx 100$$

Karena menggunakan teknik penarikan sampel dari Taro Yamane maka ditemukan 100 sampel yang merupakan hasil pembulatan dari 99,87, dengan presisi 10%. Kemudian dari 100 sampel yang ada ditambahkan 20 sampel kemudian dialokasikan secara *purposive* kedalam enam kelurahan yang tersebar di Kecamatan Ternate Utara dan Tengah. Distribusi sampel sebagai berikut:

Tabel 1.7

Distribusi Sampel di Tiap Kelurahan yang Terpilih

Kecamatan	Kelurahan Terpilih	Jumlah Sampel
Ternate Utara	Dufa-Dufa	20
	Akehuda	20
	Soa-Sio	20
	Sangaji	20
Ternate Tengah	Salahudin	20
	Makasar Timur	20
Total	6 kelurahan	120

1.9.3 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, untuk data kuantitatif melalui kuesioner maka akan diolah dengan menggunakan program SPSS (*statistic package for social sciences*). Model analisa statistik yang digunakan yaitu analisa tabel frekuensi (univariat), uji *Chi-square* (bivariat) dan uji regresi (multivariat).

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul; **Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate Dalam Pemilihan Legislatif Kota Ternate Tahun 2009**, terdiri dari lima Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, model analisis, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Kesultanan dan masyarakat adat Ternate, berisikan sejarah Kesultanan Ternate dan masyarakat adat, stratifikasi sosial dalam masyarakat adat Ternate (struktur dan kultur masyarakat adat), serta masyarakat adat dan dinamika politik lokal.

Bab 3. Perilaku memilih masyarakat pada pemilu legislatif Kota Ternate Tahun 2009, Bab ini akan membahas tentang kecenderungan memilih partai, alasan dalam memilih caleg dan partai, dan konsistensi pemilih antara pemilu 2004 dan 2009.

Bab 4. Faktor-faktor mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat, akan membahas faktor sosiologis dan psikologi. Faktor sosiologis terdiri dari status sosial ekonomi dan demografi pemilih, keterlibatan dalam adat, sosialisasi politik dalam keluarga. Faktor psikologis masyarakat adat Ternate, yang terdiri dari empat sub bab yaitu pengaruh kedekatan dengan partai, pengaruh ketertarikan pemilih pada isu dalam kampanye partai, kedekatan dengan caleg, dan perilaku politik Sultan dan Boki.

Bab 5. Penutup, dalam Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan implikasi teoritis dan rekomendasi.

BAB 2

MASYARAKAT ADAT DAN KESULTANAN TERNATE

Dalam Bab ini, akan membahas empat pokok bahasan yaitu profil wilayah Kota Ternate yang terdiri dari kondisi geografis, pemerintahan, penduduk, perekonomian dan kondisi pendidikan; sejarah Kesultanan Ternate yang terdiri dari zaman mitos sampai masuknya Islam dan colonial; selanjutnya akan membahas makna adat dan stratifikasi sosial Kesultanan Ternate dengan sub bahasan yaitu penjelasan makna adat dan stratifikasi sosial serta stuktur pemerintahan dalam Kesultanan Ternate. Sedangkan pokok bahasan yang terakhir akan membahas tentang masyarakat adat dan dinamika politik lokal yang terdiri dari keterlibatan Sultan dan Boki dalam politik dan dinamika politik dalam masyarakat adat.

2.1 Profil Kota Ternate

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Ternate merupakan kota kepulauan, yang terletak diantara 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Karena wilayahnya dikelilingi oleh laut maka Kota Ternate dikenal dengan kota kepulauan, dengan luas daratan sebesar $250,85 \text{ km}^2$ dan lautan sebesar $5.547,55 \text{ km}^2$. Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah pulau, yang berbatasan dengan Laut Maluku di bagian Utara, Selatan dan Barat, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Selat Halmahera. Dari delapan pulau yang berada dalam wilayah Kota Ternate, lima diantaranya berpenduduk atau berpenghuni, sedangkan tiga yang lainnya tidak dihuni dan berukuran relatif kecil.⁴⁵

⁴⁵ Sumber BPS Kota Ternate “Ternate Dalam Angka Tahun 2009”, hal. 25.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Pulau-Pulau di Ternate

No	Nama Pulau	Luas (Km ²)	Status
1	Ternate	111,80	Berpenghuni
2	Hiri	12,4	Berpenghuni
3	Moti	24,60	Berpenghuni
4	Mayau	78,40	Berpenghuni
5	Tifure	22,10	Berpenghuni
6	Maka	0,50	Tidak Dihuni
7	Mano	0,50	Tidak Dihuni
8	Gurida	0,55	Tidak Dihuni

Sumber : BPS Kota Ternate “Ternate dalam Angka Tahun 2009”

Kota Ternate dan kabupaten di Maluku Utara beriklim tropis, dengan dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung dari bulan April hingga Oktober dan musim penghujan berlangsung pada pada bulan November hingga Maret. Rata-rata temperatur berkisar antara 23,4⁰C – 31,1⁰C, dengan tingkat kelembaban nisbi rata-rata 83,92%, tingkat penyinaran matahari rata-rata 51,92% dan kecepatan angin rata-rata 3,58 km/jam dengan kecepatan maksimum 19,75 km/jam.⁴⁶

2.1.2 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1999 tentang peningkatan status Kota Administratif menjadi Kotamadya, pada 27 April 1999 Ternate resmi menjadi Kotamadya (terdiri dari tiga kecamatan dan 58 desa/kelurahan) yang sebelumnya adalah merupakan Kota Administratif, perubahan tersebut dikarenakan adanya semangat untuk otonomi daerah yang didukung dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik dan ekonomi.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 4-5

Dengan mempertimbangkan rentang kendali seiring dengan pertumbuhan penduduk dan potensi wilayah, maka pemerintah kota kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No.10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Moti sebagai kecamatan keempat di Kota Ternate. Peningkatan status Kecamatan Moti yang dulunya sebagai bagian dari Kecamatan Pulau Ternate menjadi kecamatan tersendiri, berpengaruh pada penambahan dua desa sebagai hasil pemekaran sehingga total desa menjadi enam desa.

Kota Ternate yang tadinya terdiri dari empat kecamatan dan 63 desa/kelurahan, bertambah menjadi enam kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 74 desa. Kemudian melalui PERDA No.8 Tahun 2009, kembali melakukan pemekaran dengan membentuk Kecamatan Hiri yang sebelumnya adalah bagian dari Kecamatan Pulau Ternate. Untuk lebih lengkap mengenai informasi menyangkut nama kecamatan dan jumlah kelurahan/ desa di Kota Ternate seperti diuraikan berikut ini⁴⁷ (Tabel 2.2).

Tabel 2.2

Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1	Pulau Ternate	13	Jambula
2	M o t i	6	Moti Kota
3	Pulau Batang Dua	5	Mayau
4	Ternate Selatan	17	Kalumata
5	Ternate Tengah	15	Salahuddin
6	Ternate Utara	14	Dufa-Dufa
7	Pulau Hiri	6	Faudu
J u m l a h		76	

Sumber : BPS Kota Ternate "Ternate dalam Angka Tahun 2009 dan 2010"

2.1.3 Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2008), jumlah penduduk Kota Ternate adalah 182.109 jiwa, yang tersebar di enam kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Ternate Selatan yaitu 33,96% dari total penduduk Kota Ternate atau 61.785 jiwa. Jumlah

⁴⁷ *Ibid.*, hal.26 dan BPS Kota Ternate, *Ternate Dalam Angka Tahun 2010*, hal.26.

penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua hanya 1,59% atau sebanyak 2.896 jiwa (Tabel 2.3)

Tabel 2.3

Distribusi Penduduk per Kecamatan Tahun 2009

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Pulau Ternate	16.376 jiwa	8,99
2	M o t i	4.681 jiwa	2,57
3	Pulau Batang Dua	2.896 jiwa	1,59
4	Ternate Selatan	61.785 jiwa	33,93
5	Ternate Tengah	53.997 jiwa	29,65
6	Ternate Utara	42.374 jiwa	23,27
J u m l a h		182.109 Jiwa	

Sumber : BPS Kota Ternate "Ternate dalam Angka Tahun 2009"

Dari data distribusi penduduk, maka dapat disimpulkan, bahwa penduduk Kota Ternate penyebarannya tidak merata. Konsentrasi penduduk terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Selatan, Tengah dan Utara. Kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena ketiga kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian Kota Ternate dan bahkan Makuku Utara.

Setiap tahun penduduk Kota Ternate mengalami peningkatan jumlah penduduk diakibatkan oleh faktor kelahiran dan migrasi. Faktor migrasi biasanya dari lokal dalam lingkup Maluku Utara ataupun dari luar, seperti Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data BPS Kota Ternate tahun 2009⁴⁸, tingkat kepadatan penduduk sudah mencapai 725 jiwa per km², angka ini diperoleh dari hasil pembagian total luas wilayah yaitu 250.85 km², dengan 182.09 jiwa total jumlah penduduk. Sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, posisi pertama di Kecamatan Ternate Selatan dengan tingkat kepadatan 3.178 jiwa per km², disusul Kecamatan Ternate Utara, Tengah, Pulau Ternate, Moti dan Batang Dua, masing- masing, 2.992 Jiwa/ km², 2.915 jiwa/km², 225 jiwa/km², 190 jiwa/km², dan 28 km².

2.1.4 Kondisi Perekonomian

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 42

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah, yaitu dengan melihat tingkat Produk Regional Domestik Bruto (PRDB) wilayah. PRDB suatu wilayah diperoleh dari tingkat perekonomian dan pendapatan perkapita. Berdasarkan data BPS Kota Ternate tahun 2008, PRDB Kota Ternate mengalami peningkatan sebesar 18,65% dari tahun sebelumnya, dengan indikator turunan yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,92%.

Terdapat empat sektor andalan yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate. Sektor yang pertama dan memberi kontribusi paling tinggi yaitu sektor perdagangan sebesar 28,68% terhadap PRDB. Kedua yaitu sektor jasa sebesar 17,45%, kemudian disusul sektor transportasi dan komunikasi pada urutan ketiga dan sektor pertanian pada posisi keempat, yang masing-masing 16,48% dan 15,58% terhadap PRDB Kota Ternate.

2.1.5 Kondisi Pendidikan

Kota Ternate sebelum tahun 2009, pernah sebagai pusat aktivitas Pemerintahan Propinsi Maluku Utara, dalam hal pendidikan relatif memadai karena hampir semua sarana untuk jenjang pendidikan dapat ditemui di Ternate, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Untuk jenjang perguruan tinggi di tahun 2010, beberapa universitas telah menyelenggarakan program magister diberbagai bidang, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang melalui jalur kerja sama dengan berbagai universitas ternama di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, jumlah sarana pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD) di tahun 2009 yang berstatus negeri maupun swasta sebanyak 102 buah dengan peserta didik 19.389 siswa. Sementara untuk jenjang SLTP dan SLTA jumlah sekolah baik negeri maupun swasta, masing-masing 29 buah dan 17 buah. Sedangkan untuk jumlah tenaga pengajar untuk SLTP sebanyak 764 guru, dengan jumlah siswa 8.611 siswa. Untuk jenjang SLTA dengan 17 sekolah, jumlah guru dan siswa masing-masing 560 guru dan 6.337 siswa.⁴⁹

Kota Ternate secara geografis terhitung kecil, jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara, karena luas daratannya

⁴⁹ Lihat Data BPS "Ternate dalam Angka tahun 2010," hal. 61.

hanya 250,85 km². Meski secara geografis Ternate sebagai kota kecil, akan tetapi Ternate selalu menjadi kota tujuan untuk mereka yang akan melanjutkan pendidikan tinggi. Sarana pendidikan tinggi di Kota Ternate terhitung memadai, karena terdapat enam perguruan tinggi, tiga diantaranya berstatus Negeri yaitu Universitas Khairun (Unhair), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Politeknik Kesehatan (Poltekes Depkes), sedangkan selebihnya berstatus swasta diantaranya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Akademik Ilmu Komputer (AIKOM), dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Kie Raha.

Dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta jumlah siswa yang menempuh pendidikan menengah umum dan kejuruan di Kota Ternate dan perguruan tinggi, maka besar harapan masyarakat di Kota Ternate untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik, termasuk di dalamnya adalah partisipasi dalam pemilu. Tingkat partisipasi politik selalu dijadikan indikator demokrasi, sementara tingkat pendidikan selalu berhubungan dengan partisipasi seseorang. Sehingga Saiful Mujani menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan demokrasi bahwa:

Education is believed to be a crucial socio-economic component to explain democratic satisfaction and support for democratic values. Education has a significant relationship with democracy because it is a social institution in which a citizen is socialized to democratic values such as freedom, equality, and tolerance.⁵⁰

2.2 Sejarah Kesultanan dan Masyarakat Adat Ternate

Ternate adalah nama yang telah dikenal sejak dulu, bahkan dalam sejarah nusantara. Ternate selain sebagai kerajaan Islam juga dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, seperti cengkeh dan pala. Potensi ini kemudian mengundang ketertarikan bangsa-bangsa Eropa dalam hal ini Belanda dan Portugis untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate, bukti empiris atas

⁵⁰ Baca Desertasi Saiful Mujani "Religious Democrats: Democratic Culture And Muslim Political Participation In Post-Suharto Indonesia," The Ohio State University 2003, hal. 247.

keberadaan mereka dapat dilihat dari benteng-benteng peninggalan mereka di Ternate.

Dalam sejarah nusantara, Ternate dikenal sebagai kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang Sultan secara turun-temurun. Dengan adanya integrasi nasional sebagai konsekuensi dari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka Kesultanan melebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan struktur pemerintahan di Ternate disesuaikan dengan NKRI. Namun Kesultanan Ternate secara resmi atau dalam bentuk pernyataan tertulis tidak pernah menyatakan secara tegas bergabung dengan NKRI, seperti yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta di awal kemerdekaan. Berdasarkan Amanat Sultan Hamengkobuwono IX (HB) dan Paku Alam VIII (PA) yang ditujukan pada Presiden Soekarno pada tanggal 5 September 1945, yang intinya menyatakan kesiapan untuk tunduk pada NKRI.⁵¹

Nama Ternate merupakan gabungan dari tiga suku kata yaitu *tara no ate* yang artinya “turun kebawah untuk menarik simpatik.”⁵² Makna dari “turun kebawah” yaitu orang-orang yang berada di puncak gunung turun ke pesisir dalam rangka menjalin hubungan dengan para pedagang dan pendatang dari luar untuk tinggal menetap di Ternate. Berdasarkan tulisan Adnan Amal,⁵³ asal-usul penduduk awal yang tinggal di Ternate adalah eksodus dari Halmahera sekitar tahun 1250. Eksodus tersebut yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Jailolo meninggalkan kerajaan tersebut karena konflik politik yang berkepanjangan. Mereka yang meninggalkan Jailolo, sebagian mendirikan pemukiman di puncak Gamalama (Ternate) dan selebihnya tersebar ke Tidore, Moti dan Makian.

Dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan sejarah Ternate, baik yang ditulis oleh ilmuwan luar maupun oleh orang Ternate (Maluku Utara) diantaranya Adnan Amal, Rinto Taib dan Amas Dinsie, membahas sejarah dari dua sudut pandang yaitu sejarah Ternate dalam zaman mitos dan Ternate masa Islam. Zaman mitos adalah cerita sejarah Ternate bersumber dari cerita rakyat

⁵¹ Lihat Prolog Sultan Ternate, Drs. H. Mudaffar Syah Bc.HK “ Sejarah Penggabungan Kesultanan Ternate Kedalam NKRI dan Potensi Keraton Dalam penggabungan Kebudayaan Bangsa yang Berbineka Tunggal Ika” dalam Rinto Taib, *op.cit.*, hal. V.

⁵² Baca Rusli Andi Atjo dalam Rinto Taib, *op.cit.*, hal. 34.

⁵³ Adnan Amal, *Op.cit.*, hal. 53.

yang bersifat metafisik dan tidak diketahui siapa yang menjadi sumber awal dari cerita tersebut. Sedangkan pada zaman Islam, bercerita tentang kejayaan Kesultanan Ternate dalam melakukan aneksasi terhadap wilayah di luar Ternate, selain itu sejarah zaman Islam juga bercerita tentang dinamika hubungan para Sultan Ternate dengan kolonial.

2.2.1 Zaman Mitos

Cerita rakyat yang diwarisi secara turun-temurun, menuturkan bahwa sejarah awal Ternate dimulai dari seorang yang bernama Jafar Sadik (Jafar Noh) yang membangun pemukiman di bukit yang bernama *Jore-Jore*, dan di kaki bukit tersebut terdapat danau kecil yang dikenal dengan *Ake Santosa*.⁵⁴ Kemudian, ketika Jafar Sadik hendak mandi di *ake santosa*, terlihat tujuh bidadari sedang mandi di sana, kemudian Jafar mengambil sayap dari salah satu bidadari tersebut. Akibat dari perbuatannya, maka salah satu bidadari tidak dapat kembali terbang ke kayangan, dan memutuskan tinggal di bumi, serta menjalin hubungan pernikahan dengan Jafar Sadik.

Hasil dari pernikahan antara Jafar Sadik dengan bidadari yang bernama Nur Sifa, melahirkan tiga keturunan yang menjadi cikal bakal penduduk Ternate, mereka adalah *Buka* (anak pertama), *Darajat* (anak kedua) dan *Sahajat* (anak ketiga). Pada suatu ketika, Jafar Sadik berada diluar rumah, dan meninggalkan istri beserta ketiga anaknya dirumah, istrinya Nur Sifa yang sedang memandikan anaknya (*sahajat*) tiba-tiba melihat pantulan bayangan sayapnya, yang disembunyikan oleh Jafar Sadik diatas langit rumah. Ia kemudian langsung mengambilnya dan kembali ke asalnya meninggalkan suami dan ketiga anaknya.

Setibanya dirumah, Jafar Sadik mengetahui akan kejadian tersebut, perasaan kehilangan membuat Jafar bersedih, hingga suatu ketika, kesedihannya ditanggapi oleh seekor burung *Guheba* (elang laut, sering juga disamakan dengan burung Garuda). Dengan empati atas kesedihan yang dialami oleh Jafar Sadik atas kepergian istrinya, maka *si guheba* menawarkan jasa untuk mengantarkan menemui istrinya di kayangan. Sesampainya di keyangan, Jafar Sadek langsung

⁵⁴ Lihat Tulisan Naidah” Sejarah Ternate” dalam Adnan Amal, *Ibid.*, hal.16.

menemui penguasa kayangan dan mempertanyakan keberadaan istrinya. Kemudian penguasa kayangan menghadirkan ketujuh bidadari tersebut, namun ketujuhannya memiliki postur tubuh, dan wajah yang secara lahiriah mirip, penguasa kayangan meminta kepada Jafar Sadik menunjuk istrinya dengan persyaratan, kalau ia benar maka ia dapat membawa istrinya pulang ke bumi, sedangkan jika salah memilih ia akan dibunuh. Dalam keadaan bimbang, datanglah seekor lalat yang menawarkan bantuan kepada Jafar Sadik, dengan kesepakatan keduanya, Jafar Sadik berhasil menunjuk istrinya dengan benar.

Sebelum kembali ke bumi, Jafar Sadik dan Nur Sifa sempat dikaruniai seorang anak (putra) di kayangan yang diberi nama Mashur Malamo. Setelah Mashur Malamo berumur setahun, mereka akhirnya kembali ke bumi menemui ketiga anaknya. Keempat anak yang dimiliki Jafar Sadik, merupakan cikal bakal penguasa keempat kerajaan di Maluku Utara (Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan). Setelah semua anaknya dewasa, mereka masing-masing diberi wilayah kekuasaan, anak pertama yang bernama Buka pergi ke Makian yang merupakan cikal-bakal Kerajaan Bacan. Anak kedua bernama, Darajat berangkat ke Moti yang merupakan cikal-bakal Kerajaan Jailolo. Anak ke tiga, Sahajat berangkat ke Tidore. Sedangkan anak keempat, Mashur Malamo tetap di Ternate (Gapi) yang merupakan cikal-bakal Kerajaan Ternate.

2.2.2 Zaman Islam dan Kolonial

Sebelum berbentuk kerajaan atau kesultanan, Ternate hanya merupakan komunitas masyarakat yang merupakan eksodus karena konflik politik di Kerajaan Jailolo pada tahun 1250.⁵⁵ Dalam literatur sejarah Ternate terdapat tiga komunitas yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Ternate yaitu pertama, komunitas *Tobona* yang dipimpin oleh seorang *momole* yang bernama *Guna*; kedua, komunitas yang bertempat di *Foramadiahi* yang di pimpin oleh *Mole Matiti*. Ketiga, yaitu pemukiman *Sampala* yang berada dalam otoritas *Momole Ciko*, ketiga komunitas ini (ada juga yang menyebut empat komunitas), kemudian

⁵⁵ *Ibi.*, hal. 53.

bermusyawarah dan memilih salah satu diantara mereka menjadi pemimpin.⁵⁶ Hasil dari musyawarah ketiga komunitas tersebut akhirnya mengangkat *Momole Ciko*, sebagai pemimpin diantara mereka dan mengganti *Momole Ciko* menjadi *Kolano* (berarti raja) dengan nama baru *Mashur Malamo*.

Mashur Malamo adalah *kolano* Ternate pertama yang berkuasa dari tahun 1257-1272, kemudian diikuti Kaicil Yamin (1272-1284), Kaicil Kamalu, Kaicil Bakuku (1298-1304) (Tabel 2.4).⁵⁷ Ternate adalah kerajaan terbesar di Maluku Utara, dan melakukan politik ekspansionis hingga ke Indoensia Timur, seperti di Pulau Buru, Boton dan Mindanao. Menurut Amal, *kolano* pertama yang memprakarsai politik ekspansionis kerajaan Ternate adalah Kolano Ngara Malamo (1304-1317) dengan melakukan penaklukan pada daerah wilayah kekuasaan Kerajaan Jailolo. Dalam melakukan politik ekspansionisnya, Ngara Malamo menggunakan empat kelompok klan yang disebut sebagai *Fala Raha* yaitu klan Tomaito, Tomagola, Limatahu dan Marsaoli.⁵⁸

Pada masa Kolano Sida Arif Malamo (1322-1331), Kerajaan Ternate selain melakukan politik ekspansionis juga menjalin hubungan perdagangan dengan dunia luar serta menjadi bandar perdagangan utama di Maluku. Jalur perdagangan yang ada, membuka peluang para pedagang mancanegara (Cina, Arab dan Gujarat) maupun pedagang di Nusantara (Malaka, Makassar dan Jawa) untuk membeli rempah-rempah di Ternate.

Salah satu dampak dari hubungan diplomatik dalam hal perdagangan Ternate dengan dunia luar, yaitu masuknya Islam dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan serta mengganti nama “Kolano” sebagai penguasa tertinggi di Ternate menjadi “Sultan”. Zainal Abidin (1486-1500) adalah Sultan Ternate pertama yang melakukan islamisasi, baik secara keyakinan maupun struktur dan kultur kerajaan misalnya pembentukan lembaga kesultanan yaitu *Bobato Dunia* dan *Bobato Akhirat* (beserta Imam, qahdi, khatib dan Moding). Zainal Abidin, mendapat ajaran Islam dari Datu Maulana Husein pedagang sekaligus penyebar

⁵⁶ Pertama, Tubo di puncak Gunung Gamalama. kedua, Tobona didataran tinggi Faramadiyah. Ketiga, Tabanga mendiami daerah hutan dan Keempat, Tobelevu yang mendiami daerah pesisir pantai, Baca Amas Dinsie dan Rito Taib, *op.cit.*, hal. 1.

⁵⁷ Lihat Lampiran 1, Adnan Amal, *op.cit.*, hal. 519.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 55.

agama Islam dari Minangkabau, kemudian pada tahun 1495 belajar Islam pada Sunan Giri di Gresik.⁵⁹

Setelah Zainal Abindin wafat, yang kemudian digantikan oleh Sultan Bayan Sirullah atau juga dikenal dengan sebutan *Boleif* (1500-1522). Hal yang menonjol dalam kepemimpinan Bayan Sirullah yaitu pertama, islamisasi adalah tatanan kehidupan dengan mengatur urusan mulai dari pembatasan poligami, tata pergaulan, cara berpakaian, hingga aturan bahwa seorang bobato harus beragama Islam. Hal Kedua yang sangat terlihat dari Sultan Bayan adalah beliau dikenal dengan pedagang yang ulung, meski pada masa kekuasaannya sebagai titik awal politik monopoli perdagangan rempah-rempah antara Ternate dengan Portugis.

Karena kedekatannya dengan praktek monopoli Portugis, maka Sultan Bayan diduga diracuni oleh rakyatnya sendiri hingga wafat pada tahun 1522. Sepeninggal Bayan, Kesultanan Ternate mengalami konflik internal perebutan tahta. Setahun pasca Sultan Delayo, terjadi kudeta oleh Taruwise dengan bantuan Portugis. Setelah Taruwise wafat, kemudian dilantiklah Boheya sebagai Sultan kemudian digantikan oleh Tabariji. Pada fase tahun 1522-1535 hingga pelantikan Sultan Khairun, instabilitas di kesultanan terjadi akibat perebutan kekuasaan dan intervensi pihak ketiga yaitu Portugis untuk memasukkan kepentingan mereka pada setiap peralihan kekuasaan.

Sultan Khairun menghadiri undangan dari pihak Portugis untuk merayakan kesepakatan damai diantara mereka, ternyata berujung pada rencana pembunuhan Khairun secara teragis di Benteng Gamlamo. Setelah Khairun wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Babullah yang juga merupakan putra Sultan Khairun. Sikap Babullah sangat anti dengan Portugis, sehingga dalam pidato penobatannya sebagai Sultan, ia berjanji untuk membalas atas kematian ayahnya dan berjanji kepada rakyat untuk mengusir Portugis dari negerinya.

Sultan Babullah dikenal sebagai Sultan Ternate yang terbesar, karena pada masa kepemimpinannya Babullah berhasil menaklukkan negeri-negeri sepanjang pantai Timur Sulawesi, yaitu Banggai, Tobungku, dan Tiboro. Selain itu Babullah menganeksasi kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara dan Selayar yang berada

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 63.

dibawah Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Prestasi Babullah yang lain dan menjadi catatan dalam sejarah nusantara, yaitu keberhasilan Babullah bersama pasukannya mengusir Portugis dari wilayah empat kesultanan di Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.⁶⁰ Atas prestasi tersebut, maka Babullah dianggap sebagai Sultan Ternate yang termasyur, sehingga pasca kemerdekaan Kesultanan dan elemen masyarakat mengusulkan Sultan Babullah dianugerahi sebagai pahlawan nasional.

Pasca kekuasaan Sultan Babullah (1570-1583), Kesultanan Ternate mulai mengalami konflik internal misalnya antara Sultan Saidi dengan Pangeran Tolo yang mendapat bantuan Spanyol. Selain konflik internal antara elit kesultanan, krisis legitimasi juga terjadi pasca Babullah misalnya penolakan penobatan Kaicil Hamzah sebagai Sultan yang merupakan pewaris tahta pasca wafatnya Sultan Mudaffar. sehingga dapat disimpulkan pasca kekuasaan Babullah yaitu pertama, Kesultanan Ternate tidak lagi melakukan perlawanan yang seperti Babullah terhadap penjajah, yang terjadi justru hubungan kerjasama. Kedua, karena menghadapi permasalahan internal, sehingga tidak efektif dalam melakukan pengurusan atas wilayah yang dianeksasi pada pada masa Babullah, maka beberapa wilayah Kesultanan bergejolak dan berusaha melepaskan diri dari Ternate, berikut nama-nama Sultan atau Kolano Ternate dan periode kepemimpinannya (Tabel 2.4).

⁶⁰ Adnan Amal, *Op.cit.*, hal. 85.

Tabel 2.4
Nama-Nama Sultan (Kolano) dan Periode Kepemimpinan

Para Kolano Sebelum Masuknya Islam					
No	Nama Sultan/ Kolano	Tahun Berkuasa	Gelar/Sebutan		
1	Ciko (baca Siko)	1257-1277	Mashur Malamo		
2	Poit	1277-1284	Kaicil Yamin		
3	Siale	1284-1298	Kaicil Kamalu		
4	Kalabatta	1298-1304	Kaicil Bakuku		
5	Komala	1304-1317	Ngara Malamo		
6	Patsyaranga Malamo	1317-1322			
7	Sida Arif Malamo	1322-1331			
8	Paji Malamo	1331-1332			
9	Sah Alam	1332-1343			
10	Tulu Malamo	1343-1347			
11	Boheyat	1347-1350	Kaicil Kei Mabiji		
12	Ngolo Macahaya	1350-1357			
13	Momole	1357-1359			
14	Gapi Malamo	1359-1372			
15	Gapi Baguna I	1372-1377			
16	Kumala Putu	1377-1432			
17	Gapi Baguna II	1432-1405			
Sultan/Kolano Setelah Masuknya Islam					
No	Nama Kolano/Sultan	Tahun Berkuasa	No	Nama Kolano/Sultan	Tahun Berkuasa
18	Marhum	1466-1486	34	Kaicil Raja Laut	1692-1714
19	Zainal Abidin	1486-1500	35	Oudhoorn	1714-1751
20	Bayan Sirullah (Boleif)	1500-1522	36	Sahmardan	1751-1754
21	Deyalo*	1522-1529	37	Arunсах	1754-1777
22	Boheyat	1529-1532	38	Sarka/Sarkan	1777-1796
23	Tabariji	1532-1535	39	Muhammad Yasin	1796-1801
24	Kharun Jamil	1535-1570	40	Sarmole Van Der Parra	1801-1807
25	Babullah Datu Syah	1570-1583	41	Muhammad Zain	1807-1823
26	Saidi/Sahid/Saifuddin	1583-1606	42	Muhammad Arsyat	1823-1861
27	Hidayat	1606-1610	43	Ayanhar	1861-1876
28	Mudaffar	1610-1627	44	Haji Muhammad Ilham	1876-1900
29	Hamzah	1627-1648	45	Haji Muhammad Usman	1900-1902
30	Mandar Syah	1648-1672	46	Muhammad Usman	1902-1914
31	Sibori Amsterdam	1672-1690	47	Iskandar Muhammad Jabir	1914-1927
32	Dijalankan bobato	1690-1692		Syah	1927-1975
33	Kaicil Toloko		48	Mudaffar Syah	1975- Sekarang

Sumber : Telah diolah kembali dari data Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah; *Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950* (Makassar : Gelora Pustaka Indonesia, 2007) hal 519-520

2.3 Makna Adat dan Stratifikasi Sosial Kesultanan Ternate

2.3.1 Makna Adat

Masyarakat adat atau *orang adat*, adalah istilah yang digunakan oleh penduduk di Kota Ternate untuk mendefinisikan kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan secara adat-istiadat maupun struktur kekuasaan dengan Kesultanan Ternate. Masyarakat adat merupakan mereka yang secara turun-temurun bertempat tinggal di Ternate, dan secara geografis pada umumnya bertempat tinggal di bagian utara Kota ternate. Namun dalam sejarah awal, masyarakat adat atau asli Ternate, komposisi geografis tidak seperti sekarang yang sebagian besar berada di bagian utara Kesultanan Ternate, akan tetapi tersebar mulai dari selatan dan hingga ke utara. Dengan perubahan waktu dan makin bertambahnya para pendatang ke Ternate, seperti etnis bugis-makassar, etnis jawa, pendatang dari Sumatra Barat dan bahkan etnis mancanegara seperti Cina dan Arab yang menempati bagian selatan kesultanan, sehingga hal ini menggeser komposisi wilayah awal pemukiman masyarakat asli Ternate, yang pada saat ini didominasi oleh pendatang di luar masyarakat asli Terante.

Adat dapat bermakna “kebiasaan” atau “tradisi”, selain itu adat juga diartikan sebagai “tata tertib”.⁶¹ Dalam konteks adat di Kesultanan Ternate, Sultan Mudaffar Syah⁶² berpandangan bahwa “adat tidak lain adalah tata aturan dalam pergaulan hidup” yang memiliki fungsi sebagai ”aturan hukum” dan “pergaulan hidup”. Adat sebagai aturan hukum dan pergaulan hidup, yang bertujuan untuk kebaikan bersama, memiliki landasan filosofis yang berbeda untuk setiap perumusan aturan hukum adat masing-masing. Adat dalam konteks Ternate yang melahirkan aturan hukum, bersumber dari landasan filosofis *Jou Se Ngofangare*.

Jou Se Ngofangare bermakna hubungan antara penguasa dan rakyat, konsep ini diturunkan dari konsep hubungan antara “Tuhan” sebagai sang “penciptan” dan hamba yang “dicipta”. Sehingga Mudaffar Syah menerjemahkan

⁶¹ David Henley dan Jamei Davison, *op.cit.*, hal.1.

⁶² Baca kata pengantar “Memahami Maluku Utara” dalam Amas Dinsie dan Rito Taib, *op.cit.*, hal. xiii.

“*Jou Se Ngofangare*” berarti “Engkau” (penguasa) dan “Aku” (rakyat) dan selanjutnya secara mendalam diartikan “*apa yang ada pada engkau ada pada aku dan sebaliknya apa yang ada padaku ada juga pada engkau.*”⁶³ Sekilas dapat kita memberikan pemaknaan berdasarkan penafsiran Sultan Mudaffar Syah, bahwa adat dalam konteks masyarakat asli Ternate selain bermakna tata aturan pergaulan, juga bermakna hubungan asimetris antara penguasa dan rakyat karena bersumber dari filosofi hubungan penghambaan dalam wujud, *Jou Se Ngofangare*.

2.3.2. Stratifikasi Sosial Masyarakat Adat Ternate

Setiap interaksi dalam masyarakat, pasti akan melibatkan dimensi politik, karena disana terdapat kekuasaan, dan pada setiap kekuasaan pasti memiliki hirarki-hirarki (stratifikasi), serta hubungan yang tidak seimbang antara individu-individu dan kelompok-kelompok.⁶⁴ Kesemua hal tersebut adalah fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, karena dalam setiap individu maupun masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan kemampuan tersebut, maka melahirkan kelas dan status sosial. Demikian halnya dengan masyarakat adat Ternate, hubungan yang tidak seimbang tersebut melahirkan kelas-kelas atau stratifikasi.

Stratifikasi dalam masyarakat adat Ternate lebih bersifat fungsional, meski terlihat ada kemiripan dengan masyarakat feodal pada umumnya, akan tetapi stratifikasi dengan adanya penggolongan *jou*, *dano*, *soangare* dan *bala* tidak setajam pada masyarakat feodal yang lain. Hal ini disebabkan karena interaksi mereka intens dalam lingkungan *kedaton* (Keraton), dan seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penggolongan yang ada lebih bersifat fungsional.

Golongan *Jou* adalah mereka yang berasal dari keturunan langsung kerajaan atau Sultan bersama keluarganya, biasanya dihitung sampai keturunan ketiga Sultan. Golongan kedua yaitu *Dano*, mereka yang berada dalam golongan ini adalah keluarga cucu Sultan dan anak-anak yang dilahirkan dari putri sultan

⁶³ *Ibid.*, hal. xiv.

⁶⁴ Baca “stratifikasi politik dan kekuasaan” dalam Georges Balandier, *Antropologi politik*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996, hal. 102. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya, *Political Antropology*.

dengan orang dari luar lingkungan istana atau masyarakat biasa, juga termasuk keturunan dari kakak maupun adik kandung Sultan. Golongan ketiga yaitu *soangare*, mereka yang berada dalam golongan ini adalah mereka yang secara turun-temurun berada dalam kekerabatan istana dan memiliki fungsi melayani Sultan. Sedangkan yang keempat adalah golongan *bala (rakyat biasa)* mereka yang tidak ada pertalian darah dengan kesultanan, golongan ini biasa juga di kenal dengan *bala kusu se kano kano* (rakyat biasa yang bertugas melayani).

Meski ada perbedaan golongan *jou*, *dano*, *soangare* dan *bala*, akan tetapi jabatan struktur dalam dewan adat yang dikenal dengan *bobato*, baik *bobato dunia* (urusan dunia) maupun *bobato akhirat* (urusan ahirah) masih bisa diisi oleh golongan *bala* (rakyat), misalnya kepala adat dan rumah tangga keraton biasanya diduduki oleh golongan rakyat.

Konteks kelas atau stratifikasi dalam masyarakat adat Ternate, tidak serumit dengan kelas yang dibayangkan oleh Lipset, karena tidak ada diferensiasi jenis pekerjaan yang beragam dan kompleks, kelas yang ada hanya sebatas, kelas sederhana yang terbentuk dalam masyarakat yang feodal. Yang harus dipahami dalam konteks kelas masyarakat adat Ternate adalah hampir tidak terjadi pertentangan antara kelas, karena yang ada patron dan klien dan saling mendukung, sepanjang patron tidak membuat tindakan asusila yang dapat menghilangkan kepercayaan klien. Oleh karena itu, analisis kelas dalam *voting behavior* masyarakat adat Ternate cenderung partron-klien antara *Jou, Dano, Soangare* dan *Bala*.

Yang menarik menurut penulis, hal terkait dengan kelas dalam perilaku pemilih masyarakat adat adalah faktor pendorong perilaku politik *Jou* (Sultan) dan *bala* (masyarakat awam) selalu seiring dalam peristiwa politik. Apakah perilaku dan keputusan *bala* dalam identifikasi partai dan memilih kandidat, bersifat model *rational choice*, atau justru alasan tradisonal.

Selain stratifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada pengelompokan berdasarkan klan (marga) yang menjadi ciri khas masyarakat adat Ternate. Wilayah kesultanan dibagi berdasarkan kelompok keluarga besar (klan). Kelompok klan tersebut dibagi kedalam empat kelompok kekerabatan yaitu: *soa*

sio, sangaji, heku dan cim. Kelompok pertama yaitu *Soa Sio* adalah komunitas yang berada dalam lingkungan atau pusat kesultanan, kelompok ini terdiri dari sembilan marga (soa) yaitu: *marsoaly, tomatio, tomagola, tomaid, dan fayahe* kelima marga ini dipimpin oleh *kimelaha*. Sedangkan *Fanyira*, memimpin empat marga yaitu *Jiko, Jawa, Tohengira dan Tabala*.

Kelompok klan yang kedua yaitu *Heku*, kelompok kekerabatan ini menempati wilayah utara kesultanan, dalam wilayah pemerintahan Kota Ternate saat ini, yaitu berada di Kecamatan Ternate Utara yang meliputi 14 kelurahan, dan sebagian di Kelurahan Ternate Pulau (kelurahan Salero-hingga keutara di Pulau Hiri). Ketiga, kelompok klan *Cim*, mereka menempati bagian selatan dari Kesultanan Ternate yaitu terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Tengah dan Ternate Selatan. Kelompok yang keempat yaitu *Sangaji*, kelompok klan ini berada di pusat kesultanan, mereka biasanya sebagai perwakilan atas daerah penaklukan Kesultanan Ternate.

Keempat kelompok marga yaitu *soa sio, sangaji, heku dan cim* masing-masing memiliki anak soa sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kelompok Marga/Klan dan sub Klan (Soa)

Kelompok Kekerabatan (klan)	Nama Pemimpin	Pecahan Marga	
Soa Sio	Kiemalaha	Marsaoli Tomatio Tomagola	Tomadidi Payahe
	Fanyira	Jiko Jawa	Tolengara Tobala
Sangaji	Sangaji	Tomajiko Malayu Limatahu Kulaba Malayu cim	Tobeleu Tafamutu Tafaga Takofi
Heku	Kiemalaha	Labuha	
	Fanyira	Takome Sula Gam Cim Mado Togelobe	Tabanga Siko Toma Afu Faufu Tomajiko
Cim	Kiemalaha	Tobona	
	Fanyira	Talagame Mayau Tafure Maitara Kolo.	Wucu Tamio Doi Ta' ake Tomahutu

2.3.3 Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate

Dalam sejarah nusantara, Ternate adalah salah satu kerajaan Islam tertua di nusantara. Sebelumnya, penguasa di Kerajaan Ternate dikenal dengan julukan *kolano*, namun dengan adanya pengaruh Islam, maka sebutan *kolano* diganti nama "Sultan", dimana Zainal Abidin (1468-1500) sebagai sultan pertama, menggantikan ayahnya, *Kolano* Marhum yang telah wafat. Pengaruh Islam pada Kerajaan Ternate, tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara sang halik dengan hambanya, akan tetapi juga berpengaruh pada hubungan horizontal dan bahkan struktur dalam Kerajaan Ternate. Misalnya dengan masuknya Islam, selain mengganti gelar *kolano* menjadi Sultan, di bentuk lembaga baru yaitu "lembaga

Jolebe” atau *bobato akhirat*,⁶⁵ yang bertugas membantu Sultan dalam urusan penyebaran agama Islam.

Perubahan gelar *kolano* menjadi Sultan, menunjukkan perubahan dan penguatan posisi agama Islam dalam kehidupan masyarakat adat Ternate, dan bahkan agama Islam menjadi agama resmi Kesultanan Ternate. Meski keadaan telah berubah, baik karena sentuhan modernisasi, maupun karena perubahan politik dengan adanya integrasi Kesultanan Ternate ke dalam NKRI. Akan tetapi, menurut pandangan penulis bahwa agama terutama Islam, masih tetap menjadi faktor sosiologis yang berpengaruh dalam memahami perilaku masyarakat, khususnya masyarakat adat Ternate.

Masyarakat adat Ternate pasca kemerdekaan Republik Indonesia, mengalami keterbatasan peran dalam lingkungannya untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan kearifan lokal yang dijalankan selama beberapa abad. Pembatasan peran yang mengarah pada pelemahan posisi masyarakat adat Kesultanan Ternate, terutama dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka lembaga adat yang setara dengan desa di seluruh Indonesia termasuk *Soa* di Ternate berubah nama menjadi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Karena berada dalam wilayah struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Kesultanan Ternate harus tunduk pada struktur pemerintahan NKRI yang diatur dari pusat hingga daerah. Perubahan tersebut berpengaruh pada peran dan fungsi struktur pemerintahan kesultanan, yang terdiri dari Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan enam elemen pemerintahan yaitu *jogugu*, *kapita parang*, *kapitan lau*, *hukum soa sio*, *hukum sangaji*, *tuli lamo* serta para *bobato* dalam mengatur dan mengurus masyarakat adat Ternate.

2.3.3.1. Bobato-18 sebagai Lembaga Legislatif Kesultanan Ternate

Sekitar lima abad yang lalu, masyarakat adat Ternate telah mengenal tata pemerintahan moderen, karena sistem *check and balance* telah berjalan, dimana sultan sebagai pimpinan eksekutif dan *bobato-18* (*Nyagimoi Se Tufkange*) yang merupakan perwakilan klan sebagai lembaga legislatif. Model *ceks and balance* di

⁶⁵ Baca Ternate kerajaan Maluku terbesar dalam Adnan Amal, *Ibid.*, hal.62-64.

Kesultanan Ternate, berjalan dalam wujud *Bobato-18* membuat “hukum adat” dan Sultan menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan yang telah disepakati dalam hukum adat.

Selain sebagai lembaga legislatif di Kesultanan Ternate, *bobato-18* juga berfungsi untuk mengangkat Sultan dan memberhentikan Sultan yang telah melanggar hukum adat ataupun tindakan asusila. Sebagai perwakilan dari masyarakat adat, *bobat-18* diduduki oleh para pemimpin *soa* yang memiliki pengaruh di empat kesultanan dan kerajaan kecil, yang ada di Maluku Utara,⁶⁶ misalnya di Kesultanan Ternate diwakili oleh *kiemalaha marsaoli*, *kiemalaha tomagola*, *sangaji malayu cim*, *fanyira jawa*, *fanyira soangare*. Di kesultanan Tidore diwakili oleh *soa sangaji limatahu* dan *kimalaha payahe*. Kemudian di Kesultanan Jailolo, diwakili oleh *sangaji tomatio*, *sangaji kulaba* dan *fanyira jiko*. Sedangkan selebihnya, adalah perwakilan dari kerajaan kecil di Maluku Utara atau perwakilan daerah yang telah ditaklukkan oleh Kesultanan Ternate (Tabel 2.6).

Tabel 2.6
Komposisi Keanggotaan Bobato-18

No.	Nama/ Gelar Adat	Asal Wilayah
1	Kiemalaha Marsaoli	Terante
2	Kiemalaha Tomajiko	Jailolo
3	Sangaji Limatahu	Tidore
4	Kiemalaha Tomatio	Bacan
5	Kiemalaha Payahe	Jailolo
6	Sangaji Kulaba	Jailolo
7	Kiemalaha Tomagola	Ternate
8	Fanyira Jiko	Jailolo
9	Sangaji Malayu cim	Ternate
10	Fanyira Jawa	Ternate
11	Sangaji Mayalu Konora	Loloda
12	Sangaji Takofi	Makean
13	Sangaji Tafaga	Makean
14	Sangaji Tafamutu	Makean
15	Kiemalaha Tamadi	Ternate
16	Fanyira Soangare	Ternate
17	Kiemalaha Doi	Loloda
18	Kiemalaha Labuha	Bacan

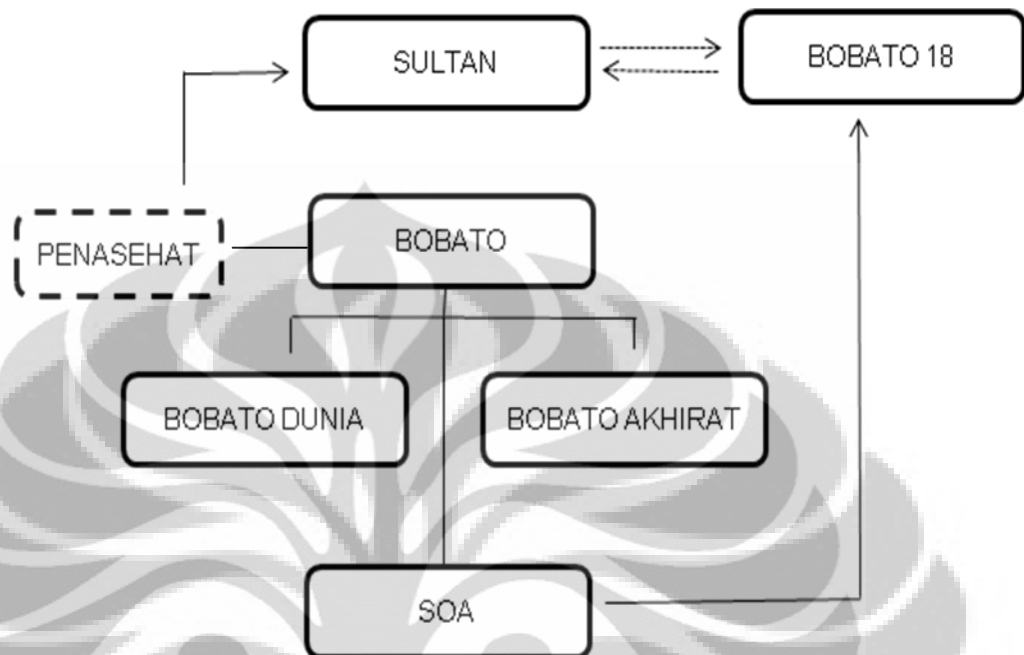
⁶⁶ Lihat Mudaffar syah “Kata Pengantar” dalam Amas Dinsie dan Rinto Taib, *op.cit.*, hal. xx.

Sumber : Rinto Taib, *Gerakan sosial masyarakat adat Ternate: Upaya memahami konflik Pembangunan Bandar Sultan Babullah, Ternate, Dewan Pakar Kesultanan Ternate, 2010.*

2.3.3.2. Sultan Sebagai Eksekutif dan Pembina Agama (*Amir al Din*)

Dalam menjalankan pemerintahan dan melakukan pelayanan masyarakat, Sultan secara garis besar memiliki dua pembagian urusan, yaitu urusan yang berhubungan dengan keduniaan dan urusan yang berhubungan dengan akhirat. Segala urusan yang berhubungan dengan keduniaan, maka tanggung jawab tersebut diserahkan Sultan kepada bawahannya yang dikenal dengan nama *bobato dunia*. Sedangkan urusan yang terkait dengan akhirat atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab *bobato akhirat*. Fungsi kedua *bobato* tersebut terkait dengan pengurusan dan pelayanan masyarakat yang berada di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate yang tergabung dalam kolompok Soa (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate



Sumber : Telah diolah kembali dari Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah; *Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Makassar: Gelora Pustaka Indonesia, 2007 dan Rinto Taib, *Gerakan sosial masyarakat adat Ternate: Upaya memahami konflik Pembangunan Bandar Sultan Babullah, Ternate, Dewan Pakar Kesultanan Ternate, 2010.*

Sebagai pimpinan eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh empat menteri yang dikenal dengan *Tau Raha* (masa kolonial dikenal dengan komisi-4) sebagai pelaksana tugas dan sekaligus sebagai penasehat Sultan.⁶⁷ Pertama, *Jogugu* sebagai perdana menteri yang juga sebagai orang kedua setelah Sultan. Kedua, *Tuli Lamo* sebagai sekretaris negara, atau dalam bahasa sederhananya dikenal dengan juru tulis besar. Ketiga, *Hukum Soa Sio* menteri urusan dalam negeri. Keempat *Hukum Sangaji*, memiliki fungsi terkait dengan urusan luar negeri atau disamakan dengan menteri luar negeri. Selain keempat menteri yang telah disebutkan, masih ada dua lagi jabatan setingkat menteri yang menjadi elemen pemerintahan, untuk membantu Sultan dalam menjalankan tugasnya yaitu *Kapita Parang* yang memiliki fungsi sebagai menteri pertahanan dan *Kapita Lau* sebagai laksamana angkatan laut.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. xvii.

Keenam elemen pemerintahan kesultanan yaitu *Jogugu, Tulilamo, Hukum Soa Sio, Hukum Sangaji, Kapita Lau* dan *Kapita Parang*, menjalankan fungsi sebagai *bobato dunia*, dalam hal ini sebagai pembantu Sultan untuk urusan keduniaan termasuk didalamnya urusan operasionalisasi kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Sultan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi, dalam menjalankan fungsinya memiliki dua hak preogatif yaitu *Idin Kolano* dan *Jaib Kolano*.⁶⁸ *Idin Kolano* adalah pengambilan keputusan atau kebijakan dari Sultan yang masih bisa dianulir oleh *bobato-18* sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan Sultan. Sedangkan *Jaib Kolano* adalah keputusan Sultan yang tidak dapat diganggu gugat oleh *bobato-18* karena hak ini bersifat mutlak bagi Sultan.

Selain otoritas tradisional berupa hak-hak yang dimiliki Sultan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, Sultan juga memiliki otoritas religius sebagai “*Amir al din*” atau pembina agama Islam. Sebagai *Amir Al Din*, Sultan dibantu oleh *Jolebe* yang terdiri dari seorang *Kalem (Qadhi)* empat orang imam, serta delapan orang *Khatib* dan 16 orang *Modin*.⁶⁹ Meski telah mengalami perubahan, akan tetapi lembaga ini tetap ada dan menjalankan fungsi terkait dengan urusan akhirat masyarakat adat Ternate. Dalam struktur Kesultanan Ternate, mereka yang membantu Sultan sebagai pelaksanaan fungsi terhadap pembinaan agama disebut sebagai *Bobato Akhirat*.

Bobato Akhirat yang mengurus masalah agama dalam kesultanan memiliki struktur elit berdasarkan fungsi, struktur tertinggi dalam *bobato akhirat* adalah qadhi (imam tertinggi) yang membawahi lima imam besar yaitu *imam jiko, imam jawa, imam sangaji, imam moti* dan *imam bangsa*. Selain imam ada juga khatib yang bertugas menjalankan dakwah dan penyebaran Islam dimasjid

⁶⁸ *Ibid.*, hal. xxvii.

⁶⁹ *Jolebe* adalah para pembantu Sultan Ternate dalam urusan agama, yang terdiri dari *Kalem(qahdi)* yaitu Hakim agama yang juga sebagai majelis peradilan agama tertinggi dan pemimpin para imam, *khatib* dan *moding(muazzin/ staf dari imam di mesjid)* lihat Adnam Amal, *Ibid.*, hal. 64.

kesultanan, dalam memperlancar pelaksanaan tugas dari khatib, maka ia dibantu oleh *modin*.⁷⁰

Selain pola kepemimpinan yang terkait dengan struktur kekuasaan, dengan relasi antara penguasa dan yang dikuasai (rakyat), ada pula pola kepemimpinan dalam lingkup yang lebih kecil yaitu pada lingkup keluarga. Pada umumnya di kepulauan Maluku, kepala keluarga tidak hanya menanggung anak dan istri serta kerabat yang lain, tetapi setiap keluarga biasanya memiliki tanggungan di luar dari kerabat dekat, mereka adalah *anak piara*.⁷¹

Hubungan *bapak piara* (keluarga penanggung) dengan *anak piara* (orang yang ditanggung) lebih bersifat parternalistik, konsep ini mirip dengan konsep *traditional authority*, dalam studi Karl Jackson tentang masyarakat Sunda.⁷² Sebagai *bapak piara* yang memiliki fungsi sebagai pelindung, pendidik dan panutan dalam keluarga, maka akumulasi potensi lebih yang dimiliki oleh *bapak piara* melahirkan otoritas dalam keluarga. Otoritas *bapak piara* melahirkan hubungan ketergantungan *anak piara* terhadap *bapak piara*, sehingga penulis berasumsi bahwa ada hubungan antara perilaku memilih dari kedua konsep tersebut.

Seperti di Indonesia yang dianggap sebagai negara yang memang dikenal dengan kekeluargaannya, sedangkan di Eropa dan Amerika bersifat individualistik, keluarga tetapi menjadi unit analisis terpenting dalam menentukan perilaku dan sikap individu. Misalnya Standley Renshon mengatakan bahwa “keluarga adalah agen sosialisasi yang utama” atau James C Davies yang mengatakan “perilaku politik individu di tentukan di rumah”⁷³. Untuk konteks

⁷⁰ Baca Syahril Muhammad, *Kesultanan Ternate Sejarah Sosial Ekonomi Dan Politik*, Yogyakarta: Ombak, 2004.

⁷¹ *Anak piara* adalah orang lain yang tinggal numpang dalam satu keluarga tertentu dan menjadi tanggungan keluarga tersebut, *anak piara* biasanya berasal dari orang yang tidak mampu atau orang dari luar pulau yang sekolah di Ternate dan tidak memiliki keluarga.

⁷² Lihat Gaffar, *op.cit.*, hal. 12-13.

⁷³ Berdasarkan studi Sidney Verba, Kay Lehman S. , dan Nancy Burn ditahun 1960-1970 bahwa keluarga adalah proses awal dalam pendidikan politik bagi anak, yang kemudian berpengaruh pada aktifitas politik dan sikap politik ketika mereka dewasa. Untuk lebih jelasnya baca, Sidney Verba, Kay Lehman S. , dan Nancy Burn “*Family Ties: Understanding the Integrational Transmission of Political Participation*” dalam, Alan S Zuckerman (ed.) *The Social Logic Of Politic: Personal Networks As Contexts For Political Behavior*, Philadelphia: Temple University Press, 2005 hal. 95.

masyarakat adat Ternate, pola kepemimpinan keluarga juga sebagai variabel penting dalam memahami pemilih.

2.4 Masyarakat Adat dan Dinamika Politik Lokal

Reformasi menciptakan peluang munculnya politik identitas di tingkat lokal, dalam bentuk adat, suku, klan dan agama. Konflik horizontal di Maluku Utara antara tahun 1999-2000 sebagai dampak dari ketidaksiapan elit lokal dan masyarakat untuk bersaing dan memanfaatkan politik di masa reformasi. Alasan primordial seperti sentimen etnis, suku dan agama adalah kekuatan politik yang paling mudah digerakan demi mencapai kepentingan tertentu.

Sejak proses pemekaran Provinsi Maluku Utara, identitas adat, etnis dan agama sering menjadi isu yang diangkat untuk memperoleh dukungan politik. Dengan mengatasnamakan masyarakat adat, mereka menolak hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Thaib Harmain serta Madjid Abdullah periode 2002-2007, karena mereka menduga Thaib menyelewengkan dana pengungsi daerah sebesar Rp 54 miliar ketika menjabat sebagai sekretaris daerah.

Pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, dengan mengatasnamakan masyarakat adat, mereka mendesak KPUD Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan Sultan Mudaffar Syah sebagai calon Gubernur Maluku Utara, meski tidak memenuhi 15% dukungan partai politik. Peristiwa tersebut berujung pada konflik antara aparat keamanan dengan masyarakat adat, karena mereka melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik, penutupan jalan dan blokade Bandara Sultan Babullah Ternate. Ketiga gerakan tersebut yang mengatasnamakan adat adalah upaya untuk melibatkan politik identitas dalam ranah publik untuk pencapaian tujuan elit dan kelompok tertentu.

Identitas adat adalah ikatan primordial, seperti penjelasan Maswadi Rauf mengenai konsep Geertz bahwa ikatan primordial adalah keterikatan atas kelompok yang didasari oleh nilai-nilai yang disebabkan oleh hubungan darah,

agama suku dan adat istiadat.⁷⁴ Menyadari besarnya pengaruh ikatan primordial maka partai politik berusaha memperoleh dukungan dengan memanfaatkan ketokohan tertentu dari masyarakat tersebut, seperti partai PDK memanfaatkan Sultan pada Pemilu 2004 dan partai Demokrat yang melibatkan Boki sebagai caleg partai.

Sultan dan Boki adalah simbol adat tertinggi di Kesultanan Ternate, sebelum kemerdekaan dan imperialisme posisi mereka sebagai penguasa dengan otoritas sendiri di Ternate dan wilayah lain yang dianeksasi. Namun dengan adanya imperialisme penjajah dan kemerdekaan dalam bingkai NKRI, kekuasaan mereka perlahan-lahan dibatasi atau bahkan terjadi *sharing of power*, antara pihak-pihak diluar struktur Kesultanan Ternate. Misalnya dengan adanya imperialisme penjajah ditahun 1500-an, maka pihak Kesultanan Ternate sering kali dirugikan dengan adanya “politik monopoli”, sehingga otoritasnya dalam mengatur urusan perdagangan rempah-rempah menjadi terbatas oleh kekuatan penjajah. Pada saat terbentuknya NKRI-pun, kekuasaan kesultanan akan masyarakat adat Ternate, yang secara geneologis dan historis memiliki hubungan erat dengan kesultanan menjadi terbatas, dan bahkan dibatasi oleh pemerintahan NKRI terutama pada masa Orde Baru.

Dengan adanya perubahan politik dimasa Reformasi, maka terbuka peluang bagi bangkitnya kembali simbol-simbol adat, meski kebangkitan tersebut tidak berarti mengembalikan kejayaan Kesultanan Ternate seperti pada abad ke-15. Masuknya Sultan dan Boki untuk bersaing dalam konteks politik lokal (Pilkada) dan Nasional, sebagai upaya untuk memadukan legitimasi kekuasaan tradisional dan modern. Perpaduan legitimasi kekuasaan tradisional dan modern, bermakna pengakuan Sultan maupun Boki dalam struktur masyarakat adat, maupun dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterlibatan Sultan Mudaffar Syah dalam perpolitikan di Indonesia telah dimulai sejak Orde Baru, dimana Sultan dipercaya sebagai anggota DPRD dari Golkar di Provinsi Maluku (sebelum dimekarkan menjadi Maluku Utara).

⁷⁴ Baca Maswadi Rauf, *Konsesus Dan Konflik Politik; Sebuah Penajakan Teoritis*, Jakarta : Dirjen Dikti, Depdiknas 2001, hal. 62.

Perjuangan politik Sultan Mudaffar Syah sebagai bagian dari gerakan daerah, nampak pada perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Menurut Klinken, perjuangan tersebut tidak semata untuk mendapatkan legitimasi simbol, akan tetapi lebih dari pada simbol, yaitu kekuasaan riil di Maluku Utara.⁷⁵ Namun perjuangan pada periode tersebut hanya berujung pada terbentuknya Provinsi Maluku Utara, sedangkan kekuasaan riil di Maluku Utara belum bisa terwujud dengan sempurna pada tahun 1999.

Pada periode selanjutnya di tahun 2004, perjuangan politik Sultan Ternate dilanjutkan setelah meninggalkan partai Golkar dan bergabung dengan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK). Dengan dukungan masyarakat adat pada pemilihan langsung tahun 2004, Sultan sebagai simbol tertinggi kesultanan Ternate berhasil menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara dari partai PDK, dengan memperoleh 10% dari total suara sah. Di tahun 2007, Sultan kembali berusaha memperkokoh simbol dan kekuasaan riil di Maluku Utara, hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti pencalonan sebagai Gubernur Maluku Utara dengan menggalang kekuatan politik dari PPP dan partai kecil yang lain. Namun perjuangan tersebut kembali gagal dan tidak membuahkan hasil, karena sebelum hari penetapan keputusan sebagai calon Gubernur, salah satu partai pendukung menarik dukungannya, sehingga pasangan Mudafar Syah dan Rusdi Hanafi (Ketua DW PPP) tidak memenuhi 15% suara atau kursi di DPRD Maluku Utara tahun 2004.

Menyadari posisi Sultan sebagai simbol di Ternate khususnya dan Maluku Utara, sehingga pada Pemilu 2009 Sultan memilih untuk non-partai, karena citra yang ditimbulkan dengan menjadi bagian dari partai politik tertentu cenderung eksklusif. Dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan berusaha mewedahi kepentingan masyarakat adat Ternate dan Maluku Utara tanpa ada sekat-sekat partai politik.

Sedangkan Boki atau Ratu Nita Budhi Susanti, baru memasuki dunia politik sejak menjadi anggota DPD di tahun 2004, dan kemudian disusul dengan pencalonan diri sebagai Walikota Ternate tahun 2005. Meski Boki sebagai

⁷⁵ Gerry Van Klinken, *op.cit.*, hal. 171-172.

Permaisuri Kesultanan Ternate, akan tetapi lawan politiknya mampu bersaing dan bahkan mengalahkan perolehan suara Boki di basis masyarakat adat Kesultanan Ternate. Seperti di bagian Utara Kesultanan Ternate yang selalu diidentikkan dengan basis masyarakat adat, pada pemilihan Walikota Ternate tahun 2005 di Kelurahan Faudu di Pulau Hiri (sekarang jadi Kecamatan Pulau Hiri) justru dimenangkan oleh kandidat lain yaitu Samsir Andili.

Perjuangan Boki untuk memperoleh legitimasi simbol dan kekuasaan riil di Ternate dan Maluku Utara tidak berakhir setelah kegagalannya menjadi Walikota Ternate Tahun 2005, karena Boki tetap tampil pada Pemilu 2009. Boki memilih jalur politik melalui partai politik, dengan menjadi caleg dari Partai Demokrat dan berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara dengan perolehan suara 10% dari suara sah.

Kesultanan selalu menjadi kekuatan politik yang perhitungannya di Maluku Utara khususnya di Ternate, karena kesultanan selalu memperoleh dukungan politik dari masyarakat adat. Misalnya dalam pemilihan Walikota Ternate tahun 2010, meski Sultan dan Boki bukan sebagai calon Walikota Ternate periode 2010-2015, akan tetapi kesultanan dan masyarakat adat dilibatkan untuk memberi dukungan pada salah satu pasangan calon. Bukti nyata dukungan Kesultanan Ternate dengan di keluarkannya fatwa atau *idin kolano*, dimana Sultan Mudaffar Syah “ meminta kepada *Bobato Dunia, Bobato Akhirat, Bangsa Ngofa Se dano, balakkusu Sekanokano*, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate agar mendukung dan memilih paket calon Walikota Drs.Burhan Abdurahman, SH., MM dan Ir. Arifin Jafat, MBA.

BAB 3

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE

Dalam kajian demokrasi modern berdasarkan pandangan Robert A. Dahl, pemilu adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara karena di dalamnya mengandung dimensi partisipasi.⁷⁶ Sedangkan partisipasi politik membutuhkan keterlibatan seseorang atau kelompok orang secara dalam kehidupan politik, baik langsung atau tidak langsung. Aktifitas politik tersebut mencakup pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, lobby dan lain-lain.⁷⁷ Berpartisipasi dalam pemilu dalam bentuk ikut memilih atau justru memilih menjadi golongan putih (golput), adalah sebuah pilihan politik dalam dunia demokrasi, sedangkan kajian sikap pemilih dalam menentukan pilihan adalah bagian dalam studi perilaku pemilih.

Perilaku memilih untuk konteks Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir atau pasca reformasi adalah studi yang menarik, karena perubahan politik sebagai konsekuensi dari reformasi mendorong tingkat partisipasi, kebebasan dan kompetisi. Kondisi tersebut mendorong munculnya orang-orang baru ditingkat lokal maupun nasional dalam politik, yang selama ini memiliki akses politik terbatas atau dengan sengaja dibatasi oleh rezim sebelum reformasi. Misalnya di Maluku Utara pada Pemilu tahun 2004 dan 2009, muncul empat kesultanan dalam politik sebagai representasi masyarakat adat, baik sebagai pengurus partai, caleg ataupun sebagai kekuatan politik untuk mendukung pada setiap peristiwa politik lokal seperti Pilkada.

Dalam Bab III, akan membahas perilaku memilih masyarakat adat Ternate dengan tiga sub pokok bahasan yaitu pertama, perilaku masyarakat adat Ternate dalam memilih partai politik dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009. Kedua, alasan dalam memilih partai dan caleg dan yang ketiga akan membahas

⁷⁶ Lihat Georg Sorensen *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 42. Buku Ini diterjemahkan dari edisi inggris yang berjudul *Democracy And Democratization: Processes And Prospect in Changing World*, Westview Press, 1993.

⁷⁷ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hal. 367.

konsistensi masyarakat adat Ternate dalam memilih partai antara Pemilu 2004 dan 2009.

3.1. Perilaku dalam Memilih Partai Politik

Peluang yang muncul akibat reformasi, mendorong Kesultanan Ternate untuk tetap mengambil bagian dalam perpolitikan Maluku Utara maupun di Kota Ternate. Seperti telah disebutkan pada Bab II, bahwa sejak tahun 1999 Kesultanan Ternate telah mengambil bagian dalam upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara dan sebagai calon Gubernur Maluku Utara tahun 2007, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya Kesultanan untuk memperoleh legitimasi simbol dan kekuasaan nyata.⁷⁸ Selain di provinsi, keterlibatan politik Kesultanan juga berlangsung di Kota Ternate, misalnya tahun 2005, Boki ikut sebagai Calon Walikota Ternate dan yang terakhir tahun 2010, Kesultanan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masyarakat adat Ternate untuk mendukung dan memilih salah satu pasangan calon Walikota.

Kesultanan Ternate selalu menjadi kekuatan politik yang diperebutkan oleh partai politik dalam setiap pemilu, karena Kesultanan adalah kekuatan politik yang nyata dengan pendukung yang loyal yaitu masyarakat adat Ternate. Seperti pada Pemilu 2004, berbasis dukungan masyarakat adat Ternate, Sultan berhasil menjadi anggota DPR-RI dari partai PDK dengan perolehan suara 10% dari total suara sah. Sedangkan untuk DPRD Kota Ternate PDK berhasil memperoleh 5 kursi dan menempati posisi kedua setelah partai Golkar. Keberadaan Sultan di partai tersebut mejadi daya tarik sendiri bagi pemilih, khususnya pemilih yang berbasis masyarakat adat. Hipotesis tersebut terbukti pada Pemilu 2009, pasca kekecewaan masyarakat adat dan Kesultanan Ternate atas sikap politik PDK, yang tidak mendukung pencalonan Sultan pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2007, sehingga dukungan masyarakat adat terhadap PDK pada pemilu tahun 2009 bergeser ke partai yang lain dan PDK tidak memperoleh kursi di Pemilu 2009.

Berdasarkan hasil survey, pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terdapat dua partai yang memiliki dukungan berdasarkan basis pemilih masyarakat adat yaitu

⁷⁸ Gerry Van Klinken, *op.cit.*, hal. 172.

Partai Demokrat dan Golkar. Pada Partai Demokrat terdapat 31,7% responden mengaku bahwa pada pemilu legislatif Kota Ternate Tahun 2009 memilih partai tersebut. Asumsi awal bahwa tingginya dukungan masyarakat adat terhadap Partai Demokrat, berhubungan dengan posisi Ratu Boki Nita Budhi Susanti sebagai caleg dan pengurus partai tersebut, serta posisi Abdullah Tahir yang juga sebagai caleg yang secara geneologis masih keturunan Sultan dengan stratifikasi adat golongan *dano-dano*. Keberadaan Boki di Partai Demokrat sebagai representasi Kesultanan Ternate, diterjemahkan sebagian besar masyarakat adat Ternate sebagai dukungan *Alam Makolano* (gelar Sultan Ternate, yang berarti penguasa alam) atas partai tersebut.

Tabel 3.1

Distribusi Partai Pilihan Masyarakat Adat Ternate pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

Partai	N	Persen (%)
Golkar	33	27.5
Demokrat	38	31.7
PPP	7	5.8
PDIP	9	7.5
PAN	7	5.8
PKS	2	1.7
PBR	6	5.0
PBB	1	.8
PDK	3	2.5
Hanura	2	1.7
Gerindra	1	.8
PKPB	1	.8
Lainnya	10	8.3
Total	120	100

Meski perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Kota Ternate tahun 2009 berbeda dengan perolehan kursi PDK tahun 2004, akan tetapi pada Pemilu 2009 Demokrat tetap unggul di basis masyarakat adat yang selama ini dianggap setia, seperti di Kelurahan Dufa-Dufa dan Soa-Sio. Berdasarkan data dari KPUD Kota

Ternate tahun 2009, perolehan suara Demokrat yang mempunyai hasil suara sah di dua kelurahan tersebut sangat signifikan jumlahnya, jika dibanding dengan delapan partai lain yang mendapat kursi di Dapil-II Ternate Utara dan Tengah. Seperti di Kelurahan Dufa-Dufa, Partai Demokrat memperoleh 34,22% dari total suara sah di kelurahan tersebut (Tabel 3.2). Jumlah suara tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan perolehan suara partai lain, seperti Golkar dan PKS dengan perolehan masing-masing 12,88% dan 13,43%, atau partai lain misalnya PPP, PDIP, PAN, Hanura, PBB dan PBR yang hanya memperoleh antara 0,14% - 2,85% dari total suara sah di kelurahan tersebut.

Basis setia atau solid masyarakat adat yang lain yaitu di Kelurahan Soa-Sio, kelurahan ini secara geografis adalah lingkaran satu (*ring satu*), karena posisinya berbatasan dengan Istana Kesultanan Ternate (*Kedaton Ternate*). Perolehan suara partai di kelurahan ini, dimana posisi Demokrat masih tetap dominan yaitu 16,34%, jika dibanding dengan partai lain seperti PDIP, Golkar dan PBB yang masing-masing 10,55%, 8,96% dan 8,28% (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Hasil Perolehan Suara Partai Per Kelurahan Pada Pemilu 2009

Nama Partai	Dufa-Dufa (%)	Sangaji (%)	Soa Sio (%)	Akehuda (%)	Makassar Timur (%)	Salahuddin (%)
Golkar	12.88	17.22	8.96	17.2	12.49	16.17
Demokrat	34.22	10.44	16.34	9.44	11.67	7.5
PPP	2.85	10.52	3.74	1.36	6.86	3.93
PDIP	2.39	8.38	10.55	29.56	16.52	5.62
PAN	2.88	9.25	4.19	4.03	23.46	5.56
PKS	13.43	5.59	1.8	3.47	4.77	1.89
PBR	0.14	5.83	2.04	0.99	0.48	20.32
PBB	0.79	2.54	8.28	0.74	7.83	22.16
Hanura	2.48	3.53	5.5	3.9	2.27	2.36

Sumber : telah diolah kembali dari data KPU Kota Ternate tahun 2009” Rincian perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD kota Ternate”.

Perolehan suara PDIP dan Demokrat dengan selisih kira-kira 5% dari total suara sah di Kelurahan Soa-Sio, berhubungan dengan posisi tawar (*bargaining position*) kedua caleg partai tersebut di masyarakat adat. Posisi tawar dalam masyarakat adat, maksudnya posisi Abdullah Tahir sebagai caleg Demokrat dan

Universitas Indonesia

Merlisa sebagai caleg PDIP untuk Kota Ternate yang masing-masing memiliki hubungan geneologis dengan masyarakat adat. Abdullah Tahir yang secara geneologis merupakan keturunan Sultan dengan pangkat *dono-dano*, sedangkan disisi lain, Merlisa yang bermarga/klan Marsaoly adalah merupakan sub klan dari Soa-Sio, dimana klan tersebut merupakan klan yang penting dalam sejarah Kesultanan Ternate.

Selain di Kelurahan Soa-Sio, perolehan suara PDIP terhitung tinggi di dua kelurahan yang lain yaitu Kelurahan Akehuda dan Makassar Timur. Di Kelurahan Akehuda, perolehan suara PDIP unggul jauh dari partai yang lain, karena berhasil memperoleh 29,56% dari total suara sah di pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009. Perolehan tersebut jauh dari perolehan suara Golkar dan Demokrat yang hanya memperoleh masing-masing sebesar 17,2% dan 9,44%. Kelurahan Akehuda adalah basis pemilih PDIP terbesar di Kota Ternate, hal tersebut berhubungan dengan figur Merlisa, yang secara emosional memiliki kedekatan dengan masyarakat adat di kelurahan tersebut. Hubungan emosional yang dimaksud, yaitu posisi Merlisa sebagai caleg yang tinggal dan berdomisili, berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tersebut dalam kesehariannya. Selain memiliki hubungan emosional dengan Merlisa, pemilih di kelurahan tersebut juga memiliki kedekatan dengan kedua orang tua Merlisa yang dikenal sebagai tokoh masyarakat di kelurahan tersebut.

Perolehan suara PDIP di kelurahan yang lain yang menonjol yaitu di Kelurahan Makassar Timur yaitu 16,52 %, meski jumlah tersebut lebih kecil dari perolehan suara PAN di Kelurahan Makassar Timur dengan persentase 23,46%. Akan tetapi mampu melampaui perolehan suara Demokrat yang hanya 11,67%, yang sama-sama memanfaatkan basis masyarakat adat. Kelurahan Makassar Timur adalah hasil pemekaran dari Kampung Makassar, yang dalam sejarah Ternate tempat tersebut adalah tempat yang diberikan oleh Sultan kepada pendatang untuk ditempati. Terdapat sumber lainnya yang juga menyebutkan, bahwa wilayah Kampung Makassar adalah wilayah kelompok klan *Cim* karena berada disebelah selatan Kesultanan Ternate.

Jika memperhatikan karakteristik masyarakatnya sekarang ini, mereka kebanyakan adalah kelompok urban yang beraktifitas didunia bisnis, baik dalam skala kecil seperti dipasar tradisional yang berdekatan dengan wilayah tersebut, maupun skala besar seperti kontraktor dan bisnis pengadaan. Hubungan karakteristik tersebut dengan perilaku memilih, diasumsikan bahwa mitra bisnis dan kesamaan profesi (kesamaan identitas) akan melahirkan kedekatan-kedekatan tertentu. Hal tersebut dapat kita telusuri dari perolehan suara dua partai tersebut, seperti partai PAN rata-rata calegnya adalah mereka yang berbasis pengusaha seperti keluarga Bopeng (nama calegnya Husni Bopeng) dan caleg dari PDIP yaitu Merlisa yang juga keluarga pengusaha.

Di Kelurahan Salahudin, terdapat dua partai yang tertinggi perolehan suaranya yaitu PBR dan PBB masing-masing 20,32% dan 22,16%. Perolehan suara kedua partai tersebut lebih karena caleg dari partai tersebut adalah orang yang dikenal, karena bertempat tinggal di lingkungan tersebut dan juga sebagai tokoh bagi masyarakat setempat. Partai lain yang memperoleh suara tertinggi di kelurahan ini adalah Partai Golkar, partai ini juga mengandalkan kekuatan figur yang menjadi caleg partainya. Meski di arena politik, Taufan Andili adalah orang yang dalam kategori pemula, akan tetap pemilih lebih mengenal figur Syamsir Andili yang menjabat sebagai Walikota Ternate selama dua periode, dengan kekuatan figur Syamsir maka Taufan Andili yang juga caleg Golkar memperoleh suara terbanyak di Dapil II Utara- Tengah.

Berdasarkan data perolehan suara di enam kelurahan (Tabel 3.2), perolehan suara Golkar hanya unggul di Kelurahan Sangaji sebesar 17,22%, dengan selisi kurang dari 7% dari partai lain dari kelurahan tersebut. Namun karakteristik pemilih Golkar di tiap kelurahan relatif stabil, karena perolehan suaranya berada antara 12-17%, kecuali di Kelurahan Soa-Sio yang hanya 8,96%. Posisi yang stabil tersebut, membuat Golkar selalu menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar di DPRD Kota Ternate. Dasar argumentasi mengapa Golkar selalu stabil, yang pertama yaitu Golkar adalah partai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan kedua Golkar memiliki pengalaman dalam politik dengan sistem yang mapan karena mampu bertahan dalam setiap situasi politik,

Universitas Indonesia

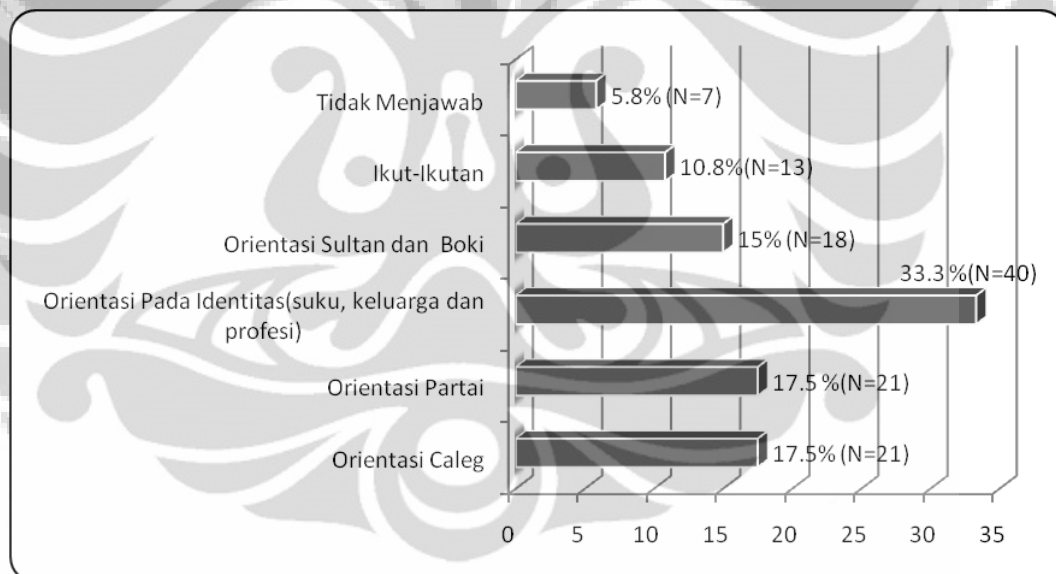
kondisi tersebut sebagaimana istilah Samuel P Huntington sebagai “pelembagaan politik”.⁷⁹

3.2. Alasan dalam Memilih Partai dan Caleg Partai

Dengan menggunakan model Michigan untuk menganalisa perilaku memilih masyarakat adat Ternate yang berpola patron-klien, maka secara teoritis, ada tiga variabel yang akan dianalisis yaitu kedekatan dengan partai (*party identification*), kedekatan dengan caleg (*candidate orientation*) dan ketertarikan pada isu (*issue orientation*). Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan psikologis, yang secara umum menekankan pada aspek perasaan dan kedekatan terhadap partai maupun caleg partai.

Gambar 3.1

Distribusi Responden menurut Alasan Pemilih dalam Memilih Partai



Berdasarkan hasil survei (Gambar 3.1), menunjukkan sebagian besar alasan responden dalam memilih partai yaitu lebih berorientasi pada kesamaan identitas dengan orang-orang yang berada dalam partai tersebut. Kesamaan identitas terbentuk dari persamaan suku, profesi maupun karena hubungan

⁷⁹ Baca “kriteria Pelembagaan Politik” dalam Samuel P. Huntington, (Terj.) *Tertip Politik: Di Tengah Pergeseran Kepentingan Mass.* (Jakarta; PT.Rajagrafindo Persada, 2003) hal. 16-29.

keluarga (33,3%). Responden yang berorientasi pada partai dan caleg partai masing-masing sebanyak 17,5%. Bagi responden berorientasi pada partai, cenderung memilih partai karena kepercayaan kepada partai sebagai partai bersih dan sebagai pemilih yang loyal.

Alasan lain yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat adat Ternate dalam memilih partai dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009, yaitu sebanyak 15% dari responden menyatakan, mereka memilih partai karena alasan Sultan dan Boki. Maksud “alasan Sultan dan Boki” yaitu perubahan perilaku politik Sultan dan Boki antara Pemilu tahun 2004 dan 2009. Selain berorientasi identitas, caleg dan partai, serta orientasi Sultan dan Boki, terdapat 10,8% responden yang memilih namun tidak memiliki orientasi karena mereka memilih partai dengan alasan ikut-ikutan.

Tingginya jumlah pemilih yang berorientasi identitas kesukuan dan keluarga dalam masyarakat adat diasumsikan terpengaruh oleh dua faktor, yaitu pola patron-klien dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, serta lemahnya fungsi parpol dalam masyarakat adat. Pertama, masyarakat adat Ternate adalah masyarakat yang terbentuk dari ikatan kekeluargaan dan komunitas yang hidup secara turun-temurun, serta terikat oleh struktur dan kultur Kesultanan Ternate dengan pola patron-klien. Kedua, fungsi partai belum berjalan maksimal sehingga masyarakat tidak merasakan dampak dan perbedaan antara partai yang satu dengan yang lain.

Responden yang berorientasi pada partai dan caleg masing-masing sebesar 17,5% adalah mereka dalam kategori pemilih rasional, karena mereka dalam memilih partai dan caleg lebih mengutamakan kualitas dari caleg dan kemampuan partai. Misalnya mereka yang berorientasi pada partai, penilaian terhadap partai, terkait dengan kualitas program, isu korupsi, dan ideologi partai. Sedangkan pemilih yang berorientasi pada caleg, menilai kualitas caleg dari kemampuan kepemimpinan (*leaderships*) serta pengalaman politik caleg.

Tabel 3.3

Distribusi Responden menurut Pilihan Partai dan Alasan Memilih Partai

Alasan Memilih Partai														
Partai	Orientasi Caleg		Orientasi Partai		Orientasi Pada Identitas(suku, keluarga dan profesi)		Orientasi Sultan dan Boki		Ikut-Ikutan		Tidak Menjawab		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	11	33.3	13	39.4	3	9.1			4	12.1	2	6.1	33	100
Demokrat	3	7.9	1	2.6	9	23.7	18	47.4	5	13.2	2	5.3	38	100
PPP	-	-	2	28.6	3	42.9	-	-	2	28.6	-	-	7	100
PDIP	-	-	1	11.1	7	77.8	-	-	1	11.1	-	-	9	100
PAN	1	14.3			6	85.7	-	-			-	-	7	100
PKS	-	-	1	50	1	50	-	-			-	-	2	100
PBR	2	33.3	1	16.7	2	33.3	-	-			1	16.7	6	100
PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100
PDK	2	66.7	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-	3	100
Hanura	1	50			1	50	-	-	-	-	-	-	2	100

Distribusi pilihan partai berdasarkan alasan memilih partai (Tabel 3.3), menunjukkan bahwa rata-rata pemilih pada tiap partai lebih berorientasi pada identitas kesukuan dan keluarga. Bagi pemilih rasional yang berorientasi pada kualitas caleg dan partai, mereka lebih cenderung memilih Partai Golkar masing-masing sebesar 33,3% dan 39,4%. Pemilih yang dapat mengevaluasi kualitas partai dan caleg adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemilu, sehingga mereka memiliki preferensi tersendiri terhadap partai dan caleg tertentu. Pengalaman dan pengetahuan biasanya berbanding lurus dengan usia atau jumlah pemilu yang ia ikuti. Berdasarkan kelompok usia, 60,6% responden yang memilih Golkar adalah mereka yang berumur antara 41-72 tahun (Tabel 3.4), hal ini berarti bahwa rata-rata pemilih yang memilih Golkar adalah mereka yang memiliki pengalaman dalam memilih pada Orde Lama hingga Orde Reformasi.

Perubahan perilaku politik Sultan dan Boki antara Pemilu 2004 dan 2009, berpengaruh pada kecenderungan masyarakat adat terhadap Partai PDK dan Partai

Universitas Indonesia

Demokrat. Dampak perubahan tersebut pada Pemilu 2009, PDK tanpa figur Sultan mengalami perubahan suara yang berarti, karena tidak memenuhi angka perolehan kursi di DPRD Kota Ternate. Sedangkan Demokrat dengan figur Boki bertambah satu kursi, pengaruh keberadaan Boki di Demokrat diasumsikan berhubungan dengan perolehan kursi partai tersebut, karena 47,4% (Tabel.3.3) responden yang memilih Demokrat berorientasi pada Sultan dan Boki.

Pemilih Demokrat yang memilih berdasarkan orientasi Sultan dan Boki, yaitu mereka yang terikat oleh falsafah adat *Jou Se Ngofangara* (hubungan Sultan dan rakyat), yang bermakna Sultan dan Boki sebagai parton bagi masyarakat adat. Keterikatan terhadap identitas adat (orientasi Sultan dan Boki) tidak butuh pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi partai dan caleg seperti pada pemilih rasional. Karena identitas adat terbentuk dari geneologis, sehingga kelompok umur tidak penting, misalnya pemilih Demokrat yang mengutamakan identitas adat, terlihat tidak ada perbedaan antara kelompok yang berumur 25-40 dan 41-72 tahun (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
**Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Berdasarkan
 Kelompok Umur**

Partai	Kelompok Umur							
	41-72		25-40		19-24		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	20	60.6	11	33.3	2	6.1	33	100
Demokrat	18	47.4	18	47.4	2	5.3	38	100
PPP	3	42.9	4	57.1	-	-	7	100
PDIP	5	55.6	3	33.3	1	11.1	9	100
PAN	4	57.1	3	42.9	-	-	7	100

Berdasarkan alasan memilih caleg pada partai politik, Tabel 3.5 menunjukkan konsistensi alasan bagi pemilih Demokrat, karena dalam memilih caleg tetap menempatkan Sultan dan Boki sebagai sosok yang menentukan pilihan mereka. Sebanyak 63,3% pemilih Demokrat pada pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009 berdasarkan pada kedekatan caleg terhadap Kesultanan Ternate. Bagi masyarakat adat, identitas (orientasi Sultan dan Boki) selalu menjadi faktor dominan, baik untuk memilih partai maupun caleg partai. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pola patron-klien dengan falsafah adat *jou se ngofangare* mempengaruhi orientasi pemilih partai, sehingga perilaku politik Sultan dan Boki selalu menjadi patron bagi masyarakat adat.

Untuk responden yang memilih Golkar, sebanyak 47,8% memilih caleg dari partai tersebut karena alasan orientasi partai dan 26,1% memilih karena alasan orientasi keluarga, sedangkan alasan lainnya karena mendapat sumbangan dari caleg dan mempunyai kedekatan dengan caleg masing-masing 17,4% dan 8,7%. Yang menarik dari responden yang memilih caleg Golkar adalah mereka mengidentifikasi sebagai pemilih yang loyal karena dari dulu mereka memilih Golkar dan juga karena memiliki latar belakang sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada anggapan bagi pemilih Golkar bahwa mereka yang PNS harus mendukung partai tersebut karena Golkar sebagai partai penguasa di Kota Ternate.

Pada partai yang lain, yaitu PDIP, PPP, dan PAN, tingkat keterpilihan calegnya dipengaruhi oleh orientasi keluarga. Seperti halnya PDIP yang memperoleh suara tertinggi di Kelurahan Akehuda, sebanyak 77,8% pemilih caleg partai tersebut karena alasan keluarga. Pertimbangan keluarga partai juga berlaku untuk pemilih caleg PPP dan PAN seperti pada Tabel 3.5

Tabel 3.5

**Distribusi Responden menurut Alasan Memilih Caleg
per Partai Politik**

Alasan Memilih Caleg												
Partai	Orientasi Keluarga		Orientasi Sultan Dan Boki		Mendapat Sumbangan dari Caleg		Orientasi Partai (Pemilih Loyal, PNS, Caleg)		Dekat Dengan Caleg		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	6	26.1	-	-	4	17.4	11	47.8	2	8.7	23	100
Demokrat	8	26.7	19	63.3	-	-	2	6.7	1	3.3	30	100
PPP	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
PDIP	7	77.8	-	-	1	11.1	1	11.1	-	-	9	100
PAN	4	57.1	-	-	1	14.3	-	-	2	28.6	7	100
PKS	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
PBR	2	40	-	-	1	20	1	20	1	20	5	100

Bersarkan alasan memilih partai dan caleg, maka dapat disimpulkan bahwa pemilih dalam masyarakat adat Ternate pada pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009 adalah mereka yang berorientasi pada figur dalam partai. Orientasi pada figur yang dimaksud adalah orang-orang yang ada dalam partai, seperti alasan dalam memilih partai, pemilih dalam menentukan pilihan selalu melihat orang yang berada didalam partai, seperti keluarga, figur Sultan dan Boki dan ketokohan caleg. Figur caleg selalu jadi titik perhatian dominan dalam menentukan pilihan, hal tersebut salah satunya terkait dengan kegagalan partai dalam fungsi rekrutmen politik dan sosialisasi politik.

Pada masyarakat adat Ternate, kegagalan partai dalam fungsi sosialisasi politik dapat diidentifikasi dari rendahnya pengetahuan pemilih akan identitas

partai dibandingkan dengan identitas caleg. Sebanyak 76%-84% responden mempunyai pengetahuan mengenai identitas caleg seperti nama caleg, asal partai, pekerjaan caleg, suku dan tempat tinggal caleg. Sedangkan pengetahuan pemilih akan identitas partai mengenai program partai hanya sebesar 17,7% (Tabel 3.6). Ketimpangan pengetahuan pemilih antara identitas caleg dan identitas partai, memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa masyarakat adat dengan ciri patron-klien lebih cenderung pada hubungan kedekatan individu, sementara disisi lain partai politik tidak dapat mengimbangi dominasi tersebut dengan menjalankan fungsi-fungsi partai politik dengan baik.

Tabel 3.6

Distribusi Responden menurut Pegetahuan Identitas Caleg dan Partai

Identitas Caleg dan Partai	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
Nama caleg	84.4 (N=81)	15.6 (N=15)
Asal partai	81.2 (N=78)	18.8 (N=18)
Program	17.7 (N=17)	82.3 (N=79)
Pekerjaan caleg	76 (N=73)	24 (N=23)
Suku	78.1 (N=75)	21.9 (N=21)
Tempat tinggal	81.2 (N=78)	18.8 (N=18)
Total N= 96		

3.3 Konsistensi Memilih Parpol pada Pemilu Tahun 2004 dan 2009

Persepsi pemilih terhadap partai sangat tergantung pada kemampuan partai membangun citra sebelum dan sesudah pemilu. Akumulasi dari pencitraan partai sebelum dan sesudah pemilu melahirkan persepsi, kemudian akan melahirkan sikap dan keputusan, apakah pada pemilu selanjutnya akan konsisten memilih partai tersebut atau justru merubah pilihan. Oleh karena itu, dalam membangun persepsi maka partai membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi partai.⁸⁰

Strategi dalam membangun persepsi berhubungan dengan tipe dari partai tersebut, secara teoritis menurut Maurice Duverger, partai terbagi atas dua

⁸⁰ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*, akarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 232.

tipologi yaitu partai *cader party* (partai elit) dan *mass party* (partai massa)⁸¹ dan pada tahun 1960-an Otto Kirshheimer menyempurnakan tipologi tersebut yang merupakan kombinasi dari keduanya, yaitu tipe *catch all party*. Dalam perkembangan yang terakhir ini, seperti pada kesimpulan Kusridho Ambardi dalam “Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indoesia Era Reformasi” yang terinspirasi oleh konsep partai kartel dari Richard Katz dan Peter Mair.⁸² Temuan Ambardi dalam konteks sistem kepartaian Indonesia, menemukan tiga wilayah kompetisi politik yaitu arena Pemilu, Kabinet dan Legislatif. Kompetisi dapat terjadi disalah satu wilayah dan menghilang diwilayah yang lain, hal ini menunjukkan terjadinya tipe partai kartel di Indonesia.

Pola partai kartel selama sepuluh tahun terakhir ini, berpengaruh pada persepsi dan orientasi pemilih terhadap partai politik. Ketidakjelasan batas idiologis partai politik selama ini, sehingga hampir tidak ditemukan partai oposisi yang sejati. Fenomena ketidakjelasan garis idiologis dan konsistensi partai, berpengaruh pada pola orientasi pemilih pada partai politik. Perubahan pola orientasi pemilih dari *party orientation* pada masa Orde Lama dan Orde Baru ke *candidate orietation* di masa Reformasi, terkait dengan ketidakjelasan garis idiologis yang menjadi pembeda antara partai satu dengan yang lain. Sehingga yang muncul adalah *candidate orientation* yang berbasis pada hubungan kekerabatan dengan caleg partai. Dengan berorientasi pada kandidat (caleg), maka potensi pemilih partai yang berbeda pada setiap pemilu sangat tinggi, karena caleg dapat berpindah partai setiap saat tanpa mempersoalkan garis idiologis.

Fenomena pergeseran orientasi pemilih yang mengarah pada figur, memperkokoh budaya politik patron-klien pada tingkat lokal. Pada masyarakat Ternate misalnya, posisi kesultanan menjadi kekuatan politik yang selalu menjadi *patron* dalam masyarakat adat, tanpa memperhatikan latar belakang partai politiknya. Sebagai contoh pada Pemilu 2004, meski PDK adalah partai baru akan tetapi dengan memanfaatkan ketokohan Sultan, maka berhasil menjadi partai

⁸¹ Alan Ware, *Political Party And Party System, Capt.2 Supporter, Member and Activis*, New York : Oxford, 2000, hal. 65-67.

⁸² Kusridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta; KPG (Kepustakaan Pupuler Gramedia), 2009, hal. 353-365.

dengan perolehan kursi terbesar kedua setelah Golkar yaitu lima kursi di DPRD Kota Ternate. Begitupun sebaliknya pada Pemilu 2009, setelah Sultan meninggalkan PDK maka suara PDK tidak memenuhi BPP untuk satu kursi di DPRD Kota Ternate.



Tabel 3.7
**Distribusi Responden menurut Konsistensi Memilih Partai
 Pemilu Tahun 2004 dan 2009**

Partai	Pilihan Partai Pada Pemilu 2004 dan 2009					
	Sama		Tidak sama		Total	
	N	%	N	%	N	%
Golkar	18	58.1	13	41.9	31	100
Demokrat	-	-	35	100	35	100
PPP	3	50	3	50	6	100
PDIP	3	33.3	6	66.7	9	100
PAN	1	16.7	5	83.3	6	100
PKS	1	50	1	50	2	100
PBR	1	25.0	3	75.0	4	100
PBB	-	-	1	100	1	100
Hanura	-	-	2	100	2	100

Dampak selanjutnya dari tingginya orientasi pada caleg dari pada orientasi pada partai, mengakibatkan rendahnya konsistensi pemilih untuk memilih partai yang sama pada pemilu selanjutnya. Berdasarkan hasil survei pada Masyarakat Ternate, menunjukkan sebagian besar responden mengatakan memilih partai yang berbeda ditahun 2004 dan 2009. Dengan memperhatikan Tabel 3.7, pemilih Partai Demokrat, PDIP, PAN, PBR, PBB dan Hanura adalah pemilih baru karena sebagian besar mengatakan tidak memilih partai yang sama antara Pemilu 2004 dan 2009.

Responden yang memilih Partai Demokrat pada tahun 2009 sebanyak 100%, mengatakan bahwa pada Pemilu 2004 tidak memilih Demokrat. Ini berarti bahwa semua pemilih Demokrat dalam masyarakat adat Ternate adalah mereka baru memilih Demokrat pada Pemilu 2009. Faktor yang mempengaruhi pemilih Demokrat, berdasarkan alasan mereka memilih partai, yaitu karena keberadaan Boki serta Sultan yang dinilai sebagai representasi adat. Karena responden yang memilih Demokrat rata-rata mengatakan mengikuti pilihan Sultan dan Boki, maka dapat dipastikan bahwa, pemilih Demokrat di tahun 2009 adalah mereka yang memilih Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada Pemilu 2004.

Pemilih Demokrat masih sulit untuk memposisikan Sultan dan Boki pada wilayah yang berbeda. Pemilih Demokrat dalam masyarakat adat memandang keberadaan Boki di Demokrat sama dengan keberadaan Sultan di partai tersebut, meski secara formal Sultan adalah caleg DPD yang berarti non-partai dan tidak pernah berkampanye untuk Partai Demokrat. Akan tetapi, pemilih Demokrat memandang demikian, misalnya terdapat 61,8% merubah pilihan pada Pemilu 2009 karena karena orientasi Sultan (Tabel 3.8).

Tabel 3.8
Alasan Memilih Partai yang Berbeda pada Pemilu 2009

Partai	Alasan Memilih Partai yang Berbeda											
	Kecewa dengan partai sebelumnya		Figur/caleg pidah partai		Partai baru lebih baik		Mengikuti pilihan Sultan		Sebagai caleg partai		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	2	18.2	2	18.2	1	9.1	1	9.1	5	45.5	11	100
Demokrat	3	8.8	4	11.8	3	8.8	21	61.8	3	8.8	34	100
PPP	2	50	1	25.0	-	-	-	-	1	25.0	4	100
PDIP	1	16.7	1	16.7	2	33.3	-	-	2	33.3	6	100
PAN	-	-	1	20	0	.0	1	20	3	60	5	100
PKS	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100
PBR	-	-	1	33.3	1	33.3	1	33.3			3	100
PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100
Hanura	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-	2	100

Responden yang baru memilih Partai Golkar, PPP, PDIP, dan PAN pada Pemilu 2009, memilih partai tersebut karena tiga alasan utama yaitu, sebagai caleg partai masing-masing 45,5%, 25%, 33,3% dan 60%. Besarnya jumlah yang merubah pilihan karena alasan sebagai celeg partai menunjukkan adanya rekrutmen politik dalam masyarakat adat, Namun rekrutmen parpol yang terjadi hanya sebatas untuk kepentingan perolehan suara dan kompetisi pada saat pemilu, karena pola rekrutmennya terjadi pada saat kampanye bukan dari pola pengkaderan yang terencana.

Alasan lain bagi pemilih partai tersebut adalah figurnya pindah partai masing-masing 18,2%, 25%, 16,7% dan 20%. Sedangkan responden yang merubah pilihan partai karena alasan kecewa dengan partai sebelumnya terdapat pada responden yang memilih Partai Golkar, Demokrat, PPP, PDIP dan Hanura (Tabel 3.8).

Tabel 3.9

Distribusi Responden menurut Alasan untuk Memilih Partai yang Sama Tahun 2004 dan 2009

Partai	Alasan Memilih Partai Sama							
	Anggota keluarga saya sebagai caleg partai tersebut		Saya dan keluarga adalah pemilih loyal partai		Program partai lebih baik dari lain		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	2	10.5	17	89.5	-	-	19	100
Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP	-	-	3	100	-	-	3	100
PDIP	-	-	3	100	-	-	3	100
PAN	1	100	-	-	-	-	1	100
PKS	-	-	1	100	-	-	1	100
PBR	-	-	-	-	1	100	1	100

Responden yang konsisten atau tetap memilih partai yang sama pada Pemilu Legislatif Kota Ternate antara 2004 dan 2009, yaitu didominasi oleh responden yang memilih Partai Golkar. Dari total responden yang memilih Golkar antara pemilu 2004 dan 2009, sebanyak 89,5% responden mempunyai alasan bahwa responden adalah pemilih yang loyal terhadap partai tersebut (Tabel 3.9).

Selain Golkar, partai lain yang memiliki alasan sebagai pemilih yang loyal yaitu PPP dan. Ketiga partai tersebut memiliki pemilih yang loyal mempunyai kaitan dengan usia dan pengalaman partai tersebut. Karena Golkar, PPP dan PDIP adalah partai lama yang memiliki pengalaman politik dimasa Orde Baru maupun Reformasi. Kemampuan ketiga partai tersebut untuk tetap eksis di dua periode politik berdampak pada jumlah pemilih yang loyal, sedangkan sebagian besar

pemilih yang loyal terhadap partai baik Golkar, PPP maupun PDIP adalah mereka yang berumur lebih dari 41 tahun.

Dengan memperhatikan pilihan partai dan kelompok umur dan pemilih partai (Tabel 3.4 dan Tabel 3.9), maka dapat ditemukan bahwa umur berkaitan dengan loyalitas terhadap partai. Hubungan antara umur dan loyalitas terhadap partai, yaitu bagi mereka yang berumur antara 41-72 tahun, tentunya memiliki perbedaan pengalaman dengan mereka yang berumur 25-20 tahun dan 17-24 tahun. Perbedaan pengalaman tersebut, berhubungan dengan perbedaan sikap dan penilaian terhadap partai. Misalnya rata-rata pemilih yang loyal dari Golkar adalah mereka yang telah berusia kategori tua, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pengalamannya di masa Orde Baru, dimana pada pemilu Orde Baru responden selalu memilih Golkar dan perilaku itu sulit untuk berubah. Asumsi yang lain, bahwa responden yang berusia muda, rata-rata masih dalam proses mencari bentuk, oleh karena itu mudah berubah termasuk dalam pilihan partai, sedangkan disisi lain mereka yang dalam kategori tua telah berada pada fase yang mapan karena mempunyai pengalaman.

Selain karena alasan loyalitas terhadap partai, alasan lain yang mendorong responden untuk memilih partai yang sama antara tahun 2004 dan 2009 yaitu karena alasan adanya anggota keluarga berstatus sebagai caleg, seperti pada pemilih Golkar dan PAN. Kedekatan dengan caleg dengan alasan kekeluargaan tidak berhubungan dengan kelompok umur pemilih, akan tetapi berhubungan geneologis pemilih.

3.4 Kesimpulan

Kesimpulan dari perilaku memilih masyarakat pada pemilu legislatif Kota Ternate tahun 2009, dengan menganalisis kecenderungan memilih partai dan caleg serta konsistensi pemilih, yaitu rata-rata pemilih adalah mereka yang dalam kategori berorientasi pada figur partai (*candidate oriented*), baik karena alasan kesamaan identitas dalam bentuk suku, keluarga dan profesi, maupun alasan figur karismatik di partai seperti Sultan dan Boki.

Bagi responden yang beorientasi pada figur atau caleg yang ada dalam partai, faktor utama yang mempengaruhi orientasi tersebut adalah sebesar 33,3% karena hubungan keluarga dengan caleg yang terbentuk dari identitas suku dan profesi. Faktor lainnya yaitu adanya ketokohan caleg dan faktor Sultan dan Boki masing-masing 17,5% dan 15%. Faktor ketokohan yang dimaksud adalah pengalaman dan kemampuan caleg dalam politik, pemilih yang menjadikan faktor ini sebagai faktor utama adalah pemilih partai Golkar. Sedangkan pemilih yang menjadikan Sultan dan Boki sebagai faktor yang berpengaruh dalam memilih partai, memiliki kecenderungan memilih Partai Demokrat karena Boki sebagai caleg partai tersebut.

Konsistensi pemilih dalam masyarakat adat Ternate dalam memilih partai terhitung rendah, karena sebagian besar pemilih mengatakan memilih partai yang sama antara Pemilu 2004 dan 2009. Sedangkan responden mengaku memilih partai yang sama, sebagian besar responden mengatakan sebagai pemilih yang loyal terhadap partai dan dari jumlah tersebut, sebanyak 89,5% adalah pemilih dari Partai Golkar.

Responden yang merubah pilihan antara tahun 2004 dan 2009, sebanyak 61,8% responden memiliki alasan “mengikuti pilihan Sultan”. Maksud dari mengikuti pilihan Sultan dan Boki, yaitu mengikuti pilihan politik Sultan yang tidak lagi menjadi bagian dari PDK dan mendukung Partai Demokrat karena Boki berada di partai tersebut. Alasan lain bagi mereka yang merubah pilihan, yaitu mengatakan kecewa dengan pilihan partai sebelumnya, mengikuti caleg/figur yang pindah partai dan sebagai caleg partai.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa karakteristik memilih dalam masyarakat adat adalah *candidate oriented*, kecenderungan tersebut berkaitan dengan budaya politik patron-klien dalam masyarakat adat. Menguatnya budaya politik patron-klien, yang berorientasi pada figur, serta tidak diimbangi oleh penguatan fungsi-fungsi partai dalam bentuk rekrutmen dan sosialisasi politik yang berkelanjutan pada masyarakat adat.

Berdasarkan alasan pemilih yang merubah pilihan antara Pemilu tahun 2004 dan 2009, responden mengaku sebagai caleg partai persentasenya cukup tinggi,

Universitas Indonesia

hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat terjadi rekrutmen politik. Akan tetapi rekrutmen yang terjadi hanya sebatas memperoleh tujuan sementara, karena rekrutmen yang ada hanya sebatas memenuhi prasyarat dan tidak lahir dari program yang terencana.



BAB 4

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE

4.1 Faktor Sosiologis Pemilih Masyarakat Adat

Secara teoritis faktor sosiologis adalah variabel independen yang berpengaruh dalam perilaku memilih dalam setiap pemilihan umum, faktor sosiologis berhubungan dengan latar belakang sosial, misalnya demografi, sosial ekonomi, agama, dan pendidikan.⁸³ Dalam penelitian perilaku memilih masyarakat adat Ternate, faktor-faktor sosiologis yang diteliti adalah demografi dan status sosial ekonomi, keterlibatan dalam adat, dan sosialisasi politik dalam keluarga.

4.1.1 Demografi dan Status Sosial Ekonomi

Faktor demografi dan status sosial ekonomi, seperti kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, etnis dan agama, sebagai salah satu unit analisis dalam analisa perilaku memilih. Pada kelompok umur terdapat perbedaan kepentingan dan perilaku memilih antara mereka yang dalam kategori muda dan kategori tua⁸⁴ atau pemilih pemula (17-24 tahun), pemilih menengah (25-40 Tahun) dan mereka yang sudah tua (> 41 tahun). Studi di beberapa negara menemukan, bahwa mereka yang berumur muda, miskin dan tidak berpendidikan memiliki kecenderungan untuk tidak tertarik pada dunia politik.⁸⁵

Penelitian ini menggunakan penarikan sampel secara *purposive* di enam kelurahan dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara dan Ternate Tengah yang merupakan basis masyarakat Adat Ternate, yang ditarik secara random ditingkat RT dan RW. Distribusi responden berdasarkan kelompok umur menunjukkan sebagian besar responden berumur diatas 41 tahun atau sebanyak 55% dari total responden. Mereka yang berada dalam kelompok umur 25-40 tahun

⁸³ Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hal. 145-147.

⁸⁴ Lihat Hugh A.Bone dan Austin Renney,*op.cit.*, hal.19-20.

⁸⁵ Richard Nieme dan Herbert F. Weisberg, *op.cit.*, hal.73.

sebanyak 40%, sedangkan responden yang dalam kategori pemilih pemula atau berusia 17-24 tahun hanya 5% (Tabel 4.1).

Dengan memperhatikan distribusi umur, dimana ada 55% masyarakat adat Ternate adalah mereka yang memiliki pengalaman minimal 4-5 kali mengikuti pemilu. Asumsikan dari jumlah tersebut adalah 55% responden yang memiliki pengalaman memilih yang cukup dalam mengambil keputusan dalam memilih partai maupun caleg dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009. Hal tersebut juga dapat bermakna sebagian besar responden yaitu mereka yang telah memiliki pengalaman memilih di tiga masa kepemimpinan, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

Tabel 4.1

Distribusi Responden menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Total (%)	Jenis Kelamin	
		Laki- Laki (%)	Perempuan (%)
> 41	55	32,5	22,5
25-40	40	15,8	24,2
19-24	5	1,7	3,3
N = 120	100		

Faktor demografi dan status sosial ekonomi yang kedua adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil pengolahan data dari survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah lulusan SLTA yaitu sebanyak 57,5%, kemudian responden dengan lulusan SD sebanyak 10,8%, disusul tingkat pendidikan sarjana, SLTP, dan Diploma masing-masing 10%, 9,2%, dan 5,%. Sedangkan mereka yang mengaku tidak pernah sekolah dan mereka yang pernah sekolah SD tetapi tidak sampai mendapat ijazah, masing-masing sebanyak 2,5% dan 5,% (Tabel 4.2).

Tingkat pendidikan adalah indikator kualitas pendidikan formal seseorang, berdasarkan indikator tersebut maka responden dalam masyarakat adat Ternate relatif lebih baik dari kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Rata-rata provinsi untuk tingkat Diploma dan Universitas hanya 2,93%, sedangkan dalam masyarakat adat Ternate

mencapai 15%. Untuk tingkat SLTA rata-rata provinsi hanya 17,3% dan Masyarakat Adat Ternate 57,5%.

Asumsi dengan melihat distribusi tingkat pendidikan masyarakat adat Ternate, maka kaitannya dengan perilaku memilih, yaitu pemilih yang rasional, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh pada tingkat pola pikir, sehingga akan berdampak pada cara ia dalam menyikapi sesuatu termasuk perilaku dalam memilih partai dan caleg.

Tabel 4.2

Distribusi Responden menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	N	Persentase (%)
Tidak pernah sekolah	-	2,5	3	2.5
Tidak tamat SD	2,5	2,5	6	5.0
Tamat SD	5,0	5,8	13	10.8
Tamat SLTP	5,0	4,2	11	9.2
Tamat SLTA	30,8	26,7	69	57.5
Tamat Akademi/ Diploma	1,7	3,3	6	5.0
Tamat S1-atau lebih tinggi	5,0	5,0	12	10.0
Total (N)			120	100

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan seseorang pemilih dalam mengelola informasi dan mengevaluasi kandidat maupun partai yang paling tepat untuk mewakili kepentingannya.⁸⁶ Berdasarkan studi Saiful Mujani, bahwa pendidikan berhubungan secara signifikan terhadap ketertarikan seseorang pada politik, keterlibatan dalam partai serta ketertarikan dalam membicarakan dan mencari informasi politik.⁸⁷ Tingkat Pendidikan berhubungan dengan ketertarikan pada politik, sehingga pemilih dengan ragam tingkat pendidikan, akan beragam

⁸⁶ Richar Lau dan David P Redlaws. *op.cit.*, hal. 22.

⁸⁷ Baca Desertasi Saiful Mujani, *op.cit.*, hal. 230.

pula informasi yang diperoleh guna mengevaluasi kandidat yang akan dipilih pada hari pemungutan suara.

Pilihan partai berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa pemilih yang berpendidikan SLTA rata-rata mendominasi untuk setiap pemilih partai, yaitu sebesar 57,5% responden berpendidikan SLTA. Responden yang berpendidikan tinggi yaitu sarjana dan diploma masing-masing 15,2% dan 12,1% adalah memilih Golkar. Jumlah responden yang berpendidikan tinggi didominasi oleh responden yang memilih Golkar, mereka yang berpendidikan tinggi biasanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Ternate, kecenderungan tersebut diasumsikan terpengaruh oleh Walikota Ternate yang diketahui berasal dari Partai Golkar (Tabel 4.3).

Pemilih Partai Demokrat, PKS, PPP, PDIP dan PAN yang berpendidikan tinggi relatif kecil jika dibandingkan dengan pemilih Golkar. Rata-rata pemilih Partai Demokrat dan partai lain selain Golkar adalah mereka yang berpendidikan SLTA, seperti pemilih Partai Demokrat sebesar 57,9% hingga jenjang yang lebih rendah, seperti SD dan SLTP masing-masing 13,2%.

Tabel 4.3

Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Partai	Pendidikan Terakhir															
	Tidak pernah sekolah		Tidak Tamat SD		SD		SLTP		SLTA		Akademi/diploma		S1/ lebih tinggi		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar		-	3	9.1	4	12.1	2	6.1	15	45.5	4	12.1	5	15.2	33	100
Demokrat	2	5.3	2	5.3	5	13.2	5	13.2	22	57.9		-	2	5.3	38	100
PPP	1	14.3		-	1	14.3		-	4	57.1	1	14.3	0	-	7	100
PDIP		-	1	11.1	1	11.1	2	22.2	4	44.4	1	11.1	0	-	9	100
PAN		-		-		-	1	14.3	5	71.4		-	1	14.3	7	100
PKS		-		-		-		-		-		-	2	100	2	100
PBR		-		-	1	16.7	1	16.7	4	66.7		-	-	-	6	100

Faktor demografi dan status sosial ekonomi yang ketiga, yaitu jenis pekerjaan. Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan, responden yang bekerja pada sektor pertanian dan nelayan baik sebagai penggarap ataupun sebagai pemilik jumlahnya hanya 4,2%. Jumlah mereka yang bekerja di sektor pertanian terhitung kecil, meski dalam PRDB (Produk Regional Domestik Bruto) Kota Ternate, sektor tersebut adalah sektor andalan yang memberikan kontribusi pada PRDB dan bahkan dalam sejarah, Ternate terkenal di manca negara karena kekayaan akan rempah-rempahnya. Mereka yang bekerja di sektor bisnis dengan profesi sebagai pedagang maupun pengusaha jumlahnya relatif tinggi jika dibanding dengan sektor pekerjaan yang lain.

Tabel 4.4

Distribusi Responden menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	N	%
Petani/nelayan penggarap	3	2.5
Petani/ nelayan pemilik	2	1.7
Buruh/tukang	9	7.5
Pedagang kecil	22	18.3
Pensiunan	4	3.3
Pengusaha	17	14.2
PNS	9	7.5
Pegawai Swasta	4	3.3
Profesional (guru,dosen, dokter, dll.)	4	3.3
Ibu rumah tangga	27	22.5
Mahasiswa/pelajar	3	2.5
Tidak bekerja	13	10.8
Lainnya	3	2.5
Total	120	100.0

Responden yang berprofesi sebagai pedagang kecil yaitu sebanyak 18,33%. Pedagang kecil, adalah mereka yang biasanya berjualan dipasar-pasar tradisional

tanpa memiliki toko atau juga mereka yang berprofesi sebagai *dibo-dibo*⁸⁸. Sedangkan disektor bisnis responden yang berprofesi sebagai pengusaha, jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan pedagang kecil, yaitu hanya 14,17%.

Jenis pekerjaan lainnya adalah responden berprofesi sebagai buruh dan tukang, jumlahnya mencapai 7,50%. Sedangkan yang bersifat profesional seperti guru, dosen, pengacara, dokter dan lain-lain jumlahnya relatif kecil hanya 3,33%. Menurut data PRDB Kota Ternate,⁸⁹ jenis pekerjaan pada sektor jasa, adalah yang tertinggi kontribusinya yaitu sebesar 28,69%.

Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa masyarakat adat yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta masing-masing sebesar 7,50% dan 3,33%. Sedangkan mereka yang dalam kategori tidak bekerja, baik pengangguran terbuka yang sedang mencari pekerjaan maupun mereka yang bukan angkatan kerja jumlahnya 10,83%. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pencari kerja terbuka di Kota Ternate yang hanya 7,88% tahun 2009 atau berdasarkan angka nasional yaitu 8,14%.⁹⁰ Karakteristik pekerjaan responden yang paling dominan adalah mereka yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu 22,5%.

Indikator demografi dan status sosial ekonomi yang keempat dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan. Karena ditemukan kesulitan dalam mengukur total pendapatan, maka untuk tujuan penelitian ini, besarnya pendapatan minimal diukur berdasarkan besarnya rata-rata pengeluaran responden perbulan (Tabel 4.5).

⁸⁸ *Dibo-dibo* adalah mereka yang menjual ikan/sayuran secara eceran baik dijual dipasar tradisional ataupun yang berjualan berkeliling kampung, dimana sebelumnya mengambil secara langsung dari nelayan penangkap/ petani pengarang

⁸⁹ Lihat BPS Kota Ternate Ternate Dalam Angka 2009, *op.cit.*, hal. 239.

⁹⁰ *Ibid.*, hal.51 dan lihat Data strategis BPS Tahun 2010, hal. 37.

Tabel 4.5

Distribusi Responden menurut Rata-rata Pengeluaran per Bulan

Rata-rata Pengeluaran (per bulan)	N	Persentase (%)
< 400.000	4	3.3
400.000-800.000	7	5.8
800.001-1.250.000	7	5.8
1.250.001-1.750.000	46	38.3
1.750.001-2.250.000	18	15.0
> 2.250.000	38	31.7
	N= 120	100

Jumlah pendapatan per kapita perbulan adalah dasar yang menjadi indikator seseorang dikatakan miskin atau tidak. Berdasarkan indikator *world bank*, seseorang dikatakan miskin jika pendapatan per hari tidak mencapai dua dollar AS. Dengan menggunakan indikator ini, maka responden dalam kategori miskin hanya 3,3% (Tabel 4.5), angka ini jauh lebih kecil jika dibanding dengan angka kemiskinan untuk tingkat Propinsi Maluku Utara, maupun angka nasional di tahun 2010 masing-masing 9,42% dan 13,33%.⁹¹

Kategori miskin di Indonesia adalah mereka yang hidup di bawah Garis Kemiskinan per bulan, pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp 211.726 per bulan.⁹² Dengan menggunakan parameter tersebut, akan sulit untuk menemukan penduduk miskin di Kota Ternate ataupun di lingkup masyarakat adat Ternate. Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran rumah tangga per bulan komunitas masyarakat adat relatif tinggi, dimana terdapat 31,7% responden dengan pengeluaran di atas Rp.2.250.000; 15,0% responden dengan pengeluaran diantara Rp.1.750.001 sampai dengan Rp.2.250.000, dan distribusi responden yang paling besar yaitu dengan pengeluaran per bulan 1.250.001-1.750.000, sebesar 38,3%. Sedangkan mereka yang pengeluaran per bulannya antara Rp. 400.001-1.250.000, jumlahnya hanya 11,6%.

⁹¹ Baca Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS edisi ke-7 Desember 2010, hal. 81.

⁹² *Ibid.*, hal. 81

Dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran, secara teoritis bahwa mereka yang miskin dan berpendapatan rendah tidak memiliki perhatian atau kepedulian terhadap politik. Maka masyarakat Ternate secara teoritis adalah rata-rata pemilih yang aktif, karena hanya 3,3% yang hidup dengan pengeluaran lebih kecil dari Rp. 400.000 per bulan. Dikatakan aktif, karena memiliki ketrampilan pada politik sehingga akan berusaha memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya untuk mengevaluasi kandidat yang akan dipilih.

Indikator demografi yang kelima yaitu Etnis. Masyarakat adat Ternate adalah mereka yang berada dalam wilayah kesultanan, terikat secara struktur dan kultur dengan Kesultanan Ternate. Dengan definisi tersebut, maka masyarakat adat tidak hanya sebatas pada mereka yang ber-etnis Ternate, akan tetapi ada beberapa etnis yang dalam sejarah masih termasuk dalam konfederasi *Moluku Kei Raha* yaitu Kesultanan Jailolo, Tidore, Ternate dan Bacan yang secara geneologis mereka bersaudara. Sehingga masyarakat adat tidak hanya sebatas etnis Ternate, akan tetapi etnis lain seperti Tidore, Makian, Tobelo, Galela dan Sanana.

Tabel 4.6

Distribusi Responden menurut Etnis per Kelurahan

Kelurahan	Etnis (%)						Total Etnis Ternate (%)
	Ternate	Tidore	Makian	Tobelo	Galela	Sanana	
Akehuda	13,3 (N=16)	-	2,5 (N=3)	0,8 (N=1)	-	-	96,7
Dufa-Dufa	16,7 (N=20)	-	-	-	-	-	100
Kampung Makassar Timur	15 (N=18)	0,8 (N=1)	-	0,8 (N=1)	-	-	98,4
Sallahuddin	13,3 (N=16)	1,7 (N=2)	1,7 (N=2)	-	-	-	96,6
Soa Sio	15,8 (N=19)	-	-	-	0,8 (N=1)	-	99,2
Sangaji	15 (N=18)	-	-	0,8 (N=1)	-	0,8 (N=1)	98,4
Jumlah N=120	89,2 (N=107)	2,5 (N=3)	4,2 (N=5)	2,5 (N=3)	0,8 (N=1)	0,8 (N=1)	100 (N=120)

Dalam penelitian ini ada enam kelurahan yang menjadi sampel dari komunitas adat Ternate, enam kelurahan tersebut dipilih secara *purposive* dan tiap kelurahan diambil 20 sampel secara random untuk tingkat RT dan KK. Hasil perolehan dari 120 sampel di enam kelurahan, bahwa etnis Ternate sebagai etnis dominan dari kelurahan yang terpilih dengan total 89,2% (Tabel 4.6). Sedangkan etnis lain seperti Tidore, Makian/Bacan, Tobelo, Galela dan Sanana, masing-masing 2,5%, 4,2%, 2,5%, 0,8% dan 0,8%. Dengan melihat komposisi etnis per kelurahan, maka responden dengan etnis Ternate tetap sebagai etnis dominan, seperti di Kelurahan Dufa-Dufa (100%). Masyarakat adat Ternate di Dufa-Dufa rata-rata mengabdikan di Kesultanan Ternate sebagai prajurit, mereka juga secara genealogi berasal dari kelompok klan *heku*.⁹³

Indikator keenam yaitu agama, berdasarkan studi Norris, bahwa keyakinan agama memainkan peran penting dalam pemilu pada kebanyakan masyarakat tradisional di Eropa Barat.⁹⁴ Sedangkan konteks Pemilu 2009 terutama pemilihan presiden, menurut Mujani dan Liddle, faktor keyakinan agama dianggap kurang berpengaruh dengan indikator hampir pada semua Partai Islam mengalami penurunan suara dalam Pemilu 2009.⁹⁵ Untuk tujuan penelitian ini, variabel agama juga tidak dianggap berpengaruh secara signifikan karena masyarakat adat Ternate mayoritas beragama Islam, meski ada komunitas adat yang beragama Kristen tetapi jumlahnya sangat kecil.

4.1.2 Keterlibatan Dalam Adat

Kelompok marga/soa

Keterlibatan dalam adat adalah salah satu variabel sosiologis yang dianalisis, sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk memahami pola perilaku masyarakat adat pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Yang dimaksud dengan keterlibatan dalam adat yaitu tingkat pengetahuan atau keterlibatan,

⁹³ *Heku* adalah salah satu dari empat kelompok klan/marga (*Soa sio Cim, Heku dan sangaji*) yang secara geografis berada di bagian utara dari kesultanan Ternate dan secara fungsional sebagai prajurit di Kesultanan Ternate.

⁹⁴ Baca Norris, *op.cit.*, hal. 113.

⁹⁵ Baca Saiful Mujani dan William Liddle "Personality partes and Voter" hal. 39 di download di <http://www.jurdil.pemilu04downloadpress-release-april-6-i.pdf>

terhadap kelompok soa/marga, komunitas awal Ternate, struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, ritual-ritual adat, falsafah adat, dan pengetahuan tentang stratifikasi dalam masyarakat adat.

Tabel 4.7

Distribusi Responden menurut Tingkat Pengetahuan mengenai Kelompok Marga

Marga	Pengetahuan	N	%	Termasuk Kelompok Marga
Soa sio	Tahu	76	63.3	18 % (N=9)
	Tidak tahu	44	36.7	
Sangaji	Tahu	78	65	25 % (N=12)
	Tidak tahu	42	35	
Cim	Tahu	77	64.2	14.6 (N=7)
	Tidak tahu	43	35.8	
Heku	Tahu	74	61.7	41.7 % (N=20)
	Tidak tahu	46	38.3	

Faktor keterlibatan dalam adat yang pertama, yaitu pengetahuan tentang kelompok marga/klan, kelompok klan atau marga pada masyarakat adat juga sering disebut sebagai *soa* dalam bahasa Ternate, yang berarti kampung. Keempat *soa* tersebut yaitu *Soa Sio*, *Sangaji*, *Cim* dan *Heku* yang menjadi dasar pembentukan masyarakat adat Ternate. Selain itu, keempat marga tersebut menjadi dasar pembentukan 41 *soa* yang ada dalam masyarakat adat Ternate.

Seiring dengan imperialisme dan integrasi nasional, fungsi dan peran *soa* berkurang karena Kesultanan Ternate tidak lagi menjadi satu-satunya kekuasaan untuk mengatur masyarakat Ternate, akan tetapi ada kekuasaan lain yang mengatur Kesultanan dan Kerajaan di seluruh nusantara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan terbatasnya kesultanan serta *soa* sebagai salah satu lembaganya, maka masyarakat Ternate asli ataupun pendatang tidak lagi terfokus pada hal tersebut dan mulai memudar. Sebagai contoh, sebanyak 61,7% sampai 65% responden mempunyai pengetahuan atau tahu, mengenai *soa* atau kelompok

marga/klan (Tabel 4.7), dengan rata-rata responden sudah berumur >40 tahun. Dari 61,7-65% responden yang mengetahui tentang *soa* tersebut, hanya sekitar 40% dari mereka yang mengetahui asal-usul keturunannya, bahwa mereka bersumber dari kelompok klan/marga sebagai cikal-bakal *soa*.

Dari jumlah responden yang mengetahui asal usul keturunannya menurut marga/*soa* tertentu, 41,7% dari total responden mengetahui bahwa mereka berasal dari *soa/marga heku*. *Soa heku* adalah marga/klan yang paling besar jumlahnya, mereka menempati bagian Utara Kesultanan Ternate, yang biasanya sebagai *Alfiris* maupun *Kepala Baro-Baro*.⁹⁶ Sedangkan *soa* yang lain seperti *cim*, *sangaji*, dan *soa sio* jumlahnya masing-masing 14,6%, 25%, dan 18,8% (Tabel 4.7).

Tabel 4.8

Distribusi Responden menurut Kecenderungan Kelompok Marga terhadap Parpol

Partai	Kelompok Marga									
	Soa sio		Sangaji		Cim		Heku		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	1	14.3	3	42.9	0	-	3	42.9	7	100
Demokrat	6	26.1	0	-	3	13-	14	60.9	23	100
PPP	1	50	0	-	1	50	0	-	2	100
PDIP		-	3	60	1	20	1	20	5	100
PAN		-	1	50	1	50		-	2	100

Berdasarkan kelompok marga dan kecenderungan memilih partai, pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata kelompok marga tinggi untuk Partai Demokrat, kecuali untuk kelompok marga *sangaji*. Responden yang mengaku sebagai kelompok marga *heku*, *cim* dan *soa-sio* masing-masing 60,9%, 13% dan 26,1% adalah pemilih Demokrat. Partai lain yang mendapat dukungan besar dari kelompok marga adalah Golkar dan PDIP. Untuk Golkar mendapat dukungan dari

⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Noh Ali, salah satu pimpinan *Alfiris* di kelurahan dufa-dufa: bahwa “*Alfiris* dan *Baro-Baro* adalah Tentara yang berpungsi sebagai petugas keamanan maupun pengawal khusus Sultan Ternate. *Alfiris* dan *Baro-Baro* adalah *bobato dunia* dengan pimpinan Mayor Ngofa, atasan selanjutnya yaitu *Kapten Ngofa*, *Letnan Ngofa* dan pimpinan tertinggi yaitu *Kapita laut*.”

marga *heku*, *sangaji* dan *soa-sio*, masing-masing 42,9%, 42,9% dan 14,4%. Sedangkan PDIP mendapat dukungan dari *heku* sebesar 20% dan *sangaji* sebesar 60%.

Marga *heku* adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan kesultanan, karena tugas keamanan (tentara) seperti pengawalan Sultan dan penjagaan bergilir menjadi tanggung jawab *heku* di Kesultanan Ternate. Intensitas hubungan antara mereka yang bermarga *heku* dengan pihak Kesultanan, berpengaruh terhadap kedekatan Boki yang merupakan bagian dari partai Demokrat kepada pemilih yang bermarga *heku*, sehingga sebagian besar mereka yang bermarga *heku* memiliki kecenderungan pada Partai Demokrat dibanding dari partai lain.

Kecenderungan kelompok marga pada partai lain seperti, Golkar dan PDIP diasumsikan berhubungan dengan faktor psikologis pemilih dan bukan karena hubungan fungsional kelompok marga tersebut. Misalnya pemilih PDIP berdasarkan kelompok marga bersumber dari wilayah yang dimenangkan oleh PDIP yaitu di Kelurahan Akehuda. Sedangkan untuk responden yang memilih Golkar berdasarkan kelompok marga adalah mereka yang memilih merasa dekat dengan Partai Golkar tersebut atau pemilih sebagai loyal.

Seperti pada tabel 4.8, responden yang mengaku sebagai kelompok marga *sangaji* tidak memberikan dukungan pada Partai Demokrat seperti pada dukungan kelompok marga lain yang tinggi atas partai tersebut. Marga *sangaji* secara fungsional di Kesultanan Ternate, yaitu kelompok marga yang merupakan perwakilan dari daerah penaklukan, seperti wilayah Kepulauan Sula. Oleh karena itu mereka yang keturunan marga *sangaji* pada Pemilu 2009 yang muncul bukan identitas adat, akan tetapi identitas etnis karena mereka lebih cenderung pada Golkar, dimana figur partai tersebut kebanyakan dari Etnis Sanana dari Kepulauan Sula.

Komunitas awal Ternate

Sebelum Kesultanan Ternate dikenal dimanca negara yang mengundang ketertarikan bangsa Arab, Cina dan Eropa untuk tinggal dan menjalin hubungan perdagangan serta praktek monopoli dalam hal rempah-rempah, Ternate dihuni

Universitas Indonesia

oleh empat komunitas awal yaitu *Tobona*, *Tabo*, *Tabanga* dan *Toboleu*. Komunitas tersebut merupakan eksodus dari Kerajaan Jailolo sebagai akibat konflik internal yang ada di sana.⁹⁷

Secara geografis posisi keempat komunitas awal tersebut tidak berubah, namun yang terjadi adalah bertambahnya para pendatang dari luar Ternate, ataupun terjadinya perkawinan silang, sehingga mengalami kesulitan untuk memberi batas yang akurat untuk mengenali komunitas tersebut. Dampak lain dari percampuran komunitas awal tersebut dengan komunitas dari luar, yaitu pada generasi berikutnya yang tumbuh dan berkembang dalam situasi yang multikultural.

Tabel 4.9

Distribusi Responden yang Memiliki Hubungan Keturunan dengan Komunitas Awal

Komunitas Awal Ternate	Pengetahuan	N	%	Termasuk keturunan
TUBO	Tahu	77	64.2	10.3% (N=3)
	Tidak tahu	43	35.8	
TABANGA	Tahu	77	64.2	34.5% (N=10)
	Tidak tahu	43	35.8	
TOBOLEU	Tahu	77	64.2	41.4% (N=12)
	Tidak tahu	43	35.8	
TOBONA	Tahu	77	64.2	13.8 % (N=4)
	Tidak tahu	43	35.8	
		Total N= 120		Total N= 29

Mereka yang mengidentifikasi diri memiliki hubungan keturunan dengan komunitas awal Ternate, tersebar tidak merata untuk keempat komunitas yaitu *Tobo*, *Tabona*, *Tabanga* dan *Toboleu*. Hasil survei menunjukkan, *Toboleu* dan *Tabanga* berada pada urutan teratas masing-masing 41,4% dan 34,5%, sedangkan *Tobo* hanya 10,3% dan *Tobona* 13,8% (Tabel 4.9). Komunitas *Toboleu*, *Tabanga* dan *Tabo* adalah komunitas yang menempati bagian utara Kesultanan Ternate, atau secara administratif komunitas tersebut berada di Kecamatan Ternate Utara

⁹⁷ Adnan Amal, *op.cit.*, hal.51.

dan Ternate Tengah. Untuk komunitas *Tobona* mereka berada di bagian Selatan Kesultanan Ternate, yang secara administratif pemerintahan berada di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau.

Kecenderungan memilih partai berdasarkan pengetahuan responden mengenai hubungan silsilah dengan komunitas awal Ternate, menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu rata-rata mereka yang mengetahui silsilah komunitas awal, memberikan dukungan kepada Partai Demokrat, Golkar, PPP dan PAN. Dukungan keturunan dari komunitas awal tersebut tetap tinggi untuk Partai Demokrat. Responden yang memahami asal-usul keturunannya adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengetahui sejarah, karena sejarah komunitas awal tersebut sekitar tujuh abad yang lalu dan waktu tersebut bukan waktu yang singkat. Oleh karena itu yang mengetahui asal keturunannya adalah mereka yang memiliki keterlibatan yang erat terhadap adat.

Berdasarkan distribusi pilihan partai menurut asal komunitas yaitu responden yang memiliki hubungan keturunan dengan *tabanga* mendominasi pemilih Demokrat sebesar 50%. Dalam perkembangannya, *tabanga* merupakan asal keturunan utama dari marga *heku*, sehingga terlihat jika komunitas *tabanga* menjadi pendukung utama Demokrat, karena posisinya sama seperti pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk pemilih Golkar terbesar berdasarkan kelompok marga yaitu 71,4% dari *toboleu*, hal tersebut sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu responden kelompok marga *sangaji* yang menjadi pendukung partai tersebut. Hal serupa juga terjadi pada PAN yang didukung oleh *tobona* dan *toboleu*, yang juga bermakna *sangaji* dan *cim* pada kelompok marga (Tabel 4.10).

Tabel 4.10

Distribusi Responden menurut Kecenderungan Komunitas Awal dengan Partai Pilihan

Partai	Hubungan dengan Salah Satu Komunitas									
	Tubo		Tobona		Tabanga		Toboleu		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	1	14.3	0	-	1	14.3	5	71.4	7	100
Demokrat	2	12.5	3	18.8	8	50	3	18.8	16	100
PPP	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100
PDIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAN	-	-	1	50	-	-	1	50	2	100

Struktur Pemerintahan Adat

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, Sultan diposisikan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi yang juga dikenal sebagai *Kolano*. Untuk menjalankan pemerintahannya Sultan dibantu oleh *Jogugu*, *Kapita laut*, *Kapita Perang*, *Hukum Soa Sio*, *Hukum Sangaji* dan *Tulilamo*, mereka membantu Sultan dalam urusan dunia, sehingga secara umum fungsi-fungsi tersebut disederhanakan dengan nama *bobato dunia*.

Untuk menjalankan urusan keagamaan, Sultan dibantu pula oleh *bobato akhirat* yang terdiri dari, *Jo Kalem* sebagai pimpinan dan dibantu oleh lima orang Imam yaitu Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, Imam Moti, serta enam orang Khatib yaitu Khatib Jiko, Khatib Jawa, Khatib Sangaji, Khatib Moti dan Khatib Bangsa.⁹⁸ Selain kedua struktur tersebut, ada lagi struktur lain yang memiliki fungsi sebagai legislatif dalam format pemerintahan moderen, yaitu *bobato-18*. Fungsi *bobato-18* yaitu melantik Sultan yang baru dan mengawasi jalannya pemerintahan Kesultanan, *bobato-18* adalah merupakan dewan perwakilan yang diambil dari perwakilan *soa soa* (kampung).

⁹⁸ Baca Rinto Taib, *op.cit.*, hal. 47.

Tabel 4.11

Keterlibatan dalam Struktur Pemerintahan Adat Ternate

Struktur Pemerintahan Adat	Pengetahuan Struktur Adat		Keterlibatan dalam Struktur	Keterlibatan Anggota Keluarga yang Lain dalam Struktur
	Tahu	Tidak Tahu	%	%
Bobato Dunia	68,3 % (N=82)	31,7% (N=38)	8,3 (N=10)	35 (N=42)
Bobato Akhirat	68,3 % (N=82)	31,7% (N=38)	6,7 (N=8)	14,2 (N=17)
Bobato-18	67,8% N=81)	32,5% N=39)	2,5 (N=3)	1,7 (N=2)
	Toal N=120		17,5 (N=21)	50,8 (N=61)

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan politik dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), turut berdampak pada perubahan posisi kerajaan dan kesultanan di nusantara. Perubahan yang dimaksud, yaitu otoritas kerajaan dan kesultanan atas masyarakatnya tidak lagi sama seperti sebelum NKRI. Perubahan tersebut juga berdampak pada Kesultanan Ternate, dimana pengaturan dan pengurusan masyarakat adat, tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kesultanan Ternate, akan tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab NKRI.

Dampak perubahan selanjutnya yaitu berkurangnya perhatian masyarakat adat, akan lembaga Kesultanan Ternate yang sebelumnya menjadi pengatur dan pengurus masyarakat Ternate sebelum NKRI. Dari hasil survei menunjukkan (Tabel 4.11), hanya 68,3% responden yang mengetahui atau pernah mendengar *bobato dunia* dan *bobato akhirat*, dan 67,8% responden pernah mendengar yang namanya *bobato-18*.

Dari sejumlah responden pada Tabel 4.11 yang mengetahui mengenai struktur pemerintahan Kesultanan Ternate, hanya 17,5% yang mengatakan terlibat dalam struktur tersebut. Dari 17,5% yang mengatakan terlibat dalam struktur,

Universitas Indonesia

8,3% yang mengaku terlibat dalam *bobato dunia*, dan 6,7% terlibat dalam *bobato akhirat*, serta 2,5% terlibat dalam *bobato-18*. Selain keterlibatan responden dalam struktur keterlibatan keluarga dapat di ketahui juga pada tabel 4.11, dari 50,8 % responden yang mengetahui keluarga atau orang tua mereka terlibat dalam struktur tersebut, terdiri dari 35% *bobato dunia*, 14,2% mengatakan keluarga mereka sebagai *bobato akhirat*, dan 1,7% mengatakan sebagai *bobato-18*.

Perilaku memilih berdasarkan struktur pemerintahan adat, menunjukkan bahwa dukungan untuk Partai Demokrat tetap dominan untuk semua struktur pemerintahan adat yaitu *bobato dunia*, *akhirat* dan *bobato-18*. Responden atau keluarga responden yang terlibat dalam *bobato dunia*, konsisten memberikan dukungan pada Partai Demokrat, masing-masing 27,3% mereka yang mengaku terlibat dan 28,3% responden yang mengaku keluarga mereka terlibat dalam struktur tersebut (Tabel 4.12).

Selain *bobato dunia*, dukungan untuk Demokrat tetap tinggi jika dibandingkan dengan partai lain dari struktur *bobato akhirat* dan *bobato-18*. Mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan adat dan cenderung memilih Partai Demokrat diasumsikan terkait dengan identitas adat. Karena keberadaan Boki dan Dano Abdullah Tahir sebagai bagian dari Partai Demokrat, diterjemahkan sebagai identitas adat bagi masyarakat adat Ternate.

Selain Partai Demokrat, partai lain yang mendapat dukungan berdasarkan struktur adat secara signifikan adalah Golkar dan PDIP. Dukungan yang signifikan terhadap Golkar dan PDIP dari pemilih yang terlibat dalam struktur pemerintahan adat, tidak berhubungan dengan identitas adat, karena kedua calon legislatif (caleg) dari kedua partai tersebut tidak terlibat dalam struktur pemerintahan adat maupun pada golongan elit masyarakat adat (*Jou dano Soangare*). Oleh karena itu ada faktor lain yang mempengaruhi dukungan tersebut, faktor yang dimaksud adalah kedekatan pemilih (*party identification*) dengan Golkar dan ikatan kekeluargaan dari caleg PDIP. Karena rata-rata pemilih Golkar adalah pemilih loyal dan pemilih PDIP adalah karena alasan hubungan kekeluargaan dengan caleg.

Tabel 4.12

Distribusi Responden menurut Keterlibatan dalam Struktur Pemerintahan Adat dan Pilihan Partai

Partai	Termasuk Struktur			Keterlibatan Keluarga dalam Struktur		
	Bobato Dunia	Bobato Akhirat	Bobato-18	Bobato Dunia	Bobato Akhirat	Bobato-18
Golkar	18.2% (N=4)	9.1% (N=2)	-	17.0% (N=9)	5.7% (N=3)	-
Demokrat	27.3% (N=6)	18.2% (N=4)	9.1% (N=2)	28.3% (N=15)	15.1% (N=8)	1.9% (N=1)
PPP	-	-	4.5% (N=1)	1.9% (N=1)	1.9% (N=1)	-
PDIP	-	9.1% (N=2)	-	3.8% (N=2)	1.9% (N=1)	-
PAN	-	-	-	1.9% (N=1)	-	-
PKS	-	-	-	-	1.9% (N=1)	-
PBR	-	-	-	3.8% (N=2)	-	-
	N=53			N=22		

Falsafah Adat

Keberlangsungan suatu tatanan dari generasi ke generasi sangat tergantung pada kemampuan generasi pendahulu dalam menginternalisasi nilai-nilai pada generasi mendatang. Falsafah adalah salah satu tata nilai untuk menjaga keberlangsungan kehidupan harmonis dalam masyarakat. Masyarakat adat Ternate yang bertahan sekitar tujuh abad, memanfaatkan falsafah adat sebagai prinsip kehidupan bersama.

Berdasarkan sejarah, Ternate adalah gabungan empat komunitas awal yaitu *tubo*, *tobona*, *tabanga* dan *tobelue*, komunitas tersebut mengangkat pemimpin yang diberi gelar sebagai *kolano* sekitar tahun 1257. Setelah masuknya Islam, Sultan Zainal Abidin melakukan Islamisasi termasuk mengganti gelar *kolano* dengan Sultan. Jika kita hendak menghitung mundur, maka Ternate adalah salah satu kota tertua di Indonesia yaitu umurnya sekitar 754 tahun. Selain nama Ternate sebagai kota dalam struktur pemerintahan modern, Ternate dalam versi

Universitas Indonesia

struktur pemerintahan tradisional juga tetap ada yaitu Kesultanan Ternate dengan masyarakat adatnya.

Tabel 4.13

Distribusi Responden menurut Tingkat Pengetahuan mengenai Falsafah Adat

Falsafah Adat	Tahu		Tidak Tahu	
	N	(%)	N	(%)
Jou Se Ngofangare	83	69.2	37	30.8
Adat Se Atorang	88	73.9	31	26.1
Adat Se Kabasarang	83	69.7	36	30.3
Sere Se Duniru	50	41.7	70	58.3
Ngale Seduhu	42	35.0	78	65.0
Cing Se Cingare	39	32.5	81	67.5
N= 120				

Yang menarik dari kesultanan adalah kemampuan untuk tetap eksis secara struktur dengan komunitas adat yang selalu setia, meski tetap berdampingan dengan pemerintahan modern dalam bingkai NKRI. Kemampuan Kesultanan Ternate untuk tetap mendapat dukungan dari masyarakat adat, tidak terlepas pada kemampuan generasi pendahulu dalam memberikan nilai-nilai. Oleh karena itu dalam kehidupan modern, nilai dalam bentuk falsafah tidak dengan mudah ditinggalkan sebagai prinsip yang mengikat dalam masyarakat adat Kesultanan Ternate, akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa falsafah tersebut mulai terkikis modernisasi. Falsafah adat yang dimaksud yaitu *jou se ngofangare*, *adat se atorang*, *adat se kabasarang*, *sere se duniru*, *ngale seduhu*, dan *cing se cingare*.

Meski kesultanan tetap eksis dengan struktur dan nilai dalam bentuk falsafah, akan tetapi tingkat pengetahuan masyarakat adat mengenai falsafah mulai bergeser. Hasil survei mengenai hal tersebut menunjukkan pengetahuan masyarakat adat mengenai falsafah *jou se ngofangare* sebesar 69,2% (Tabel 4.13). Falsafah ini secara sederhana, menjelaskan hubungan antara “penguasa” dan “rakyat” yang merupakan konsep turunan dari hubungan Tuhan sebagai sang “pencipta” dan hamba sebagai yang “dicipta”.

Universitas Indonesia

Pengetahuan responden mengenai falsafah lain, sebanyak 73,9% yaitu falsafah *adat se atorang*, makna dari falsafah ini adalah “sadar diri” atau dapat memposisikan diri⁹⁹, dalam berbagai dimensi kehidupan. Sedangkan pengetahuan akan falsafah *adat se kabasarang*, hanya 69,7%, dan sisanya 30,3% menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Ketiga falsafah adat sebelumnya, dengan tingkat pengetahuan masyarakat adat antara 69-73,9%. Sedangkan tingkat pengetahuan responden mengenai tiga falsafah berikutnya justru berkebalikan, dimana mereka yang mengatakan tidak tahu justru lebih tinggi dengan persentase berkisar 58-67%, yang terdistribusi masing-masing *sere se duniru* 58,3%, *ngale seduhu* 65%, dan *cing se cingare*, 67,5%.

Untuk semua falsafah yang biasa digunakan dalam masyarakat adat Ternate, rata-rata tingkat pengetahuan tertinggi adalah mereka yang memilih Partai Demokrat. Dari 69,2% responden yang mengetahui makna *Jou Se Ngofangare*, 23,3% yang memilih Partai Demokrat, 19,2% memilih Partai Golkar dan selebihnya terdistribusi ke Partai PAN dan PPP masing-masing 3,3%, serta PDIP 4,2% (Tabel 4.14).

Falsafah adat yang lain seperti *adat se atorang*, *adat se kabasarang*, *sere seduniru ngale seduhu*, dan *cing si cingare*, pengetahuan falsafah tersebut tetap didominasi oleh responden yang memilih Partai Demokrat. Dari beberapa indikator keterlibatan adat yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan konsistensi terhadap indikator tersebut yang didominasi oleh responden yang memilih Demokrat. Dari tiga indikator keterlibatan dalam adat yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat pemilih Demokrat dominan disusul Golkar dan PDIP.

⁹⁹ *Ibid.*, hal.78.

Tabel 4.14

**Distribusi Responden menurut Pilihan Partai terhadap
Pengetahuan Falsafah Adat**

Falsafah	Pengetahuan	Golkar		Demokrat		PPP		PDIP		PAN	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Jou se ngofangare	Tahu	23	19.2	28	23.3	4	3.3	5	4.2	4	3.3
	Tidak tahu	10	8.3	10	8.3	3	2.5	4	3.3	3	2.5
Adat se atorang	Tahu	22	18.3	31	25.8	3	2.5	7	5.8	6	5
	Tidak tahu	11	9.2	7	5.8	4	3.3	2	1.7	1	.8
Adat se kabasarang	Tahu	21	17.5	30	25	3	2.5	7	5.8	3	2.5
	Tidak tahu	12	10	8	6.7	4	3.3	2	1.7	4	3.3
Sere se duniru	Tahu	14	11.7	19	15.8	1	.8	5	4.2	1	.8
	Tidak tahu	19	15.8	19	15.8	6	5-	4	3.3	6	5-
Ngale seduhu	Tahu	12	10	16	13.3	1	.8	3	2.5	1	.8
	Tidak tahu	21	17.5	22	18.3	6	5-	6	5-	6	5-
Cing se cingare	Tahu	12	10	14	11.7	1	.8	4	3.3	1	.8
	Tidak tahu	21	17.5	24	20	6	5	5	4.2	6	5-

Selain Demokrat, responden yang memilih Golkar juga tinggi persentase mengenai pengetahuan akan falsafah adat jika dibanding dengan partai lain (Tabel 4.14). Misalnya pengetahuan tentang *cing singare* hanya selisih 1%, atau pada Falsafat adat yang utama yaitu *Jou se ngofangare* yang hanya selisih 4%. Falsafat tersebut seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan pilihan politik bagi masyarakat adat, karena dalam falsafat *Jou se ngofangare* berbicara mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Responden yang memahami makna *Jou Se Ngofangare*, seharusnya mendukung Partai Demokrat karena keberadaan Boki di Demokrat sebagai indikator dukungan pihak kesultanan terhadap partai tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak semua responden yang memahami makna falsafah tersebut memilih Partai Demokrat. Kondisi tersebut mengandung dua penafsiran, pertama makna *Jou Se Ngofangare* hanya berlaku bagi Sultan dan bukan pada Boki, seperti yang terjadi pada dukungan Sultan ketika berada di PDK Pemilu 2004. Kedua kemajuan pengetahuan masyarakat adat yang dapat memisahkan wilayah

istana (kesultanan) dan politik (pemilu) sehingga konsep *Jou Se Ngofangare* tidak berlaku.

Stratifikasi dalam Masyarakat Adat

Menurut Rusli Andi Atjo masyarakat adat Ternate memiliki tiga stratifikasi atau lapisan sosial yang ditentukan berdasarkan keturunan. Lapisan yang dimaksud adalah kelas bangsawan, rakyat biasa (*bala*) dan kelas budak.¹⁰⁰ Sedangkan disisi lain, Rinto mengidentifikasi adanya “stratifikasi dalam stratifikasi”, maksudnya dalam kelas bangsawan yang diidentifikasi oleh Atjo, masih terdapat lagi kelas. Sehingga dalam penggolongan kelas tersebut Rinto membaginya kedalam lima golongan yaitu pertama, golongan *Jou* (Sultan bersama anak dan istrinya); kedua, *Dano* (cucu Sultan dan anak saudara perempuan Sultan); ketiga, *Soangare* adalah orang yang secara turun-temurun mengabdikan di kesultanan; keempat, *balakusu sikano-kano* dan yang terakhir adalah golongan budak, namun golongan ini tidak dikenal lagi sejak Islamisasi di Kesultanan Ternate.¹⁰¹

Pengetahuan masyarakat mengenai penggolongan atau stratifikasi sosial tersebut dalam adat, jauh lebih baik jika dibanding dengan indikator pengetahuan yang berhubungan dengan keterlibatan dalam adat yang lain. Sekitar 80-an persen responden mengetahui stratifikasi adat yang terdiri dari *Jou, dano, soangare* dan *balakusu* (Tabel 4.15) dengan distribusi, 1,7% adalah golongan *Jou*, 18,3% adalah *dano* dan 7,5% dari golongan *soangare*. Sedangkan responden terbanyak adalah mereka yang mengaku sebagai golongan *balakusu* dalam Kesultanan Ternate yaitu 50% dari total responden.

¹⁰⁰ Rusli *op.cit.*, hal.28-29.

¹⁰¹ Rinto, *op.cit.*, hal.42.

Tabel 4.15
Distribusi Responden menurut Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat Adat

Stratifikasi dalam Masyarakat Adat	Tahu (%)	Termasuk dalam Golongan (%)
Jou	87.5 (N=103)	1.7 (N=2)
Dano	85.8 (N=102)	18.3 (N=22)
Soangare	85.0 (N=102)	7.5 (N=9)
Balakusu Sikano-Kano	84.2 (N=101)	50 (N=60)
Total N= 120		

Tabel 4.16

Distribusi Responden menurut Pilihan Partai Terkait Stratifikasi Sosial Adat

Partai	Stratifikasi Sosial Adat											
	Jou		Soangare		Dano		Balakusu		Tidak termasuk		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	1	3	1	3	4	12.1	16	48.5	11	33.3	33	100
Demokrat		-	5	13.2	8	21.1	22	57.9	3	7.9	38	100
PPP		-		-	1	14.3	4	57.1	2	28.6	7	100
PDIP	1	11.1		-	1	11.1	6	66.7	1	11.1	9	100
PAN		-		-	2	28.6	1	14.3	4	57.1	7	100
PKS		-		-		-	1	50	1	50	2	100
PBR		-	2	33.3		-	2	33.3	2	33.3	6	100
PBB		-		-		-		-	1	100	1	100

Dalam struktur kekuasaan elit selalu lebih sedikit dari rakyat biasa, hukum tersebut juga berlaku dalam stratifikasi sosial masyarakat adat di Ternate, yaitu golongan elit (*jou*, *dano*, dan *soangare*) lebih sedikit jumlahnya dari mereka yang berstatus rakyat biasa (*balakusu*). Dari 50% responden yang termasuk dalam golongan *balakusu*, 59,9% dari jumlah tersebut adalah pemilih yang memilih Demokrat dan 48,5% adalah pemilih Golkar. Sedangkan sedangkan selebihnya terdistribusi ke PDIP, PPP, PAN, PKS dan PBR (Tabel 4.16).

Responden yang berada dalam golongan *Dano* dan *Soangare* tetap didominasi oleh Partai Demokrat masing-masing, 21.1% dan 13.2%. Selain Partai Demokrat dukungan golongan *dano* juga besar untuk Partai Golkar jika dibandingkan dengan partai lain, sebesar 12% dari responden pemilih partai tersebut. Dukungan *jou*, *dano* dan *soangare* untuk partai lain selain Demokrat, dipengaruhi oleh benturan kepentingan karena mereka yang memilih partai lain sebagai caleg dalam partai tersebut.

Untuk responden yang tidak termasuk stratifikasi tersebut dan mengaku sebagai orang Ternate asli, lebih cenderung memilih Golkar, PPP, PAN dan PBR (Tabel 4.16). Responden yang mengatakan tidak mengetahui posisi stratifikasi sosialnya dan mengaku sebagai orang asli Ternate, menunjukkan rendahnya perhatian identitas. Sehingga memiliki cenderung untuk memilih partai lain selain Demokrat karena tidak merasa terwakili dengan keberadaan Boki dan Dano Abdullah Tahir di partai tersebut.

4.1.3. Sosialisasi Politik dalam Keluarga

Keluarga dalam masyarakat adat Ternate bermakna luas karena keluarga tidak sebatas orang tua dan anak-anak mereka, akan tetapi kerabat dekat seperti kakek, nenek, paman, sepupu dan lain-lain. Keluarga tidak hanya pada hubungan darah, namun ada yang terbentuk melalui pola asuh dengan istilah “anak piarah”. Anak piarah adalah orang lain yang tinggal dalam suatu keluarga, untuk tujuan sekolah atau untuk persinggahan hidup sementara, dimana mereka dianggap adalah bagian dari keluarga tersebut.

Karakteristik responden terkait dengan status dalam rumah tangga menunjukkan bahwa responden yang berstatus sebagai kepala rumah tangga yaitu 41,7% baik kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang perempuan. Untuk responden dalam kategori keluarga inti diluar kepala keluarga, yang terdiri dari istri dan anak kandung jumlahnya lebih kecil yaitu masing-masing 23,3% dan 21,7%. Sedangkan anggota keluarga lain yang berstatus sebagai kerabat dekat jumlahnya 5,8%, selain keluarga yang berdasarkan geneologi juga terdapat keluarga berasal dari luar, misalnya mereka yang berstatus

Universitas Indonesia

sebagai menantu atau pun yang berstatus sebagai *anak piarah*, masing-masing 5%, dan 2,5% (Tabel 4.17).

Untuk mengetahui apakah keluarga memiliki peran penting dalam menentukan perilaku memilih seseorang, maka salah satu indikator yang dapat kita lihat adalah seberapa besar intensitas pembicaraan masalah-masalah politik atau pemilu dalam keluarga tersebut. Intensitas pembicaraan masalah politik dalam masyarakat adat Ternate relatif tinggi, karena hanya 24,2% responden yang mengaku bahwa mereka tidak pernah membicarakan masalah-masalah politik atau terkait dengan pemilu dalam keluarga mereka. Sedangkan selebihnya memilih jawaban yang beragam mulai dari “sering”, “kadang-kadang” dan “sangat jarang”, responden yang memilih jawaban “sering” yaitu sebanyak 22,5%, untuk mereka yang memilih jawaban “kadang-kadang” dan “sangat jarang” masing-masing sebesar 34,2% dan 16,7%.

Dengan melihat intensitas pembicaraan masalah-masalah politik dalam keluarga, maka kita dapat berasumsi, bahwa dalam masyarakat adat Ternate, faktor keluarga masih menjadi variabel yang menentukan dalam perilaku memilih. Yang dimaksud dengan faktor keluarga adalah pengaruh salah satu anggota keluarga dalam menentukan pilihan partai dalam pemilu, anggota keluarga terdiri dari suami, istri, anak kandung dan *piarah*, serta kerabat dekat (paman, bibi, nenek, kakek dll).

Dari total responden yang mengatakan pernah membicarakan masalah politik dalam keluarga (kategori sering, kadang-kadang dan sangat jarang), sebanyak 16,8% responden mengatakan anggota keluarga yang paling berpengaruh adalah suami, mereka yang memilih suami sebagai orang yang paling menentukan dalam keluarga, tentunya berstatus sebagai istri yang jumlahnya 23,3% (Tabel 4.17). Sedangkan yang memilih orang tua sebagai orang yang paling berpengaruh dalam pilihan politik yaitu 10,% dari 21,7% yang berstatus sebagai anak kandung, 5% sebagai menantu dan 2,5% sebagai *anak piarah*.

Tabel 4.17

Sosialisasi Politik dalam Keluarga

I. Status dalam Rumah Tangga		N	Persentase (%)
	Kepala keluarga	50	41.7
	Istri	28	23.3
	Anak kandung	26	21.7
	Menantu	6	5.0
	Anak <i>piarah</i>	3	2.5
	Kerabat dekat	7	5.8
II. Intensitas pembicaraan masalah-masalah politik dalam keluarga			
	Sering	27	22.5
	Kandang-kadang	41	34.2
	Sangat jarang	20	16.7
	Tidak pernah	29	24.2
	Tidak menjawab	3	2.5
III. Anggota keluarga yang paling berpengaruh			
	Suami	20	16.7
	Anak piarah	1	0.8
	Saya sendiri	27	22.5
	Orang tua	12	10.1
	Kerabat dekat	1	1.7
	Anak kandung	7	5.8%
	Tidak ada	50	41.7%

N=120

Selain suami dan orang tua sebagai status dalam keluarga yang berpengaruh, terdapat reponden berstatus orang tua, yang memilih anak kandung mereka sebagai orang yang berpengaruh dalam pilihan politik yaitu sebesar 5,9%. Sedangkan mereka yang memilih kerabat dekat dan *anak piarah* jumlahnya hanya 0,8%. Jawaban responden dengan skor cukup tinggi yaitu 22,7% mengatakan orang yang berpengaruh dalam dirinya sendiri, dari jumlah tersebut 21,6% mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga dan 1,7% mereka yang berstatus sebagai anak kandung (Tabel 4.17).

Data sosialisasi politik dalam keluarga menunjukkan, hampir setengah dari jumlah responden (41,7%) mengatakan bahwa dalam keluarga tidak ada orang

yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Karena tidak ada yang berpengaruh maka setiap anggota keluarga bebas menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Tabel 4.18

Distribusi Responden Berdasarkan Pilihan Partai dan Orang yang Bepengaruh dalam Keluarga

Partai	Orang Berpengaruh dalam Keluarga															
	Suami		Anak piarah		Istri		Saya sendiri		Orang tua		Kerabat dekat		Anak kandung		Tidak ada	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	5	15.2	1	3-	0	-	5	15.2	2	6.1				-	20	60.6
Demokrat	5	13.2		-	1	2.6	9	23.7	8	21.1	1	2.6	4	10.5	10	26.3
PPP	3	42.9		-		-	2	28.6		-				-	2	28.6
PDIP	4	44.4		-		-	1	11.1	1	11.1				-	3	33.3
PAN	1	14.3		-		-	0	-		-	1	14.3		-	5	71.4
PKS	0	-		-		-	1	50		-		-	1	50		
PBR	0	-		-		-	1	16.7		-		-	1	16.7	4	66.7

Berdasarkan distribusi anggota keluarga yang paling berpengaruh dalam memilih partai, menunjukkan 60,6% dari pemilih Golkar adalah mereka yang mengatakan tidak ada anggota keluarga yang mempengaruhi pilihan mereka. Dengan jumlah tersebut maka responden yang memilih Golkar adalah rata-rata mereka menganggap keluarga tidak berpengaruh dalam memilih partai. Selain Golkar, responden yang memilih Partai PAN dan PBR juga menganggap keluarga tidak berpengaruh (Tabel.18).

Sedangkan untuk responden yang mengatakan keluarga berpengaruh dalam memilih partai terdistribusi di Partai Demokrat, PPP dan PDIP. Untuk responden yang mengatakan suami adalah orang yang paling berpengaruh pada pilihan partai mereka tertinggi untuk pemilih PPP dan PDIP, masing-masing 42,9% dan 44,4%. Bagi responden yang mengatakan bahwa mereka sendiri adalah orang berpengaruh dalam memilih partai yang sebagian besar adalah kepala keluarga terdistribusi ke Partai Golkar (15,2%), Demokrat (23,7%), PPP (28,6%), PDIP (11,1%) dan PKS (50%).

4.2 Faktor Psikologi Pemilih Masyarakat Adat

Pengaruh variabel demografi, status sosial ekonomi, agama dan hubungan kekeluargaan sebagai faktor sosiologi yang mempengaruhi perilaku politik, lebih khusus pada perilaku memilih. Namun disisi lain, kedekatan dengan partai, ketertarikan pada isu tertentu dan hubungan dengan kandidat (celeg) menjadi variabel psikologi yang tidak dapat dipisahkan dalam analisa perilaku memilih. Oleh karena itu, Angus Campbell, Philip E Converse dan kawan-kawan, yang tergabung dalam *Survey Research Center of University Michigan*,¹⁰² berpandangan bahwa ketiga variabel tersebut sangat menentukan dalam perilaku memilih. Faktor psikologi pemilih dianggap sangat berpengaruh, karena sebagai *intervening variable* yang menjembatani jarak antara faktor sosiologi dan kekuatan politik dalam pemilu, seperti pada kutipan berikut;

No doubt factor socioeconomic status, religion, family influence and the state of nation's affair affect our political attitude; but our conscious of feeling about the party, issues and candidate are the most immediate determinants of our voting behavior. These attitudes "intervening" between the more general and distance sociological and political forces.

Dalam studi perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009, selain faktor sosiologis pemilih yang diteliti, faktor psikologi masyarakat adat sebagai unit analisa dalam memahami perilaku memilih masyarakat adat. Faktor psikologi yang diteliti adalah variabel kedekatan partai politik, ketertarikan pada isu, kedekatan dengan kandidat (caleg), perilaku politik Sultan dan Boki.

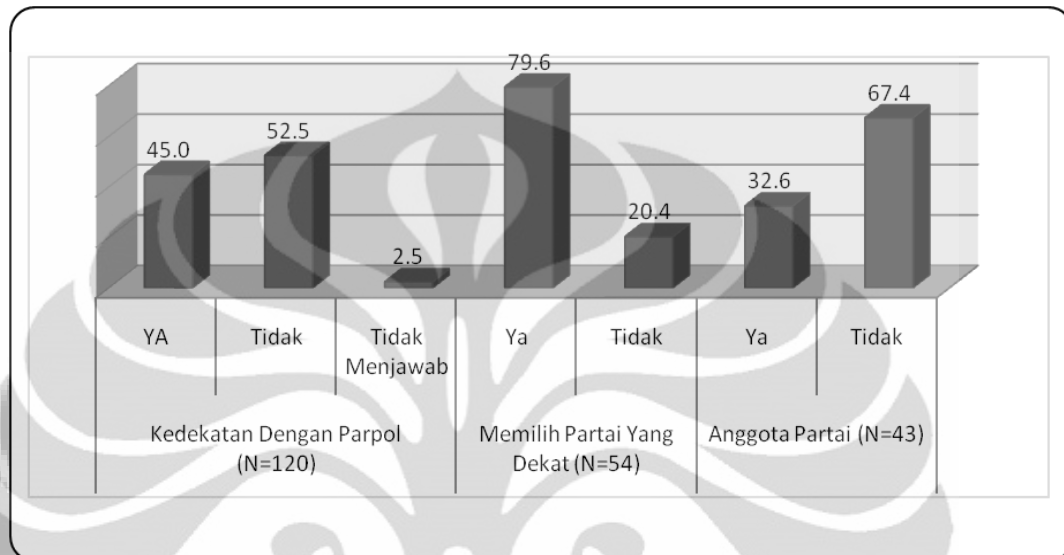
4.2.1 Kedekatan dengan Partai

Faktor psikologi yang pertama dalam penelitian ini adalah variabel kedekatan dengan partai (*party identification*). Dibeberapa negara maju seperti Amerika Serikat, *party identification* sebagai variabel utama dalam analisa perilaku pemilih. Kedekatan dengan partai dapat diartikan sebagai perasaan senang, suka, serta dukungan seseorang terhadap partai tertentu, tanpa harus

¹⁰² Lihat Angus Campbell dalam Hugh A Bone dan Austin Ranney, *op.cit.*, hal. 6.

terikat oleh legalitas formal dari partai tersebut, misalnya sebagai anggota atau pengurus partai.¹⁰³

Gambar 4.1
Distribusi Responden menurut Kedekatan dengan Parpol dan Kecenderungan Memilih



Berdasarkan hasil survei dalam penelitian ini, ditemukan bahwa responden yang merasa memiliki kedekatan pada partai politik tertentu mencapai 45% dari total responden. Sedangkan 52,5%, mengatakan mereka tidak memiliki kedekatan atau hubungan tertentu dengan partai politik dan selebihnya 2,5% tidak menjawab (Gambar 4.1).

Tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik, ternyata tidak secara langsung dapat diterjemahkan sama dengan tingkat keterpilihan partai tersebut dalam pemilu. Pada Gambar 4.1 menunjukkan, dari 45% responden yang mengatakan memiliki kedekatan dengan parpol, hanya 79,6% responden yang memilih partai karena kedekatan dan selebihnya 20,4% mengatakan tidak memilih partai tersebut, meskipun memiliki kedekatan dengan partai. Dan dari 45% yang memiliki kedekatan dengan partai, hanya 32,6% responden yang merupakan anggota partai baik sebagai anggota biasa maupun sebagai pengurus partai, sedangkan selebihnya 67,4% adalah simpatisan partai. Jadi pemahaman

¹⁰³ Lihat Angus Campbell "the voter decides" dalam Afan Gaffar, *op. cit.*, hal. 8.

masyarakat adat Ternate, kedekatan dengan partai tidak selalu bermakna harus memilih partai tersebut dalam pemilu, seperti pada makna *party identification*. Kedekatan bagi masyarakat adat Ternate lebih bermakna mengenal partai tersebut, baik karena alasan partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP maupun karena pertimbangan mengenal orang yang ada dalam partai tersebut.

Tabel 4.19

Distribusi Responden menurut Kedekatan dengan Partai Politik

Partai	Kedekatan dengan Partai Politik					
	Ya		Tidak		Tidak menjawab	
	N	%	N	%	N	%
Golkar	21	63.6	10	30.3	2	6.1
Demokrat	10	26.3	27	71.1	1	2.6
PPP	4	57.1	3	42.9	-	-
PDIP	6	66.7	3	33.3	-	-
PAN	3	42.9	4	57.1	-	-
PKS	1	50	1	50	-	-
PBR	1	16.7	5	83.3	-	-
PBB	1	100	-	-	-	-
Hanura	1	50	1	50	-	-

Kedekatan dengan partai bagi masyarakat adat Ternate bermakna mengenal partai tersebut, karena rata-rata partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP adalah partai yang dianggap sebagai partai yang dekat dengan pemilih. Misalnya 63,6% pemilih Golkar merasa dekat dengan partai tersebut, untuk yang memilih PPP dan PDIP yang juga partai lama, masing-masing 57,1% dan 66,7% (Tabel 4.19). Sedangkan partai baru seperti Demokrat, PAN dan PBR, pemilih yang memilih partai tersebut, rata-rata adalah yang tidak memiliki kedekatan, misalnya 71,1% pemilih Demokrat memilih bukan karena dekat dengan partai tersebut dan hanya 26,3% yang memilih partai tersebut karena perasaan dekat. Untuk responden yang memilih PAN dan PBR yang bukan karena alasan kedekatan masing-masing 57,1% dan 83,3%.

Jadi kesimpulan mengenai kedekatan (*party identification*) dalam masyarakat adat Ternate tidak selalu bermakna memilih partai tersebut dalam

pemilu, karena ada 20,4% dari total pemilih yang mengaku dekat dengan partai, akan tetapi mengatakan tidak memilih partai tersebut (Gambar 4.1). Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa 71,1% responden yang memilih Demokrat bukan karena kedekatan dengan partai. Dari alasan memilih partai ditemukan mereka yang memilih Demokrat, rata-rata karena keterwakilan atas identitas mereka (lihat Bab sebelumnya), yang dimasuk keterwakilan identitas adalah keberadaan Boki (permaisuri) dan Abdullah Tahir (Dano) sebagai representasi Kesultanan Ternate yang menjadi Caleg Demokrat.

4.2.2 Kedekatan dengan Caleg

Dalam studi perilaku memilih, tingkat popularitas selalu berhubungan dengan tingkat elektabilitas seorang kandidat, karena pemilih cenderung memilih orang-orang yang mereka kenal, dari pada mereka yang tidak dikenali. Pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009, di Dapil II Ternate Utara dan Tengah yang mayoritas adalah masyarakat adat, mereka yang popularitas tertinggi adalah caleg dari Partai Golkar yaitu Taufan Andili dan Asgar Saleh, masing-masing 63,3% dan 53,3%. Sedangkan caleg partai yang memiliki popularitas urutan kedua dan ketiga yaitu dari Partai PDIP dan Demokrat, dengan selisih kurang dari satu persen, namun tingkat popularitas pada urutan selanjutnya berkisar antara 40-25% (Tabel 4.20).

Makna dari perbedaan tingkat popularitas antara satu caleg dengan yang lain, dapat ditelusuri latar belakang caleg yang bersangkutan. Misalnya Taufan Andili, dengan tingkat popularitas tertinggi yaitu 63,3%, tingkat popularitas tersebut berhubungan dengan marga “Andili” yang merupakan anak Walikota Ternate, Samsir Andili. Berdasarkan latar belakang dunia politik, Taufan adalah termasuk dalam kategori politisi muda, jika dibanding dengan Asgar Saleh pada partai yang sama. Karena baru terlibat dalam kontekstasi politik di Kota Ternate pada Pemilu 2009, namun dari segi popularitas dengan tingkat elektabilitas pada Pemilu 2009, 8,7% dari total suara sah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan caleg lain di Dapil yang sama.

Tabel 4.20

Distribusi Responden menurut Tingkat Kedekatan Popularitas dan Kedekatan Caleg

Nama Caleg DPRD Kota Ternate Tahun 2009 yang Memperoleh Kursi	Tingkat Popularitas (%)	Tingkat Kedekatan (%)	Perolehan Suara pada Pemilu 2009 (%)
M Taufan Andili	63.3 (N=76)	15.7 (N=8)	8.7
Asgara Saleh	53.3 (N=64)	3.9 (N=2)	3.5
Merlisa	48.3 (N=58)	13.7 (N=7)	4.0
Abdullah Tahir	47.5 (N=57)	9.8 (N=5)	3.8
Husni Bopeng	40.0 (N=48)	19.6 (N=10)	2.5
Erni Drakel	39.2 (N=47)	-	0.9
Abdurrahman Al Jodkja	34.2 (N=41)	-	1.0
Is Suaib	32.5 (N=39)	9.8 (N=5)	2.1
Fuad Al hadi	31.7 (N=38)	19.6 (N=10)	1.7
Faisal Assegaf	25 (N=30)	7.8 (N=4)	1.2
	N= 120	N=51	

Selain Partai Golkar, caleg dari partai lain memperoleh tingkat popularitas dan elektabilitas pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 di wilayah kelurahan dimana caleg berdomisili. Misalnya Merlisa dari PDIP dan Abdullah Tahir dari Demokrat, kedua partai tersebut menjadi pemenang perolehan suara dimana caleg berdomisili, yaitu PDIP memperoleh suara tertinggi di Kelurahan Akehuda yang merupakan tempat domisili Merlisa dan Demokrat memperoleh suara tertinggi di Kelurahan Dufa-Dufa yang juga sebagai tempat domisili Abdullah Tahir.

Caleg yang terpilih karena memiliki kedekatan dengan persentase tertinggi yaitu Husni Bopeng dan Fuad Alhadi yaitu masing-masing 19,6%. Untuk kedua caleg tersebut, trennya masih tetap sama dengan tingkat popularitas dan keterpilihan pada caleg partai, karena Husni Bopeng dari PAN dan Fuad Alhadi dari PBR masing-masing memperoleh tingkat kedekatan tertinggi dengan pemilih di kelurahan dimana mereka berada.

Dengan memperhatikan tingkat kedekatan dan popularitas, pada Tabel 4.20 terlihat bahwa tingkat popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kedekatan. Misalnya Asgar Saleh dengan tingkat popularitas pada urutan

kedua, akan tetapi tingkat kedekatan dengan pemilih pada urutan yang terakhir, begitupun dengan Abdullah Tahir dengan tingkat popularitas tinggi akan tetapi tingkat kedekatan relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada faktor lain selain faktor kedekatan dengan pemilih yang berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan pada Pemilu 2009. Untuk Asgar Saleh tingkat keterpilihannya berhubungan oleh popularitas Partai Golkar yang telah dikenal pemilih sejak dulu dan rata-rata pemilih adalah loyalitas Partai Golkar. Sedangkan untuk Abdullah Tahir, keterpilihannya berhubungan dengan keberadaan Boki di Demokrat yang merupakan representasi dari identitas adat.

4.2.3 Ketertarikan pada Isu

Ketertarikan pada isu (*issue orientation*), sama halnya dengan kedekatan dengan partai dan caleg (*party identification* dan *candidate orientation*), yaitu suatu proses yang tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi sesuatu yang terbentuk dari interaksi lingkungan fisik dan sosial serta psikologis pemilih itu sendiri.¹⁰⁴ Oleh karena itu tidak cukup dengan terfokus pada satu aspek saja, dalam memahami faktor psikologis pemilih maka harus menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai perbandingan.

Pada masyarakat adat Ternate, isu atau permasalahan yang dianggap menarik oleh pemilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate 2009 yaitu masalah ekonomi dan pendidikan. Pada masalah ekonomi, 31,7% responden mengatakan hal tersebut sebagai permasalahan yang penting, dan masalah pendidikan 10,8% (Tabel 4.21). Sedangkan masalah lain yaitu perlindungan hak-hak adat, belum dianggap menjadi permasalahan yang penting oleh masyarakat adat Ternate, karena hanya 3,3% dari total responden yang mengidentifikasi hal tersebut sebagai masalah. Namun disisi lain, sebagian responden (50%) menganggap isu atau permasalahan bukan hal yang menarik sebagai bahan kampanye dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009, karena menganggap bahwa mereka tidak menghadapi permasalahan apa-apa.

¹⁰⁴ Hugh A Bone dan Austin Ranney, *op cit.*, hal.10.

Sebesar 55% responden menganggap terdapat permasalahan dalam masyarakat adat Ternate, masalah-masalah tersebut dianggap sebagai masalah atau isu yang perlu diangkat dalam kampanye partai politik, yang meliputi masalah ekonomi, pendidikan, hak-hak adat, sengketa lahan bandara dan kenakalan remaja.

Tabel 4.21

Distribusi Responden menurut Ketertarikan Pemilih terhadap Isu

	Masalah	Persentase (%)
Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat	Masalah kesejahteraan ekonomi	31.7 (N=38)
	Masalah perlindungan hak-hak adat	3.3 (N=4)
	Sengketa lahan Bandar	1.7 (N=2)
	Akses terhadap pendidikan	10.8 (N=13)
	Akses terhadap pelayanan kesehatan	8 (N=1)
	Kenakalan remaja	1.7 (N=2)
	Tidak Ada Masalah	50 (N=60)
Total N=120		
Partai yang Mengangkat Masalah Adat	Ada	55 (N=66)
	Tidak ada	40 (N=48)
	Tidak tahu	5 (N= 5)
Total N= 120		
Memilih Partai yang Mengangkat Isu	Ya	22.7 (N=15)
	Tidak	77.3 (N=51)
Total N= 66		

Pada Tabel 4.21 juga menunjukkan bahwa, 55% responden menyatakan ada partai politik yang mengangkat isu ekonomi, pendidikan dan lain-lain, namun dari jumlah tersebut hanya 22,7% responden yang mengatakan memilih partai yang mengangkat permasalahan tersebut dalam kampanye dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Sedangkan 77,3% mengatakan tidak memilih partai tersebut, meski dalam kampanye mengangkat isu-isu yang ada, karena mereka percaya bahwa isu yang diangkat dalam program partai politik, hanya sebatas kampanye parpol pada saat pemilu dan hilang setelah pemilu berakhir.

Dengan memperhatikan perbandingan antara partai yang mengangkat isu dengan tingkat keterpilihan partai tersebut (Tabel 4.21), maka dapat disimpulkan

Universitas Indonesia

bahwa isu atau permasalahan yang diangkat oleh partai bukan menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi responden, karena hanya 22,7% mengatakan memilih partai karena tertarik pada isu atau permasalahan yang diangkat pada saat kampanye.

4.2.4. Pola Kepemimpinan Kesultanan Ternate

Sultan Mudaffar Syah adalah Sultan Ternate yang ke-47, yang dilantik oleh *bobato-18* (perwakilan masyarakat adat) setelah Sultan Muhammad DJabir Syah wafat. Mudaffar Syah terlibat dalam politik sebelum dilantik sebagai Sultan Ternate di tahun 1975, karena pada tahun 1971 Mudaffar Syah dipercaya Golkar sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Kemudian pada masa reformasi, Sultan Ternate ke-47 kembali ke panggung politik Maluku Utara dengan turut berjuang dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara. Perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku (Ambon), menurut Klinken¹⁰⁵, sebagai upaya Sultan untuk memperoleh legitimasi simbol dan kekuasaan yang nyata di Maluku Utara, serta untuk mengembalikan sejarah kejayaan Kesultanan Ternate, sebagai Sultan dengan gelar "*alam makolano*" (penguasa alam di Maluku Utara).

Setelah gagal memperoleh kekuasaan sebagai Gubernur di Maluku Utara, maka peluang yang ada pada Pemilu 2004 untuk memperoleh kekuasaan dan mengabdikan untuk Maluku Utara dimanfaatkan Sultan, meski dalam lingkup yang terbatas sebagai caleg dan pengurus dari PDK (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan). PDK sebagai partai yang baru mengikuti kontekstasi politik pada tahun 2004, berhasil menjadi partai besar dari ukuran perolehan kursi di DPRD Kota Ternate. Perolehan kursi PDK tidak terlepas dari figur Sultan sebagai tokoh kharismatik dan memiliki legitimasi simbol di Ternate dan Maluku Utara.

Sedangkan Boki, Ratu Nita Budhi Susanti mempunyai latar belakang sejarah politik di Maluku Utara dan Ternate dimulai sejak menjadi anggota DPD-RI dari Maluku Utara tahun 2004 dan sebagai calon Walikota Ternate tahun 2005. Setelah gagal menjadi Walikota Ternate tahun 2005 dan berakhirnya periode DPD-RI tahun 2009, maka pada Pemilu 2009, Boki memilih jalur perjuangan

¹⁰⁵ Gerry Van Klinken, *op.cit.*, hal. 171.

politik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke jalur partai politik dengan menjadi caleg DPR-RI untuk Partai Demokrat.

Perubahan perilaku politik Sultan dan Boki, dimana Sultan memilih jalur non-partai dengan menggantikan posisi Boki sebagai caleg DPD-RI Maluku Utara pada Pemilu 2009. Sedangkan disisi lain, Boki memilih jalur partai politik menggantikan posisi Sultan pada Pemilu 2004, meski dengan partai yang berbeda yaitu Partai Demokrat. Perubahan perilaku tersebut, berhubungan dengan perolehan kursi PDK dan Demokrat di DPRD Kota Ternate pada Pemilu 2004 dan 2009. Seperti PDK pada Pemilu 2004 memperoleh lima kursi dan Demokrat memperoleh dua kursi, sedangkan pada Pemilu 2009, PDK tanpa figur Sultan tidak memperoleh kursi dan Demokrat dengan figur Boki bertambah satu kursi untuk DPRD Kota Ternate.

Perilaku politik Sultan dan Boki selalu menjadi patron dalam pemilu bagi masyarakat adat Ternate, hal tersebut mungkin berkaitan dengan istilah Gerry Van Klinken sebagai “legitimasi simbol” Sultan Ternate. Dari total reseponden, 80,8% responden mengetahui jika Sultan sebagai caleg PDK pada Pemilu 2009, dan 95,2% dari responden mengatakan memilih PDK pada Pemilu 2004 di DPRD Kota Ternate karena figur Sultan. Sedangkan untuk responden yang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009, 84,8% mengetahui jika Boki sebagai caleg Demokrat dan 77,1% memilih Demokrat karena Boki sebagai caleg partai tersebut (Tabel 4.22).

Tabel 4.22

Distribusi Responden menurut Pengaruh Perilaku Politik Sultan dan Boki terhadap Perilaku Memilih

	Perilaku Politik Sultan	Perilaku Politik Boki
Pengetahuan keterlibatan Sultan dan Boki sebagai caleg	80,8% pemilih mengetahui Sultan di PDK tahun 2009 (N=97)	84,8% pemilih mengetahui Boki di partai Demokrat (N=101)
Memilih partai karena Sultan dan Boki	95,2% memilih PDK Pemilu 2004 karena Sultan (N=62)	71,1 % memilih Demokrat Pemilu 2009 karena Boki (N=27)
Hasil perolehan kursi partai	PDK tahun 2004 DPRD Kota: 5 kursi DPRD prov: 2	Demokrat tahun 2009 DPRD kota: 3 kursi DPRD prov: 5

Data pada Tabel 4.22 menunjukkan juga bahwa, perilaku politik Sultan dengan menjadi caleg PDK sangat mempengaruhi pemilih, sehingga wajar jika dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate PDK memperoleh lima kursi karena figur Sultan sebagai bagian dari PDK dan representasi identitas adat. Sedangkan pada Pemilu 2009, ketika Sultan meninggalkan PDK dan memilih untuk non-partai, suara PDK juga turut berubah dan tidak lagi memperoleh kursi dari 25 kursi yang ada di DPRD Kota Ternate.

Disisi lain, Sultan dengan menjadi caleg DPD-RI tetap mendapat dukungan dengan perolehan 40% suara sah di Kota Ternate dan 60% yang lain terdistribusi ke dalam 26 caleg DPD. Pemilih yang mengikuti pilihan politik Sultan, 50% mengatakan alasan wujud dari *Jou Se Ngofangare* (Tabel 4.23). Sedangkan responden yang memilih Boki, hampir tidak ditemukan perbedaan alasan dengan mereka yang memilih sultan, meski pada Tabel 4.23 disebutkan 11,3% pemilih yang memilih Sultan karena alasan Sultan sebagai pelindung adat dan 25,9% pemilih Boki karena alasan yang sama.

Makna dari *Jou Se Ngofangare* adalah filosofi hubungan antara penguasa dan rakyatnya (antara *kolano* dan *balakusu sekano-kano*), konsep ini adalah

Universitas Indonesia

turunan dari konsep hubungan “Tuhan” sebagai “sang pencipta” dan “manusia” sebagai hamba yang “dicipta”. Sehingga dalam sebuah pengantar Sultan, menafsir *Jou Se Ngofangare*” berarti “ Engkau” (penguasa) dan “Aku” (rakyat) dan selanjutnya secara mendalam diartikan “*apa yang ada pada engkau ada pada aku dan sebaliknya apa yang ada padaku ada juga pada engkau*.”¹⁰⁶ Secara sederhana *Jou Se Ngofangare*, adalah pola *patron-client asimetris* dalam wujud penghambaan (tidak bermakna Tuhan), kerana sebagian besar masyarakat adat percaya bahwa Sultan sumber kekuatan mistis.

Tabel 4.23

Distribusi Responden menurut Alasan dalam Memilih Sultan dan Boki

Alasan Memilih	Sultan	Boki
Takut Di Timpah Bala	6.5	7.4
Wujud Dari <i>Jou Sengopangare</i> (Falsafah hubungan Sultan dan Rakyat)	50.0	48.1
Karena Sultan dan Boki pelindung adat	11.3	25.9
Tuan Tanah	14.5	11.1
Ikut Orang Tua	6.5	-
Figur Baik Dan Jujur	11.3	-
SBY	-	7.4
	N=62	N= 27

Alasan lain bagi pemilih yang mengikuti pilihan Sultan yaitu Sultan sebagai “Tuan Tanah,” 14,5% responden yang memilih PDK pada Pemilu 2004 mengatakan memilih Sultan karena alasan sebagai tuan tanah. Maksud dari tuan tanah, yaitu Sultan sebagai pemilik kekuasaan atas tanah adat yang bersifat tetap seperti *Aha Kolano*, *Raki Kolano* dan *Raki Jo Ou* yang diwariskan, maupun hak tanah yang lain yang bersifat sementara.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Pengantar Mudaffar Syah, dalam Amas Dinsie dan Rito Taib, *op.cit.*, hal. xiv.

¹⁰⁷ Rinto Taib *op.cit.*, hal. 67-78.

Tabel 4.24

Persepsi Masyarakat Adat Atas Keterlibatan Sultan dan Boki dalam Politik

Persepsi Masyarakat Adat		N	%
SULTAN	Setuju	57	47.5
	Tidak Setuju	58	48.3
	Tidak Tahu	5	4.2
	Total	120	100
BOKI	Setuju	58	50.9
	Tidak Setuju	15	13.2
	Tidak Tahu	41	36-
	Total	114	100

Berdasarkan persepsi responden akan keterlibatan Sultan dan Boki pada tabel 4.24, maka terlihat bahwa masyarakat adat lebih mendukung keterlibatan Boki di politik dari pada Sultan, karena 50,9% pemilih mengatakan setuju atas keterlibatan Boki dalam politik dan hanya 13,2% mengatakan tidak setuju.

Sedangkan Sultan hampir berimbang antara yang mengatakan setuju dengan tidak setuju, mereka yang mengatakan setuju 47,5% dan yang tidak setuju 48, 3%. Pemilih yang tidak setuju keterlibatan Sultan dalam politik, rata-rata memiliki ekspektasi agar Sultan tidak mencampuri urusan politik, karena “politik itu kotor” sehingga keterlibatan Sultan dalam politik akan mengurangi kharisma Sultan sebagai simbol adat yang utama. Sedangkan Boki tidak dipandang sebagai simbol adat yang utama, karena sebagian besar pemilih setuju keterlibatan Boki dalam politik, walaupun mereka menganggap bahwa “politik itu kotor.”

Tabel. 4.25
Distribusi Responden menurut Persepsi Masyarakat terhadap Keterlibatan Sultan dan Boki dalam Politik

PARTAI	SULTAN						BOKI					
	Setuju		Tidak Setuju		Tidak Tahu		Setuju		Tidak Setuju		Tidak Tahu	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	14	42.4	16	48.5	3	9.1	14	48.3	6	20.7	9	31-
Demokrat	21	55.3	16	42.1	1	2.6	25	67.6	3	8.1	9	24.3
PPP	2	28.6	4	57.1	1	14.3	1	16.7	1	16.7	4	66.7
PDIP	7	77.8	2	22.2	-	-	6	66.7	1	11.1	2	22.2
PAN	-	-	7	100	-	-	1	14.3	1	14.3	5	71.4
PKS	1	50	1	50	-	-	1	50	-	-	1	50
PBR	-	-	6	100	-	-	-	-	3	50	3	50
PBB	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-

Mereka yang setuju atas keterlibatan Boki dalam politik, tidak secara langsung memberi dukungan kepada partai Demokrat karena 50% dari mereka terdistribusi ke Golkar, PPP dan PDIP. Sebesar 67,6% sedangkan selebihnya memilih Golkar dan PDIP (Tabel 4.25).

Untuk responden yang setuju adanya keterlibatan Sultan, menunjukkan inkonsistensi karena tidak semua mendukung Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Meski ada 48,3% responden yang tidak setuju atas keterlibatan Sultan dalam politik, akan tetapi Sultan ketika menjadi caleg DPD tetap memperoleh dukungan penuh dari masyarakat adat dengan perolehan 40% dari total suara sah di Ternate pada Pemilu 2009.

Makna dari 48,3% yang mengatakan tidak setuju atas keterlibatan Sultan dalam politik, yaitu sebuah harapan dari masyarakat adat, agar Sultan tidak mencampuri urusan politik dan menata kehormatan di Kesultanan Ternate. Ketidaksetujuan atas keterlibatan dalam politik, bukan berarti tidak mendukung Sultan pada persaingan politik yang akan datang, karena rata-rata masyarakat adat tidak memiliki keberanian untuk memilih selain Sultan, ketika Sultan ikut terlibat dalam politik. Pengaruhi pola patron masyarakat adat yang berpengaruh pada falsafah *Jou Se Ngofangare*, sebagai faktor yang mendorong dukungan atas

Universitas Indonesia

perolehan suara Sultan, meskipun mereka memiliki harapan agar Sultan tidak mencampuri urusan politik diluar Kesultanan Ternate.

4.3 Hubungan Antar Variabel

4.3.1 Uji *Chi-square*

Dalam penelitian perilaku memilih masyarakat adat, secara garis besar ada dua faktor yang diteliti, yaitu faktor sosiologis dan faktor psikologis. Pertama, faktor sosiologis yang terdiri dari demografi dan status sosial ekonomi, keterlibatan dalam adat, sosialisasi politik dalam keluarga. Kedua, faktor psikologis yang terdiri dari kedekatan dengan partai (*party identification*), ketertarikan pada isu (*issue orientation*), kedekatan dengan caleg (*candidate orientation*) dan perilaku politik Sultan dan Boki.

Dari hasil analisa *crosstab* uji *chi-square*, ditemukan korelasi variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat adat Ternate pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009. Korelasi yang signifikan yang dimaksud adalah variabel demografi, keterlibatan dalam adat, alasan memilih partai dan caleg, serta kedekatan partai dan caleg (Tabel 4.26).

Tabel 4.26
Hasil uji *Chi-square* antar Variabel

Faktor Berhubungan dengan perilaku memilih	N	Df	Asymp. Sig
I. Demografi			
- Kelurahan	120	60	0.000
II. Keterlibatan dalam adat			
- Kelompok marga/klan	48	12	0.025
- Keterlibatan Keluarga dalam struktur adat	82	22	0.022
III. Alasan Memilih			
- Memilih partai	120	72	0.014
- Memilih caleg	97	48	0.000
- Alasan memilih partai sama 2004-2009	34	14	0.000
IV. Kedekatan			
- Kedekatan dengan Caleg	120	63	0.000
- Kedekatan Dengan Partai	120	11	0.009

Hasil uji *chi-square*, faktor demografi yang berhubungan dengan perilaku memilih partai adalah variabel kelurahan. Penjelasan deskriptif atas makna hubungan tersebut dapat ditelusuri dari distribusi partai pilihan per kelurahan. Data survei menunjukkan bahwa responden yang memilih Golkar terdistribusi di setiap kelurahan dan di Kelurahan Sangaji yang terbanyak, yaitu sebesar 27,3% (Tabel 4.27).

Tabel 4.27

Distribusi Responden menurut Partai yang di Pilih Responden per Kelurahan

Partai	Kelurahan											
	Akehuda		Dufa-Dufa		Kampung Makasar		Sallahuddin		Soa Sio		Sangaji	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Golkar	6	18.2	2	6.1	7	21.2	5	15.2	4	12.1	9	27.3
Demokrat	4	10.5	16	42.1	3	7.9	3	7.9	7	18.4	5	13.2
PPP	-	-	-	-	2	28.6	1	14.3	2	28.6	2	28.6
PDIP	6	66.7	-	-	1	11.1	-	-	1	11.1	1	11.1
PAN	-	-	-	-	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3
PKS	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
PBR	-	-	-	-	-	-	6	100.0	-	-	-	-
PBB	-	-	-	-	-	-	1	100.0	-	-	-	-
PDK	1	33.3	1	33.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-
Hanura	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.0	-	-

Selain Golkar, partai lain yang perolehan suara disemua kelurahan adalah Partai Demokrat. Dari data menunjukkan, partai Demokrat unggul di dua kelurahan yaitu Kelurahan Dufa-Dufa (42,1%) dan Soa-Sio (18,4%) (Tabel 4.27). Kedua kelurahan tersebut adalah basis masyarakat adat Ternate, misalnya Soa-Sio, kelurahan ini adalah wilayah dimana posisi Istana Kesultanan Ternate sebagai simbol adat utama. Sedangkan Kelurahan Dufa-Dufa adalah basis komunitas adat bermarga *heku* yang sebagian besar adalah Tentara Kesultanan Ternate dan pengawal Sultan, serta adanya Permaisuri (Boki) Kesultanan Ternate sebagai bagian dari Partai Demokrat, dan caleg Demokrat terpilih untuk DPRD Kota Ternate Dapil Utara-Tengah yaitu Abdullah Tahir, yang juga termasuk keturunan Kesultanan dengan golongan *dano-dano*.

Sedangkan kemenangan partai disetiap kelurahan yang lain, lebih mengandalkan hubungan kedekatan dengan caleg, misalnya di Kelurahan Akehuda responden memilih PDIP sebesar 66%, hal tersebut terkait dengan Merlisa sebagai anggota masyarakat yang berasal dari kelurahan tersebut. Kondisi serupa terjadi pada kelurahan lain seperti di Kelurahan Salahuddin dan Makassar

Timur, kecenderungan pemilih memilih Husni Bopeng dari PAN di Kelurahan Makassar Timur dan Fuad Al Hadi dari PBR di Kelurahan Salahuddin, karena pemilih melihat caleg dari partai tersebut dekat dengan mereka, atau dalam bahasa yang lazim digunakan di Ternate untuk orang dekat adalah *Anak Kampung*.

Hasil uji hubungan faktor lain yaitu keterlibatan dalam adat, menunjukkan bahwa variabel kelompok marga atau klan adalah memiliki korelasi signifikan berdasarkan uji *Pearson chi-Square* adalah $0.025 < \text{nilai } \alpha=0.05$ (Tabel 4.26). Makna hubungan signifikansi dari distribusi pilihan partai berdasarkan kelompok marga/klan dalam masyarakat Ternate, yaitu sebagian besar responden yang memilih Partai Demokrat adalah mereka yang memiliki marga *heku*, atau 60,9% responden pemilih Demokrat adalah bermarga *heku*. Selain marga *heku*, marga pendukung Partai Demokrat yang lain adalah *soa-sio* dan *cim*, masing-masing 26% dan 13%, sedangkan dukungan kelompok marga untuk partai lain relatif kecil jika dibandingkan dengan Partai Demokrat (lihat Tabel 4.8 pada pembahasan kelompok marga).

Variabel keterlibatan adat yang lain adalah keterlibatan anggota keluarga atau generasi terdahulu responden pada salah satu struktur pemerintahan adat. Hasil uji korelasi dengan nilai *Sig (2-sides) Pearson chi-Square* adalah $0,022 < \alpha$ (0,05) (Tabel 4.24). Makna hubungan tersebut yaitu rata-rata responden yang mengaku jika anggota keluarga mereka terlibat atau pernah terlibat dalam struktur pemerintahan adat cenderung memilih Partai Demokrat. Dari 64,2% responden yang mengatakan keluarga mereka (orang tua) pernah terlibat sebagai *bobato dunia* dalam struktur pemerintahan adat, 28,3% diantara mereka memilih Partai Demokrat, 17% memilih Golkar, serta selebihnya terdistribusi ke PPP, PDIP dan PAN (Tabel 4.28). Sedangkan 32,1% responden (Tabel 4.28) mengaku keluarga atau pendahulu mereka sebagai *bobato akhirat*, 15,1% diantaranya memilih Partai Demokrat, selebihnya terdistribusi ke empat partai yang lain yaitu Golkar 5,8%, PPP, PDIP dan PKS, masing-masing 1,9%.

Tabel 4.28

Keterlibatan Keluarga dalam Struktur Pemerintahan Adat

Partai	Struktur Pemerintahan Adat					
	Bobato Dunia		Bobato Akhirat		Bobato- 18	
	N	%	N	%	N	%
Golkar	9	17.0	3	5.7	-	-
Demokrat	15	28.3	8	15.1	1	1.9
PPP	1	1.9	1	1.9	-	-
PDIP	2	3.8	1	1.9	-	-
PAN	1	1.9	-	-	-	-
Total	34	64.2	17	32.1	2	3.8

Variabel yang signifikan dalam perilaku memilih masyarakat adat adalah variabel alasan memilih partai karena nilai *Sig (2-sides) Pearson chi-Square* untuk alasan memilih partai adalah 0.014, nilai tersebut $< \alpha$ (0.05). Makna signifikansi alasan memilih partai secara deskriptif dapat ditelusuri pada pembahasan sebelumnya (lihat Tabel 3.2 pembahasan alasan memilih partai). Responden yang memilih Golkar rata-rata terpengaruh oleh identitas partai dan caleg sedangkan pemilih Demokrat dalam memilih partai terpengaruh oleh identitas adat karena Sultan dan Boki.

Alasan lain yang memiliki hubungan yang signifikan adalah alasan dalam memilih caleg. Makna hubungannya yaitu adanya kecenderungan masyarakat adat Ternate untuk memilih caleg partai berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan caleg partai yang bersangkutan (lihat Tabel 3.3 dalam Bab III). Data tersebut menunjukkan, bahwa rata-rata responden yang memilih selain Partai Golkar dan Demokrat memilih caleg partai dengan alasan ada hubungan keluarga dengan caleg yang bersangkutan. Sedangkan untuk responden yang memilih Partai Demokrat rata-rata memilih caleg karena hubungan caleg dengan Sultan dan Boki.

Responden yang memilih partai yang sama pada Pemilu tahun 2004 dan 2009 mengidentifikasi diri sebagai pemilih yang loyal atau setia dengan partai

tersebut (lihat Tabel 3.8 dalam Bab III). Sebesar 10% mengatakan bahwa anggota keluarga mereka sebagai caleg partai, serta mereka yang memilih pertimbangan program dan alasan lain, masing-masing 3,3%. Dari sejumlah yang mengatakan sebagai pemilih yang loyal sebagian besar adalah pemilih Partai Golkar.

Variabel lain yang berpengaruh secara signifikan adalah kedekatan dengan partai dan caleg, karena hampir semua alasan dalam mengambil sikap politik selalu melibatkan variabel kedekatan, baik kedekatan dengan caleg maupun kedekatan dengan partai. Kedekatan dengan caleg dan partai menjadi variabel yang memiliki korelasi signifikan dengan nilai Sig (2-sides) uji *Pearson chi-Square* adalah masing-masing 0.000 dan 0.009 dimana nilai tersebut < dari $\alpha = 0.05$ (Tabel 4.24).

Makna signifikan korelasi antara pilihan partai dengan kedekatan caleg dan parpol, yaitu rata-rata responden yang memiliki kedekatan dengan partai dan caleg adalah responden yang memilih Partai Golkar. Sedangkan disisi lain bagi responden yang memilih Partai Demokrat, rata-rata bukan karena kedekatan dengan partai maupun kedekatan caleg. Untuk responden yang memilih PPP, PDIP, PAN dan lainnya, rata-rata berimbang antara pemilih yang dekat dan tidak dekat terhadap partai atau caleg.

4.3.1 Uji Regresi Dummy

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dalam bentuk kategorik, oleh karena itu model analisa yang digunakan adalah uji *Regresi Dummy* untuk memprediksi kekuatan pengaruh hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan hasil uji *chi-square*, di temukan ada delapan variabel independen yang berhubungan dengan perilaku memilih masyarakat adat Ternate yaitu variabel kelurahan, kelompok marga, keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan adat, alasan memilih partai dan caleg, alasan memilih partai yang sama, kedekatan dengan caleg dan partai.

Sejumlah variabel independen yang berhubungan, akan diuji kekuatan hubungan variabel tersebut dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji

Universitas Indonesia

regresi model pertama untuk variabel kelurahan menunjukkan berhubungan positif dengan pilihan partai dengan R^2 0,405, namun hubungannya tidak kuat karena nilai koefisien determinan model pertama adalah sebesar 0.024 yang berarti 2,4% variabel kelurahan dapat menjelaskan perilaku memilih masyarakat adat Ternate pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009.

Koefisien regresi untuk model yang kedua yaitu pengaruh variabel kelurahan dan alasan memilih partai yang sama, terhadap variabel perilaku memilih adalah sangat kuat karena R^2 sebesar 0.954. Nilai koefisien determinan 0.875 yang berarti 87,5% variabel tersebut dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap perilaku memilih dan 12,5% sisanya ditentukan oleh variabel lain.

Model koefisien regresi yang ketiga pengaruh variabel kelurahan, alasan memilih partai yang sama dan kelompok marga juga sangat kuat dengan R^2 sebesar 0.960 dan koefisien determinan 0.864 yang berarti 86,4% variabel tersebut dapat menjelaskan variabel dependen.

Untuk koefisien regresi model keempat, kelima dan keenam model pengaruhnya juga tetap sama yaitu berpengaruh kuat karena semuanya mendekati nilai $R^2 = 1$. Perbedaan dari model keempat, kelima dan keenam adalah koefisien determinan yaitu masing-masing 0.819, 0.737, dan 0.514. Makna koefisien determinan untuk model yang keempat dengan penambahan variabel keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan adat, terhadap model sebelumnya yaitu 81,9% model ini dapat mempengaruhi variabel perilaku memilih. Sedangkan untuk model kelima dan keenam dengan penambahan variabel alasan memilih partai dan caleg, maka koefisien determinannya masing-masing 0.737 dan 0.514, artinya untuk koefisien regresi model kelima sebesar 73,7% dan model keenam sebesar 51,4% dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat Ternate pada Pemilu Legislatif Kota tahun 2009.

Tabel 4.29
Analisa Regresi Dammy (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	.164	.024	4.462
2	.954 ^b	.911	.875	1.598
3	.960 ^c	.923	.864	1.664
4	.961 ^d	.923	.819	1.920
5	.962 ^e	.925	.737	2.318
6	.965 ^f	.931	.514	3.150

a. Predictors: (Constant), Kelurahan

b. Predictors: (Constant), Kelurahan, Alasan memilih partai yang sama

c. Predictors: (Constant), Kelurahan, Alasan memilih partai yang sama, Kelompok Marga

d. Predictors: (Constant), Kelurahan, Alasan memilih partai yang sama, Kelompok Marga, Keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan adat

e. Predictors: (Constant), Kelurahan, Alasan memilih partai yang sama, Kelompok Marga, Keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan adat, Alasan memilih Caleg

f. Predictors: (Constant), Kelurahan, Alasan memilih partai yang sama, Kelompok Marga, Keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan adat, Alasan memilih Caleg , Alasan Memilih Partai

BAB 5

PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas tiga pokok pembahasan yaitu kesimpulan, signifikansi teoritis dan rekomendasi. Pada pembahasan kesimpulan akan membahas temuan penelitian yang ada pada bab 2, 3 dan 4. Dalam signifikansi teoritis, akan membahas relevansi teoritis dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Sedangkan rekomendasi memberikan saran-saran atas temuan penelitian.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei, perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009 adalah perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel kelurahan, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki.

Pertama, faktor geografis posisi kelurahan yang berada dalam lingkungan Kesultanan Ternate dan bagian utara kesultanan rata-rata perolehan suara pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat, seperti di Kelurahan Soa-Sio dan Dufa-Dufa. Kelurahan lain yang berada diluar lingkungan Kesultanan Ternate atau bagian Selatan Kesultanan dimenangkan oleh partai lain, sesuai dengan kedekatan caleg dari kelurahan tersebut, misalnya PBB dan PBR di Kelurahan Salahudin, serta PAN di Kelurahan Makasar Timur.

Kedua, faktor keterlibatan dalam adat, responden yang memiliki hubungan dengan kelompok marga dan struktur pemerintahan adat Ternate memiliki kecenderungan untuk memilih Partai Demokrat. Responden yang memilih Demokrat sebanyak 60,9% adalah kelompok marga *heku*, dan 45,5% responden

mengaku memiliki hubungan dengan struktur pemerintahan adat, 27,3% dari jumlah tersebut responden memilih Partai Demokrat.

Ketiga, variabel kedekatan dengan partai politik dan caleg. 45% dari total responden mengaku memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu dan 79,6% dari mereka, mengaku memilih partai karena faktor kedekatan. Makna kedekatan dengan partai bagi masyarakat adat Ternate adalah mengenal partai tersebut karena rata-rata partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP memiliki tingkat kedekatan yang tinggi dibandingkan dengan partai lain. Sedangkan kedekatan dengan caleg, rata-rata dipengaruhi oleh kesamaan identitas karena hubungan keluarga dengan caleg, atau berdomisili pada kelurahan yang sama dengan caleg tersebut.

Keempat, variabel perilaku politik Sultan dan Boki. Dari 88,8% responden yang mengetahui keterlibatan Sultan di PDK pada Pemilu 2004, 95,2% mengatakan memilih PDK pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2004 karena mengikuti pilihan Sultan. Sedangkan pada Pemilu Legislatif Kota Tahun 2009, 84,8% dari total responden mengetahui keterlibatan Boki di Partai Demokrat, 77,1% pemilih dari partai tersebut mengatakan memilih Demokrat karena mengikuti pilihan Boki.

Perilaku politik Sultan dan Boki sebagai patron bagi masyarakat adat pada Pemilu Legislatif Kota Ternate, namun berdasarkan survei menunjukkan jumlah yang relatif berimbang antara responden tidak setuju dan setuju atas keterlibatan Sultan dalam politik. Mereka yang tidak setuju atas keterlibatan Sultan, memiliki persepsi negatif terhadap politik karena “politik itu kotor,” dan “politik penuh spekulasi”, sementara figur Sultan dipersepsikan sebagai pemimpin jujur, bersih serta penguasa yang mengayomi semua golongan dan kelompok (*alam makolano*). Meski ada sejumlah responden yang tidak setuju atas keterlibatan Sultan dalam politik, akan tetapi dalam pemilu Sultan tetap mendapat dukungan yang besar dari masyarakat adat Ternate karena mereka tetap berpegang teguh pada patron-klien dengan falsafah adat *jou se ngofangare*.

Masyarakat adat Ternate sebagai pemilih yang berdasarkan ikatan primordial dan berorientasi pada figur, memiliki konsistensi memilih yang rendah

Universitas Indonesia

pada Pemilu Legislatif Kota Ternate, karena 70% responden mengatakan memilih partai yang berbeda antara Pemilu 2004 dan 2009. Rata-rata responden yang mengatakan memilih partai yang berbeda pada pemilu tersebut, yaitu mereka yang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Alasan responden yang merubah pilihan partai sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku politik Sultan dan Boki, perilaku politik yang dimaksud adalah perubahan perilaku politik Sultan pada Pemilu 2009 dengan tidak menjadi bagian dari PDK, dan perubahan perilaku politik Boki dari caleg DPD pada Pemilu 2004 menjadi caleg Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Sedangkan 30% responden lainnya yang mengaku memilih partai yang sama adalah pemilih yang loyal terhadap partai, dan sebagian besar dari jumlah tersebut adalah pemilih Partai Golkar.

Hasil uji regresi menunjukkan kekuatan hubungan variabel kelurahan, keterlibatan dalam marga dan struktur pemerintahan adat, alasan memilih caleg dan partai, alasan memilih partai yang sama, dan kedekatan dengan caleg dan partai. Dari hasil uji regresi dummy dengan menggabungkan variabel kelurahan, keterlibatan dalam marga dan alasan memilih partai yang sama, terhadap variabel perilaku memilih menunjukkan koefisien determinasi paling tinggi sebesar 0.819, artinya 81,9% variabel ini dapat menjelaskan perilaku memilih masyarakat Ternate pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009.

Berdasarkan kesimpulan dari analisis chi-square dan regresi, maka hipotesis yang mengatakan variabel kelurahan, keterlibatan dalam kelompok marga dan struktur pemerintahan adat (keterlibatan dalam adat), alasan memilih caleg dan partai, alasan memilih partai yang sama, serta kedekatan dengan caleg dan partai berpengaruh pada perilaku memilih dapat diterima.

Redahnya pengetahuan responden mengenai program partai dan adanya kecenderungan pemilih pada figur partai yang dilandasi oleh ikatan primordial, kondisi ini mengindikasikan lemahnya fungsi partai dalam masyarakat adat Ternate. Kecenderungan pada ikatan primordial dalam memilih partai dan caleg partai akan berdampak pada melebarnya konflik yang melibatkan klan, suku dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak terlembagakan. Dengan mengembalikan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi

politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik maka potensi oligarki partai dan konflik kepentingan yang mengarah pada anarkisme dapat terkendali.

Dari hasil survei menunjukkan adanya harapan masyarakat adat agar Sultan tidak terlibat dalam politik yang mereka persepsikan negatif dan tidak pantas untuk seorang Sultan, karena politik adalah dunia kompetisi kepentingan yang akan membatasi peran Sultan sebagai *Alam Makolano* (pemimpin alam). Dengan terlibatnya Sultan dalam kompetisi kepentingan dalam politik, maka Sultan akan bersaing dengan masyarakat adat yang lain dan berpotensi mengurangi tingkat kharismatik Sultan. Berkurangnya tingkat kharisma Sultan merupakan indikator legitimasi atas Kesultanan Ternate, sedangkan redahnya legitimasi Sultan merupakan awal dari kehancuran Struktur Kesultanan Ternate. Oleh karena itu untuk mempertahankan legitimasi Sultan, maka sebaiknya Sultan tidak terlibat atau menjadi bagian dari partai politik.

5.2 Implikasi Teoritis

Konsep masyarakat adat dari Moniaga, Stavenhagen dan Kingsburry, maupun definisi yang dikeluarkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KAMAN), cukup membantu dalam menjelaskan perilaku pemilih masyarakat adat Ternate, walaupun disadari bahwa konsep tersebut terlalu umum, karena hanya mengidentifikasi masyarakat adat dengan pendekatan geografis, nilai dan kedaulatan atas tanah.

Sejarah Kesultanan Ternate yang dimulai sejak terjadinya eksodus besar-besaran dari Kesultanan Jailolo sekitar tahun 1250, kemudian membentuk komunitas awal yang di kenal dengan *tobo*, *tabanga*, *tobona* dan *toboleu*. Keempat komunitas tersebut yang menjadi cikal-bakal masyarakat adat Ternate, namun dengan pendekatan geografis dan kepemilikan atas tanah untuk memberi batas masyarakat adat dengan yang bukan adat, mungkin sulit untuk memberi batas yang jelas karena penduduk setiap hari bertambah dan terjadinya perkawinan silang membuat tidak jelas akan batasan tersebut.

Sedangkan signifikansi teori perilaku memilih yang terdiri dari faktor sosiologis dan psikologis dalam penelitian ini, sama dengan penelitian yang ada

sebelumnya bahwa faktor sosiologis dan psikologis adalah faktor yang menentukan dalam perilaku memilih. Namun yang berbeda dalam penelitian ini dibandingkan dengan studi perilaku memilih yang telah ada sebelumnya baik oleh Affan Gaffar maupun Saiful Mujani adalah objek penelitiannya, yaitu masyarakat adat Ternate yang mempunyai sejarah panjang yang dimulai sekitar abad ke-13.

Pada studi yang dilakukan oleh Gaffar mengenai pemilih di Jawa, bahwa faktor *socio-cultural belief*, *party identification* *social status* dan *pattern leaderships* adalah faktor yang berpengaruh pada perilaku pemilih. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Mujani antara 1999 dan 2009 menyebutkan *party identification*, *leaderships*, *self identification* dan *media campaigns* sebagai faktor yang berpengaruh dalam perilaku memilih di Indonesia. Namun temuan dalam penelitian ini, menunjukkan perilaku memilih masyarakat adat Ternate pada Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 terkait dengan ikatan primordial yang dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki.

Kesimpulan Angus Campbell dan kawan-kawan yang tergabung dalam Mahzab Michigan bahwa faktor psikologis sebagai *intervening variable* (variabel antara) untuk menjelaskan variabel lain, termasuk didalamnya faktor sosiologis terbukti dalam penelitian ini. Oleh karena itu hampir setiap variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini selalu melibatkan faktor kedekatan (psikologis) dengan caleg dan partai serta kedekatan pemilih dengan Sultan dan Boki.

Tabel Frekuensi Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate

Etnis (P1)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ternate	107	89.2	89.2	89.2
	Tidore	3	2.5	2.5	91.7
	Makian	5	4.2	4.2	95.8
	Tobelo	3	2.5	2.5	98.3
	Galela	1	.8	.8	99.2
	Sanana	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Partisipasi (P2)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	1	120	100.0	100.0	100.0

Partai Pilihan (P3)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Golkar	33	27.5	27.5	27.5
	Demokrat	38	31.7	31.7	59.2
	PPP	7	5.8	5.8	65.0
	PDIP	9	7.5	7.5	72.5
	PAN	7	5.8	5.8	78.3
	PKS	2	1.7	1.7	80.0
	PBR	6	5.0	5.0	85.0
	PBB	1	.8	.8	85.8
	PDK	3	2.5	2.5	88.3
	Hanura	2	1.7	1.7	90.0
	Gerindra	1	.8	.8	90.8
	PKPB	1	.8	.8	91.7
	Lainnya	10	8.3	8.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Alasan Memilih Partai (P4)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orientasi Caleg	21	17.5	17.5	17.5
	Orientasi Partai	21	17.5	17.5	35.0
	Orientasi Pada Identitas(suku, keluarga dan profesi)	40	33.3	33.3	68.3
	Orietasi Sultan dan Boki	18	15.0	15.0	83.3

Lampiran-2

	Ikut-Ikutan	13	10.8	10.8	94.2
	Tidak Menjawab	7	5.8	5.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Alasan Memilih Partai,Caleg,Atau Keduanya (P5)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Memilih partai politik saja	24	20.0	20.0	20.0
	Memilih calon legislatif saja	15	12.5	12.5	32.5
	Memilih partai dan calon legislatif	81	67.5	67.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Alasan Dalam Memilih Caleg (P6)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orientasi Keluarga	43	35.8	44.8	44.8
	Orientasi Sultan Dan Boki	20	16.7	20.8	65.6
	Mendapat Sumbagan dari Caleg	7	5.8	7.3	72.9
	Orientasi Partai (Pemilih Loyal, PNS, Caleg dan Partai SBY)	18	15.0	18.8	91.7
	Dekat Dengan Caleg	8	6.7	8.3	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan Filter	24	20.0		
	Total	120	100.0		

Nama Caleg (P7a)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	81	67.5	84.4	84.4
	Tidak tahu	15	12.5	15.6	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
	Total	120	100.0		

Asal partai (P7b)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	78	65.0	81.2	81.2
	Tidak tahu	18	15.0	18.8	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
	Total	120	100.0		

Program (P7c)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	17	14.2	17.7	17.7
	Tidak tahu	79	65.8	82.3	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
Total		120	100.0		

Pekerjaan Caleg (P7d)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	73	60.8	76.0	76.0
	Tidak tahu	23	19.2	24.0	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
Total		120	100.0		

Suku (P7e)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	75	62.5	78.1	78.1
	Tidak tahu	21	17.5	21.9	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
Total		120	100.0		

Tempat Tinggal (P7f)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	78	65.0	81.2	81.2
	Tidak tahu	18	15.0	18.8	100.0
	Total	96	80.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	24	20.0		
Total		120	100.0		

Partisipasi 2004 (P8)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya memilih	111	92.5	92.5	92.5
	Tidak memilih	8	6.7	6.7	99.2
	Tidak menjawab	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Pilihan 2004 dan 2009 (P9)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya sama	30	25.0	27.0	27.0
	Tidak sama	81	67.5	73.0	100.0
	Total	111	92.5	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	9	7.5		
Total		120	100.0		

Alasan Bagi Yang Memilih Partai Sama (P10)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Anggota keluarga saya sebagai caleg partai tersebut	5	4.2	15.6	15.6
	Saya dan keluarga adalah pemilih loyal partai	26	21.7	81.2	96.9
	Program partai tersebut lebih baik dari lain	1	.8	3.1	100.0
	Total	32	26.7	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	88	73.3		
Total		120	100.0		

Alasan Bagi Yang Memilih Partai Yang Berbeda (P11)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Kecewa dengan partai sebelumnya	10	8.3	12.8	12.8
	Figur/caleg pidah partai	15	12.5	19.2	32.1
	Ada partai baru yang lebih baik	8	6.7	10.3	42.3
	Mengikuti pilihan sultan	25	20.8	32.1	74.4
	Sebagai caleg partai	20	16.7	25.6	100.0
	Total	78	65.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	42	35.0		
Total		120	100.0		

Tabel Frekuensi Keterlibatan Dalam adat

Soa Sio (P12.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	76	63.3	63.3	63.3
	Tidak tahu	44	36.7	36.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Sangaji (P12.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	78	65.0	65.0	65.0
	Tidak tahu	42	35.0	35.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Cim (P12.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	77	64.2	64.2	64.2
	Tidak tahu	43	35.8	35.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Heku (P12.4)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	74	61.7	61.7	61.7
	Tidak tahu	46	38.3	38.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Soa Sio (P12.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
	Tahu	76	63.3	63.3	63.3
	Tidak tahu	44	36.7	36.7	100.0

Termasuk Atau Tidak Dalam Kelompok Marga (P13)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya termasuk	48	40.0	40.0	40.0
	Tidak termasuk	72	60.0	60.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Kelompok Marga (P.14)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Soa sio	9	7.5	18.8	18.8
	Sangaji	12	10.0	25.0	43.8
	Cim	7	5.8	14.6	58.3
	Heku	20	16.7	41.7	100.0
	Total	48	40.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	72	60.0		
Total		120	100.0		

Kelompok Marga Lain (P15)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	43	35.8	59.7	59.7
	Tidak	29	24.2	40.3	100.0
	Total	72	60.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	48	40.0		
Total		120	100.0		

Tubo (P16.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	77	64.2	64.2	64.2
	Tidak tahu	43	35.8	35.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Tabanga (P16.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	77	64.2	64.2	64.2
	Tidak tahu	43	35.8	35.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Toboleu (P16.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	77	64.2	64.2	64.2
	Tidak tahu	43	35.8	35.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Tobona (P16.4)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	77	64.2	64.2	64.2
	Tidak tahu	43	35.8	35.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Hubungan Dengan Komunitas Awal Ternate (P17)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya ada hubungan keturunan	29	24.2	37.7	37.7
	Tidak ada hubungan keturunan	25	20.8	32.5	70.1
	Tidak tahu	23	19.2	29.9	100.0
	Total	77	64.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	43	35.8		
Total		120	100.0		

Memiliki Hubungan Dengan Salah Satu Komunitas (P18)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tubo	3	2.5	10.3	10.3
	Tobona	4	3.3	13.8	24.1
	Tabanga	10	8.3	34.5	58.6
	Toboleu	12	10.0	41.4	100.0
	Total	29	24.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	91	75.8		
Total		120	100.0		

Bobato Dunia (P19.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	82	68.3	68.3	68.3
	Tidak tahu	38	31.7	31.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Bobato Akhirat (P19.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	82	68.3	68.3	68.3
	Tidak tahu	38	31.7	31.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Bobato-18 (P19.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Lampiran-2

Valid	Tahu	81	67.5	67.5	67.5
	Tidak tahu	39	32.5	32.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Keterlibatan Dalam Struktur Adat (P20)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	22	18.3	26.5	26.5
	Tidak	61	50.8	73.5	100.0
	Total	83	69.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	37	30.8		
Total		120	100.0		

Termasuk struktur Adat (P21)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Bobato dunia	11	9.2	50.0	50.0
	Bobato akhirat	8	6.7	36.4	86.4
	Bobato-18	3	2.5	13.6	100.0
	Total	22	18.3	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	98	81.7		
Total		120	100.0		

Keterlibatan Keluarga yang Lain (P22)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya ada	53	44.2	63.9	63.9

Bobato-18 (P19.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
	Tahu	81	67.5	67.5	67.5
	Tidak tahu	39	32.5	32.5	100.0
	Tidak ada	21	17.5	25.3	89.2
	Tidak tahu	9	7.5	10.8	100.0
	Total	83	69.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	37	30.8		
Total		120	100.0		

Keterlibatan Keluarga Dalam Struktur (P23)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Bobato dunia	34	28.3	64.2	64.2
	Bobato akhirat	17	14.2	32.1	96.2
	Bobato 18	2	1.7	3.8	100.0
	Total	53	44.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	67	55.8		
Total		120	100.0		

Adat Joko Kaha (P24.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	103	85.8	85.8	85.8
	Tidak tahu	17	14.2	14.2	100.0

Keterlibatan Keluarga Dalam Struktur (P23)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Bobato dunia	34	28.3	64.2	64.2
	Bobato akhirat	17	14.2	32.1	96.2
	Bobato 18	2	1.7	3.8	100.0
	Total	53	44.2	100.0	
Missing	Pertayaan filter	67	55.8		
Total		120	100.0	100.0	

Adat Kolili Kie (P24.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	98	81.7	81.7	81.7
	Tidak tahu	22	18.3	18.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Adat Fere Kie Matubu (P24.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	92	76.7	76.7	76.7
	Tidak tahu	28	23.3	23.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Ritual adat lain (P24. 4)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	35	29.2	29.2	29.2
	Tidak tahu	85	70.8	70.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Adat Joko Kaha (P25.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Pernah	95	79.2	92.2	92.2
	Tidak pernah	8	6.7	7.8	100.0
	Total	103	85.8	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	17	14.2		
Total		120	100.0		

Adat Kolili Kie (P25.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Pernah	76	63.3	77.6	77.6
	Tidak pernah	22	18.3	22.4	100.0
	Total	98	81.7	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	22	18.3		
Total		120	100.0		

Adat Fere Kie Matubu (P25.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Pernah	38	31.7	41.3	41.3
	Tidak pernah	54	45.0	58.7	100.0
	Total	92	76.7	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	28	23.3		
Total		120	100.0		

Lainnya (P25.4)

Adat Joko Kaha (P25.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Pernah	95	79.2	92.2	92.2
	Tidak pernah	8	6.7	7.8	100.0
	Total	103	85.8	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	17	14.2		
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Pernah	2	1.7	5.7	5.7
	Tidak pernah	33	27.5	94.3	100.0
	Total	35	29.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	85	70.8		
Total		120	100.0		

Jou Se Ngofangare (P26.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	83	69.2	69.2	69.2
	Tidak tahu	37	30.8	30.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Adat Se Atorang (P26.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	89	74.2	74.2	74.2
	Tidak tahu	31	25.8	25.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Adat Se Kabasarang (P26.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	83	69.2	69.2	69.2
	Tidak tahu	37	30.8	30.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Sere Se Duniru (P26.4)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	50	41.7	41.7	41.7
	Tidak tahu	70	58.3	58.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Ngale Seduhu (P26.5)

Adat Se Atorang (P26.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
	Tahu	89	74.2	74.2	74.2
	Tidak tahu	31	25.8	25.8	100.0
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	42	35.0	35.0	35.0
	Tidak tahu	78	65.0	65.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Cing Se Cingare (P26.6)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	39	32.5	32.5	32.5
	Tidak tahu	81	67.5	67.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Sumber Pengetahuan Falsafah (P27)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Dalam lingkungan keluarga	63	52.5	70.8	70.8
	Dalam lingkungan masyarakat	19	15.8	21.3	92.1
	Dari lembaga kesultanan	7	5.8	7.9	100.0
	Total	89	74.2	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	31	25.8		
Total		120	100.0		

Jou (P28.1)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	105	87.5	87.5	87.5
	Tidak tahu	15	12.5	12.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Dano (P28.2)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	103	85.8	85.8	85.8
	Tidak tahu	17	14.2	14.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Soangare (P28.3)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	102	85.0	85.0	85.0
	Tidak tahu	18	15.0	15.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Balakusu Sikano-Kano (P28.4)

		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	101	84.2	84.2	84.2
	Tidak tahu	19	15.8	15.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

TERMASUK GOLONGAN YANG MANA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	JOU	2	1.7	1.7	1.7
	SOANGARE	9	7.5	7.5	9.2
	DANO	22	18.3	18.3	27.5
	BALAKUSU	60	50.0	50.0	77.5
	TIDAK TERMASUK	27	22.5	22.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Tabel Frekuensi Kedekatan Dengan Parpol

Kedekatan Dengan Parpol (P33)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya ada	54	45.0	45.0	45.0
	Tidak ada	63	52.5	52.5	97.5
	Tidak menjawab	3	2.5	2.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Memilih Partai Yang Dekat P34)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Memilih	43	35.8	79.6	79.6
	Tidakmemilih	11	9.2	20.4	100.0
	Total	54	45.0	100.0	

Lampiran-2

Missing	Pertanyaan filter	66	55.0		
Total		120	100.0		

Bagain Dari Partai Politik P35)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	14	11.7	32.6	32.6
	Tidak	29	24.2	67.4	100.0
	Total	43	35.8	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	77	64.2		
Total		120	100.0		

Keterlibatan Dalam Organiasasi Kemasyarakatan P36)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	13	10.8	19.7	19.7
	Tidak	53	44.2	80.3	100.0
	Total	66	55.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	54	45.0		
Total		120	100.0		

Ketertarikan Pada Isu

Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Adat (P37)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Masalah kesejatraan ekonomi	38	31.7	31.7	31.7
	Masalah perlindungan hak-hak adat	4	3.3	3.3	35.0
	Sengketa lahan bandar	2	1.7	1.7	36.7
	Akses terhadap pendidikan	13	10.8	10.8	47.5
	Akses terhadap pelayanan kesehatan	1	.8	.8	48.3
	Kenakalan remaja	2	1.7	1.7	50.0
	Tidak ada masalah	60	50.0	50.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Partai Yang Mengangkat Masalah Adat (P38)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ada	66	55.0	55.0	55.0
	Tidak tahu	48	40.0	40.0	95.0
	Tidak tahu	6	5.0	5.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Memilih Partai Yang Mengangkat Isu (P39)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	15	12.5	22.7	22.7
	Tidak	51	42.5	77.3	100.0
	Total	66	55.0	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	54	45.0		
Total		120	100.0		

Sultan/Boki memperjungkan masyarakat adat (P40)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	75	62.5	62.5	62.5
	Tidak	32	26.7	26.7	89.2
	Tidak tahu	13	10.8	10.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Perilaku politik Sultan Dan Boki

Pengetahuan Sultan Sebagai Pengurus PDK (P44)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	97	80.8	80.8	80.8
	Tidak tahu	23	19.2	19.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Pemilih Partai PDK (P45)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	62	51.7	51.7	51.7
	Tidak	47	39.2	39.2	90.8
	Lupa	7	5.8	5.8	96.7
	Belum punya hak pilih pada tahun 2004	4	3.3	3.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Memilih PDK Karena Sultan (P46)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	59	49.2	95.2	95.2
	Tidak	3	2.5	4.8	100.0

Lampiran-2

	Total	62	51.7	100.0
Missing	Pertanyaan Filter	58	48.3	
Total		120	100.0	

Alasan Mengikuti Pilihan Sultan (P47)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Takut di timpah bala	4	3.3	6.5	6.5
	Wujud dari jou se ngofangare	29	24.2	46.8	53.2
	Karena sultan dan boki pelindung adat	7	5.8	11.3	64.5
	Lainnya	22	18.3	35.5	100.0
	Total	62	51.7	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	58	48.3		
Total		120	100.0		

Pengetahuan Boki Sebagai Pengurus Partai Demokrat (P48)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Tahu	101	84.2	84.2	84.2
	Tidak tahu	19	15.8	15.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Memilih Partai Demokrat karena Boki Sebagai Caleg Demokrat (P49)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	27	22.5	71.1	71.1
	Tidak	11	9.2	28.9	100.0
	Total	38	31.7	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	82	68.3		
Total		120	100.0		

Alasan Mengikuti Pilihan Boki (P50)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Takut di timpah bala	1	.8	3.7	3.7
	Wujud dari <i>Jou Sengopangare</i>	11	9.2	40.7	44.4
	Karena Boki dan Sultan pelindung adat	8	6.7	29.6	74.1
	Lainnya	7	5.8	25.9	100.0

	Total	27	22.5	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	93	77.5		
Total		120	100.0		

Pengaruh <i>Jou</i> Dalam Kampanye (P51.1)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	60	50.0	50.0	50.0
	Tidak	60	50.0	50.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Pengaruh <i>dano</i> dalam kampanye (P51.2)					
		Frequency	Percent	Valid percent	Cumulative percent
Valid	Ya	7	5.8	5.8	5.8
	Tidak	113	94.2	94.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Pengaruh <i>Soangare</i> dalam Kampanye (P51.3)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	YA	7	5.8	5.8	5.8
	TIDAK	113	94.2	94.2	100.0

Pengaruh Soangare dalam Kampanye (P51.3)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	YA	7	5.8	5.8	5.8
	TIDAK	113	94.2	94.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Keterlibatan Sultan Dalam Politik (P57)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	57	47.5	47.5	47.5
	Tidak Setuju	58	48.3	48.3	95.8
	Tidak Tahu	5	4.2	4.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Keterlibatan Boki Dalam Politik (P58)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	58	48.3	50.9	50.9
	Tidak Setuju	15	12.5	13.2	64.0
	Tidak Tahu	41	34.2	36.0	100.0
	Total	114	95.0	100.0	
Missing	System	6	5.0		

Keterlibatan Boki Dalam Politik (P58)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	58	48.3	50.9	50.9
	Tidak Setuju	15	12.5	13.2	64.0
	Tidak Tahu	41	34.2	36.0	100.0
	Total	114	95.0	100.0	
Missing	System	6	5.0		
Total		120	100.0		

Tabel Frekuensi Kedekatan Dengan Caleg

M TAUFAN ANDILI (P41.1)					
		FREQUENCY	PERCENT	VALID PERCENT	CUMULATIVE PERCENT
VALID	TAHU	76	63.3	63.3	63.3
	TIDAK TAHU	44	36.7	36.7	100.0
	TOTAL	120	100.0	100.0	

ASGARA SALEH (P41.2)					
		FREQUENCY	PERCENT	VALID PERCENT	CUMULATIVE PERCENT
VALID	TAHU	64	53.3	53.3	53.3
	TIDAK TAHU	56	46.7	46.7	100.0
	TOTAL	120	100.0	100.0	

ABDULLHA TAHIR (P41.3)					
		FREQUENCY	PERCENT	VALID PERCENT	CUMULATIVE PERCENT
VALID	TAHU	57	47.5	47.5	47.5
	TIDAK TAHU	63	52.5	52.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

MERLISA (P41.4)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TAHU	58	48.3	48.3	48.3
	TIDAK TAHU	62	51.7	51.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

FAISAL ASSEGAF (P41.5)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TAHU	30	25.0	25.0	25.0
	TIDAK TAHU	90	75.0	75.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

IS SUAIB (P41.6)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TAHU	39	32.5	32.5	32.5
	TIDAK TAHU	81	67.5	67.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

HUSNI BOPENG (P41.7)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahu	48	40.0	40.0	40.0
	Tidak tahu	72	60.0	60.0	100.0

HUSNI BOPENG (P41.7)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tahu	48	40.0	40.0	40.0
	Tidak tahu	72	60.0	60.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

FUAD AL HADI (P41.8)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahu	38	31.7	31.7	31.7
	Tidak tahu	82	68.3	68.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

ERNI DRAKEL (P41.9)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahu	47	39.2	39.2	39.2
	Tidak tahu	73	60.8	60.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

ABDURRAHMAN AL JODKJA (P41.10)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahu	41	34.2	34.2	34.2
	Tidak tahu	79	65.8	65.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Kedekatan Dengan Anggota DPRD DAPIL II (P42)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	51	42.5	42.5	42.5
	Tidak	66	55.0	55.0	97.5
	Tidak menjawab	3	2.5	2.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

MEMILIKI KEDEKATAN DENGAN SALAH SATU ANGGOTA DPRD DAPIL II (P43)					
		frequency	percent	valid percent	cumulative percent
VALID	M Taufan Andili	8	6.7	15.7	15.7
	Merlisa	7	5.8	13.7	29.4
	Husni Bopeng	10	8.3	19.6	49.0
	Asgar Saleh	2	1.7	3.9	52.9
	Faisal Assagaf	4	3.3	7.8	60.8
	Fuad al Hadi	10	8.3	19.6	80.4
	Abdullah Tahir	5	4.2	9.8	90.2
	Is Suaib	5	4.2	9.8	100.0
	TOTAL	51	42.5	100.0	
Missing	Pertanyaan filter	69	57.5		
Total		120	100.0		

Tabel Uji *Chi-Square*

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelurahan * PARTAI PILIHAN	120	100.0%	0	.0%	120	100.0%

Lampiran-2

Alasan memilih partai yang sama * Partai Pilihan	32	26.7%	88	73.3%	120	100.0%
Kedekatan dengan caleg * Partai Pilihan	51	42.5%	69	57.5%	120	100.0%
Alasan Memilih Partai * Partai Pilihan	120	100.0%	0	.0%	120	100.0%
Alasan memilih Caleg * Partai Pilihan	96	80.0%	24	20.0%	120	100.0%
Keterlibatan Keluarga * Partai Pilihan	83	69.2%	37	30.8%	120	100.0%
Termasuk Atau Tidak Dalam Kelompok Marga * Partai Pilihan	120	100.0%	0	.0%	120	100.0%

Kelurahan * Partai Pilihan

Crosstab															
Count															
		PARTAI PILIHAN													
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PBB	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	Lainnya	Total
Kelurahan	Akehuda	6	4	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	2	20
	Dufa-Dufa	2	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	20
	kampung makassar	7	3	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	3	20
	Sallahuddin	5	3	1	0	2	0	6	1	0	0	0	1	1	20
	Soa Sio	4	7	2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	20
	Sangaji	9	5	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	20
Total		33	38	7	9	7	2	6	1	3	2	1	1	10	120

Crosstab															
Count															
		PARTAI PILIHAN													
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PBB	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	Lainnya	Total
Kelurahan	Akehuda	6	4	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	2	20
	Dufa-Dufa	2	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	20
	kampung makassar	7	3	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	3	20
	Sallahuddin	5	3	1	0	2	0	6	1	0	0	0	1	1	20
	Soa Sio	4	7	2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	20
	Sangaji	9	5	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	20

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.158E2 ^a	60	.000
Likelihood Ratio	99.250	60	.001
Linear-by-Linear Association	.001	1	.971
N of Valid Cases	120		

a. 66 cells (84.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Alasan memilih partai yang sama * Partai Pilihan

Crosstab

Count											
		PARTAI PILIHAN									
		GOLKAR	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PDK	LAINNYA	Total	
Alasan memilih partai yang sama	ANGGOTA KELUARGA SAYA SEBAGAI CALEG PARTAI TERSEBUT	2	0	0	1	0	0	1	1	5	
	SAYA DAN KELUARGA ADALAH PEMILIH LOYAL PARTAI	17	3	3	0	1	0	1	1	26	
	PROGRAM PARTAI TERSEBUT LEBIH BAIK DARI LAIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Total		19	3	3	1	1	1	2	2	32	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	42.714 ^a	14	.000
Likelihood Ratio	17.960	14	.209
Linear-by-Linear Association	1.273	1	.259
N of Valid Cases	32		

a. 23 cells (95.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

Kedekatan dengan caleg * Partai Pilihan

Crosstab												
Count												
		PARTAI PILIHAN										
		GOLKAR	DEMOKRAT	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	GERINDRA	PKPB	LAINNYA	Total
Kedekatan dengan caleg	M TAUFAN ANDILI	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8
	MERLISA	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	7
	HUSNI BOPENG	3	0	0	2	4	0	0	1	0	0	10
	ASGAR SALEH	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	FAISAL ASSAGAF	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4

Lampiran-2

	FUAD AL HADI	3	1	0	0	1	0	4	0	0	1	10
	ABDULLAH TAHIR	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	IS SUAIB	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	5
Total		16	9	3	5	5	1	5	1	1	5	51

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.283E2 ^a	63	.000
Likelihood Ratio	98.137	63	.003
Linear-by-Linear Association	1.090	1	.296
N of Valid Cases	51		

a. 80 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

Alasan Memilih Partai * Partai Pilihan

Crosstab															
Count		PARTAI PILIHAN													Total
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PBB	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	LAINNYA	
Alasan Memilih Partai	Orientasi Caleg	11	3	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	1	21
	Orientasi Partai	13	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	21

Lampiran-2

Orientasi Pada Identitas(suku, keluarga dan profesi)	3	9	3	7	6	1	2	0	1	1	1	1	1	5	40
Orietasi Sultan dan Boki	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Ikut-Ikutan	4	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
Tidak Menjawab	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7
Total	33	38	7	9	7	2	6	1	3	2	1	1	10	120	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.162E2 ^a	60	.000
Likelihood Ratio	119.009	60	.000
Linear-by-Linear Association	.024	1	.878
N of Valid Cases	120		

a. 71 cells (91.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

Alasan memilih Caleg * Partai Pilihan

Crosstab

Count																
		PARTAI PILIHAN														
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PBB	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	Lainnya	Total	
Alasan memilih Caleg	Orientasi Keluarga	6	8	5	7	4	1	2	0	2	2	1	1	4	43	
	Orientasi Sultan Dan Boki	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	
	Mendapat Sumbagan dari Caleg	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	
	Orientasi Partai (Pemilih Loyal, PNS, Caleg dan Partai SBY)	11	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	18	
	Dekat Dengan Caleg	2	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	8	
Total		23	30	5	9	7	1	5	1	2	2	1	1	9	96	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	96.960 ^a	48	.000
Likelihood Ratio	95.364	48	.000
Linear-by-Linear Association	.622	1	.430
N of Valid Cases	96		

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	96.960 ^a	48	.000
Likelihood Ratio	95.364	48	.000
Linear-by-Linear Association	.622	1	.430

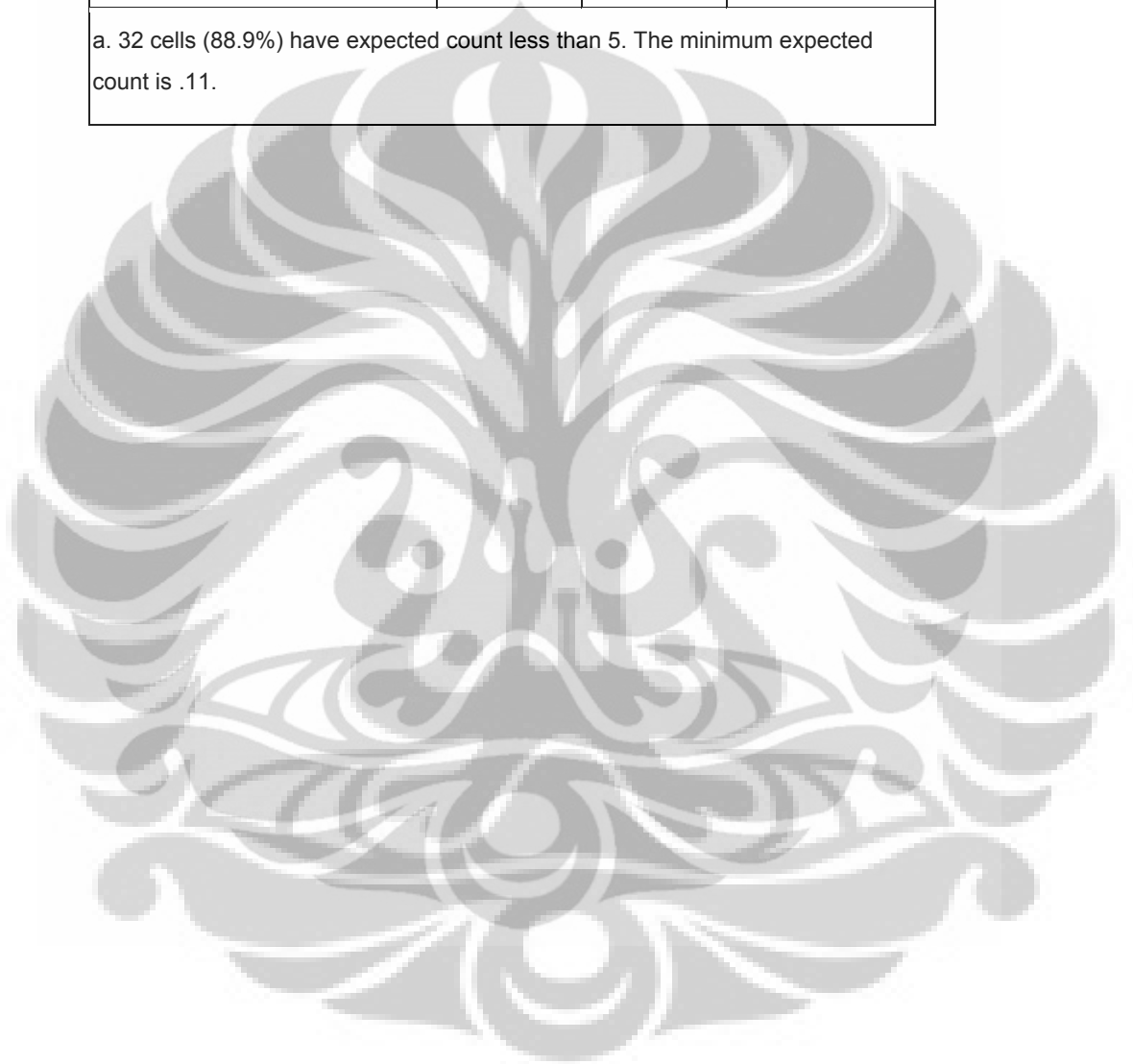
a. 61 cells (93.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07.

Keterlibatan Keluarga Struktur Pemerintahan Adat * Partai Pilihan

Crosstab														
Count														
		PARTAI PILIHAN												
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	Lainnya	Total
Keterlibatan keluarga	Ya ada	12	24	2	3	1	1	2	3	0	1	0	4	53
	Tidak ada	10	2	2	0	1	0	0	0	2	0	1	3	21
	Tidak tahu	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total		23	31	4	6	2	1	2	3	2	1	1	7	83

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square	37.376 ^a	22	.022
Likelihood Ratio	39.023	22	.014
Linear-by-Linear Association	.038	1	.845
N of Valid Cases	83		
a. 32 cells (88.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.			



KUESIONER

SURVEI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT TERNATE
PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA TERNATE TAHUN 2009

Nomor Kuesioner

A. Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb, Saya Agusmawanda mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sedang melakukan penelitian tentang "Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate Pada Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009". Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertama-tama kami ingin memilih pria atau wanita dewasa berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah dalam rumah ini. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam pengisian tabel *kish grid* berikut:

PETUNJUK: MEMILIH RESPONDEN DENGAN KISH GRID

Tuliskan nama-nama anggota keluarga di rumah ini yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah pada tabel di bawah ini. Pembantu, satpam, orang indekost tidak termasuk yang didaftar. JIKA NOMOR KUESIONER INI GANJIL, YANG DITULIS DALAM DAFTAR HANYALAH ANGGOTA KELUARGA LAKI-LAKI SAJA. JIKA NOMOR KUESIONER INI GENAP, YANG DITULIS DALAM DAFTAR HANYA ANGGOTA KELUARGA PEREMPUAN SAJA. Urutkan nama-nama anggota keluarga laki-laki atau perempuan tersebut dari yang paling tua, ke yang paling muda. Selanjutnya, tarik garis mendatar pada nama orang urutan terakhir, kemudian tarik garis ke bawah dari nomor yang sudah dilingkari. Pertemuan garis tersebut menunjukkan nomor responden yang terpilih.

No	Nama	Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
4			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
5			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
7			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
8			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
9			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1

P4

Apakah alasan utama Bapak/Ibu memilih partai politik tersebut? (JAWAB SATU SAJA)

1. Mempunyai tokoh atau pemimpin yang berwibawa
2. Bersih dari korupsi dibandingkan dengan partai politik lainnya
3. Mempunyai program yang lebih baik dibandingkan dengan partai politik lain.
4. Asasnya sesuai dengan keyakinan saya (misalnya: kerakyatan, kebangsaan, atau keagamaan)
5. Identitasnya mewakili identitas saya (misalnya: profesi, suku, atau kelas sosial)
6. Dipimpin oleh figur yang berpengalaman
7. Ikut-ikutan
8. Tidak menjawab
9. Lainnya (sebutkan) _____

P5

Apakah Bapak/Ibu mencoblos atau mencontreng **partai politik saja, calon legislatif saja** (caleg), **atau keduanya** pada pemilu legislatif kota Ternate tahun 2009

1. Memilih Partai Politik saja (KE PERTANYAAN P8)
2. Memilih Calon Legislatif saja (KE PERTANYAAN P6)
3. Memilih Partai dan Calon Legislatif (KE PERTANYAAN P6)

P6

Jika Bapak/Ibu mencoblos/mencontreng **calon legislatif**, maka apakah alasan utamanya ?

1. Karena ada huhungan keluarga dengan calon
2. Karena Calon Legislatif memiki hubungan Sultan/ Boki
3. Karena mendapat sumbangan dari calon legislatif yang bersangkutan
4. Lainnya (sebutkan) _____

P7

Informasi apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang **calon legislatif** dipilih tersebut ?

Informasi	Tahu	Tidak Tahu
a. Nama Caleg	1	2
b. Asal Partai	1	2
c. Program yang ditawarkan	1	2
d. Pekerjaan Caleg saat ini	1	2
e. Suku bangsa Caleg	1	2
f. Tempat tinggal asal atau domisili	1	2

P8

Apakah Bapak/Ibu memilih atau tidak memilih pada pemilu legislatif tahun 2004?

1. Ya memilih (KE PERTANYAAN P9)
2. Tidak memilih (KE PERTANYAAN P12)
3. Tidak menjawab (KE PERTANYAAN P12)

P9

Jika **memilih**, apakah partai politik yang Bapak/Ibu pilih pada pemilu 2004 sama atau tidak sama dengan partai yang dipilih pada pemilu legislatif kota Ternate tahun 2009 ?

1. Ya sama (KE PERTANYAAN P10)
2. Tidak sama (KE PERTANYAAN P11)

P10

Jika **sama**, apakah alasan utama Bapak/Ibu memilih partai yang sama pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009?

1. Anggota keluarga saya sebagai caleg partai tersebut
2. Saya dan keluarga adalah pemilih loyal partai tersebut
3. Program partai tersebut lebih baik dari partai lain
4. Lainnya (sebutkan) _____

P11

Jika **tidak sama**, apakah alasan utama Bapak/Ibu/ mengubah pilihan partai politik?

1. Kecewa dengan partai sebelumnya
2. Figur/caleg pindah partai
3. Partai tidak lolos peserta pemilu
4. Ada partai baru yang lebih baik
5. Mengikuti pilihan Sultan
6. Mengikuti pilihan Boki
7. Lainnya (sebutkan)_____

2. Faktor Sosiologis

A. Keterlibatan dalam adat

P12

Dalam ikatan kekerabatan masyarakat adat Ternate, dikenal ada empat kelompok **marga/klan yaitu *soa sio, sangaji, cim dan heku***. Apakah Bapak/Ibu tahu atau tidak tahu keempat kelompok marga tersebut? **{PERLIHATKAN KARTU A}**

	Marga	Tahu	Tidak Tahu
12.1	<i>Soa sio</i>	1	2
12.2	<i>Sangaji</i>	1	2
12.3	<i>Cim</i>	1	2
12.4	<i>Heku</i>	1	2

P13

Apakah Bapak/Ibu termasuk salah satu dari keempat kelompok marga tersebut ?

1. Ya termasuk (KE PERTANYAAN P14)
2. Tidak termasuk (KE PERTANYAAN P15)

P14

Jika **termasuk salah satu dari** keempat marga/klan tersebut, maka Bapak/Ibu pada kelompok yang mana ?

1. Soa Sio
2. Sangaji
3. Cim
4. Heku

P15

Jika **tidak termasuk salah satu dari** keempat marga/klan tersebut, apakah Bapak/Ibu memiliki marga/klan ?

1. Ya Sebutkan_____
2. Tidak

P16

Cikal- bakal masyarakat adat Ternate bersumber dari empat komunitas awal yaitu ***Tubo, Tobona, Tabanga dan Tobeu***. Apakah Bapak/Ibu tahu atau tidak tahu keempat komunitas awal tersebut? **{PERLIHATKAN KARTU B}**

	Komunitas Awal	Tahu (KE PERTANYAAN P17)	Tidak tahu (KE PERTANYAAN P18)
16.1	<i>Tubo</i>	1	2
16.2	<i>Tabanga</i>	1	2
16.3	<i>Toboleu</i>	1	2

16.4	<i>Tobona</i>	1	2
------	---------------	---	---

P17

Jika **tahu** komunitas tersebut, apakah Bapak/Ibu memiliki hubungan silsilah keturunan dengan salah satu komunitas adat Ternate tersebut ?

1. Ya punya hubungan silsilah (KE PERTANYAAN P18)
2. Tidak punya hubungan silsilah (KE PERTANYAAN P19)
3. Tidak Tahu (KE PERTANYAAN P19)

P18

Jika **punya hubungan keturunan**, maka Bapak/Ibu termasuk komunitas adat yang mana?

1. Tubo
2. Tobona
3. Tabanga
4. Tobelevu

P19

Kesultanan Ternate memiliki struktur pemerintahan, yang terdiri dari **Bobato Dunia** (*Jogugu, Kapita Laut, Kapita Perang, Hukum Soa Sio, Hukum Sangaji, Tulilamo*), **Bobato Akhir** (*Kadi, Imam, Khatib, dan Moding*) dan **Bobato 18** (perwakilan marga). Apakah Bapak/Ibu tahu atau tidak tahu struktur tersebut ? { PERLIHATKAN KARTU C }

	Struktur	Tahu (KE PERTANYAAN P20)	Tidak tahu (KE PERTANYAAN P24)
19.1	<i>Bobato Dunia</i>	1	2
19.2	<i>Bobato Akhirat</i>	1	2
19.3	<i>Bobato -18</i>	1	2

P20

Jika **tahu struktur** tersebut, apakah Bapak/Ibu termasuk salah satu dari struktur tersebut ?

1. Ya (KE PERTANYAAN P21 dan P22)
2. Tidak (KE PERTANYAAN P22)

P21

Jika **termasuk**, maka Bapak/Ibu pada struktur yang mana ?

1. Bobato Dunia
2. Bobato Akhirat
3. Bobato-18

P22

Apakah ada anggota keluarga yang sedang/pernah menjabat struktur tersebut ?

1. Ya ada (KE PERTANYAAN P23)
2. Tidak ada (KE PERTANYAAN P24)
3. Tidak tahu (KE PERTANYAAN P24)

P23

Jika **ada anggota keluarga yang sedang/pernah menjabat**, maka pada struktur yang mana ?

1. Bobato Dunia
2. Bobato Akhirat
3. Bobato-18

P24

Masyarakat adat Ternate memiliki nilai dalam bentuk ritual-ritua adat yaitu *joko-kaha, kololi-kiyé, fere-kiyé matubu* yang diwariskan secara tutun temurun. Apakah Bapak/Ibu tahu atau tidak ritual tersebut ? { PERLIHATKAN KARTU D }

	Ritual Adat	Tahu (KE PERTAYAAN P25)	Tidak Tahu (KE PERTAYAAN P25)
24.1	.Adat joko-kaha (injak tanah)	1	2
24.2	.Adat kololi-kiye(keliling gunung)	1	2
24.3	.Adat fere-kiye matubu (naik puncak gunung)	1	2
25.4	.Ritual Adat yang lain.....	1	2

P25

Jika tahu ritual adat tersebut, apakah Bapak/Ibu pernah menjalankan ritual adat berikut ?

	Ritual Adat	Pernah	Tidak Pernah
25.1	.Adat joko-kaha (injak tanah)	1	2
25.2	.Adat kololi-kiye(keliling gunung)	1	2
25.3	.Adat fere-kiye matubu (naik puncak gunung)	1	2
25.4	.Ritual Adat yang lain.....	1	2

P26

Selain ritual-ritual adat, masyarakat adat Ternate memiliki falsafah yang digunakan sebagai prinsip dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *Jou se Ngofangare, Adat se Atorang, Adat se Kabasarang, Sere se Duniru, Ngale se Duhu, Cing se Cara*. Apakah Bapak/Ibu tahu falsafah tersebut? {PERLIHATKAN KARTU E}

	Falsafah adat	Tahu (KE PERTAYAAN P27)	Tidak tahu (KE PERTAYAAN P28)
26.1	<i>Jou se Ngofangare (hub.Jou dgn rakyat)</i>	1	2
26.2	<i>Adat se Atorang (tata nilai)</i>	1	2
26.3	<i>Adat se Kabasarang(saling menghormati)</i>	1	2
26.4	<i>Sere se Duniru (kesenian tradisional)</i>	1	2
26.5	<i>Ngale se Duhu</i>	1	2
26.6	<i>Cing se Cingare(Tenggang Rasa)</i>	1	2

P27

Jika Bapak/Ibu tahu falsafah adat tersebut, darimana anda memperoleh pengetahuan tentang falsafah tersebut?

1. Dalam lingkungan keluarga
2. Dalam lingkungan masyarakat
3. Dalam buku sejarah
4. Dari lembaga kesultanan
5. Lainnya (sebutkan) _____

P28

Masyarakat adat Ternate memiliki penggolongan (stratifikasi) berdasarkan keturunan, yaitu golongan *Jou, Dano, Soangare* dan *Balakusu Sinano-Kano*. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu atau tidak tahu penggolongan tersebut?. {PERLIHATKAN KARTU F}

	Stratifikasi	Tahu (KE PERTAYAAN P29)	Tidak Tahu (KE PERTAYAAN P30)
--	--------------	-------------------------	-------------------------------

28.1	Jou	1	2
28.2	Dano	1	2
28.3	Soangare	1	2
28.4	Balakusu sikano-kano	1	2

P29

Jika Bapak/Ibu tahu penggolongan tersebut, maka Bapak/Ibu termasuk golongan yang mana?

1. Jou (Kel. sampai keturun ketiga)
2. Soangare (Golongan kerabat dalam istana yang turun temurun)
3. Dano-dano (Cucu Sultan dari perkawinan luar istana)
4. Balakusu Sikano-Kano (Rakyat biasa)

B. Sosialisasi Politik Dalam Keluarga**P30**

Apakah status Bapak/Ibu dalam rumah tangga ?

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Kepala keluarga | 4. Menantu |
| 2. Istri | 5. Anak <i>piarah</i> (asuh) |
| 3. Anak kandung | 6. Kerabat Dekat (Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Sepupu) |

P31

Seberapa seringkah Bapak/Ibu membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan politik dalam keluarga, misalnya tentang pemerintahan, partai politik, dan sebagainya?

1. Sering
2. Kadang-kadang
3. Sangat jarang
4. Tidak peran
5. Tidak menjawab

P32

Di antara anggota keluarga Bapak/Ibu, siapakah yang paling berpengaruh dalam menentukan partai politik yang dipilih pada pemilu legislatif kota Ternate tahun 2009

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Suami | 6. Kerabat Dekat |
| 2. Anak <i>piarah</i> (asuh) | 7. Anak kandung |
| 3. Istri | 8. Lainnya
(sebutkan) _____ |
| 4. Saya Sendiri | 9. Tidak ada |
| 5. Orang tua | |

3. Faktor Psikologis**A. Kedekatan Dengan Parpol****P33**

Apakah selama ini ada partai politik yang Bapak/Ibu merasa dekat ?

1. Ya ada (KE PERTANYAAN P34)
2. Tidak ada (KE PERTANYAAN P36)
3. Tidak menjawab, (KE PERTANYAAN P36)

P34

Jika **ada**, apakah Bapak/Ibu memilih partai politik tersebut pada pemilu legislatif kota Ternate tahun 2009

1. Ya (KE PERTANYAAN P35)

2. Tidak (KE PERTANYAAN P37)
3. Tidak menjawab (KE PERTANYAAN P37)

P35

Apakah Bapak/Ibu menjadi bagian dari partai tersebut, misalnya sebagai anggota atau pengurus partai ?

1. Ya
2. Tidak

P36

Apakah Bapak/Ibu sedang atau pernah terlibat dalam organisasi sosial kemasyarakatan ?

1. Ya
2. Tidak

B. Ketertarikan Pada Isu

P37

Permasalahan apakah yang menurut Bapak/Ibu dihadapi oleh masyarakat adat Ternate saat ini ?{BOLEH LEBIH DARI SATU}

1. Masalah kesejatan ekonomi
2. Masalah perlindungan hak-hak adat
3. Sengketa lahan bandara
4. Akses terhadap pendidikan
5. Akses terhadap pelayanan kesehatan
6. Lainnya (sebutkan)_____

P38

Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah ada atau tidak ada partai politik yang mengangkat masalah-masalah tersebut dalam kampanye pada pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 ?

1. Ada (KE PERTANYAAN P39)
2. Tidak ada (KE PERTANYAAN P40)
3. Tidak tahu (KE PERTANYAAN P40)

P39

Apakah partai politik yang Bapak/Ibu pilih pada pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009 mengangkat masalah-masalah adat Ternate dalam kampanye pemilu ?

1. Ya
2. Tidak

P40

Selama ini Sultan dan Boki menjadi anggota DPR-RI dan DPD-RI dari Maluku Utara, menurut Bapak/Ibu apakah Sultan dan Boki memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat Ternate tersebut ?

1. Ya
2. Tidak
3. Tidak tahu

C. Kedekatan dengan Caleg

P41

Berikut ini adalah nama-nama anggota DPRD kota Ternate tahun 2009 dari Dapil II Ternate Utara-Tengah

Apakah Bapak/Ibu tahu atau tidak tahu mereka yang disebutkan berikut ini? {PERLIHATKAN KARTU G }

	Nama-Nama	Tahu	Tidak
--	-----------	------	-------

			tahu
1	M Taufan Andili	1	2
2	Asgar Saleh	1	2
3	Abdullah Tahir	1	2
4	Merlisa	1	2
5	Faisal Assagaf	1	2
6	Is Suaib	1	2
7	Husni Bopeng	1	2
8	Fuad Al Hadi	1	2
9	Erni Drakel	1	2
10	Abdurrahman Aldjokja	1	2

P42

Jika **tahu**, apakah Bapak/Ibu memiliki kedekatan dengan salah satu dari anggota DPRD kota Ternate tahun 2009 dari Dapil II Ternate Utara-Tengah ?

1. Ya (KE PERTANYAAN P43)
2. Tidak (KE PERTANYAAN P44)
3. Tidak menjawab (KE PERTANYAAN P44)

P43

Jika **memiliki** kedekatan, maka anggota DPRD kota Ternate yang manakah Bapak/Ibu merasa paling dekat ?

{PERLIHATKAN KARTU G }

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. M Taufan Andili | 6. Faisal Assagaf |
| 2. Merlisa | 7. Fuad Al Hadi |
| 3. Husni Bopeng | 8. Abdullah Tahir |
| 4. Abdurrahman Aldjokja | 9. Is Suaib |
| 5. Asgar Saleh | 10. Erni Drakel |

D. Perilaku Politik Sultan Dan Boki

P44

Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa Sultan pernah menjadi pengurus partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) ?

1. Tahu
2. Tidak Tahu

P45

Apakah Bapak/Ibu memilih Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada pemilu 2004

1. Ya (KE PERTANYAAN P46)
2. Tidak (KE PERTANYAAN P48)
3. Lupa (KE PERTANYAAN P48)
4. Belum punya hak pilih pada tahun 2004 (KE PERTANYAAN P48)

P46

Apakah Bapak/Ibu memilih Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) karena Sultan menjadi pengurus PDK ?

1. Ya (KE PERTANYAAN P62)
2. Tidak (KE PERTANYAAN P63)
3. Tidak menjawab (KE PERTANYAAN P63)

P47

Jika mengikuti pilihan Sultan, apakah alasan utama Bapak/Ibu ?

1. Takut ditimpah bala
2. Wujud dari *Jou Se Ngopagare*
3. Karena Sultan sebagai pelindung dan panutan adat
4. Lainnya (sebutukan)_____

P48

Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa pada pemilu 2009 Boki adalah Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat (PD)

1. Tahu
2. Tidak Tahu

P49

Apakah Bapak/Ibu memilih Partai Demokrat (PD) karena Boki adalah Caleg DPR-RI Partai Demokrat {PERTANYAAN INI BAGI YANG MEMILIH PARTAI DEMOKRAT PADA P3}

1. Ya (KE PERTANYAAN P50)
2. Tidak (KE PERTANYAAN P51)
3. Tidak menjawab (KE PERTANYAAN P51)

P50

Apakah alasan utama Bapak/Ibu mengikuti pilihan Boki ?

1. Takut ditimpah bala
2. Wujud dari *Jou Se Ngopagare*
3. Karena Boki sebagai pelindung dan panutan adat
4. Lainnya (sebutukan)_____

P51

Apakah golongan elit kesultanan (*Jou, Dano, Soangare*) berpengaruh dalam pilihan partai Bapak/Ibu pada pemilu legislatif kota Ternate? { PERLIHATKAN KARTU F }

		Ya	Tidak
51.1	Jou	1	2
51.2	Dano	1	2
51.3	Soangare	1	2

4. Demografi

P52

Status perkawinan

1. Belum kawin
2. Kawin
3. Janda
4. Duda

P53

Pendidikan terakhir:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Tidak pernah sekolah | 5. Tamat SLTA |
| 2. Tidak tamat SD | 6. Tamat Akademi/diploma |
| 3. Tamat SD | 7. Tamat S-1 atau lebih tinggi |
| 4. Tamat SLTP | |

P54

Rata-rata pengeluaran keluarga setiap bulan. { PERLIHATKAN KARTU H }

1. Kurang dari Rp 400.000
2. Rp 400.001 – Rp 800.000
3. Rp 800.001 – Rp 1.250.000
4. Rp 1.250.001 - Rp 1.750.000
5. Rp 1.750.001 – Rp 2.250.000
6. Lebih dari Rp 2.250.000
7. Tidak tahu/tidak jawab

P55

Agama apa yang Bapak/Ibu/Saudara anut?

1. Islam
2. Katolik
3. Protestan
4. Hindu
5. Budha
6. Lainnya _____

P56

Jenis Pekerjaan Bapak /Ibu saat ini {PILIH SATU JAWABAN}:

- | | |
|---|---|
| 1. Petani/nelayan penggarap | 9. Pejabat publik (minimal camat) |
| 2. Petani/nelayan pemilik
Guru, Dosen dll) | 10. Profesional (Dokter, Pengacara, Peneliti, |
| 3. Buruh/tukang (kayu, batu) | 11. Ibu rumah tangga |
| 4. Pedagang kecil | 12. Mahasiswa/Sekolah |
| 5. Pensiunan | 13. Tidak bekerja |
| 6. Pedagang besar | 14. Lainnya, _____ |
| 7. Pengusaha | |
| 8. Pegawai Negeri Sipil | |
| 8. Pegawai Swasta | |

P57

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlibatan Sultan dalam dunia politik?


1. Sangat setuju
2. Setuju

3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
5. Tidak tahu

P75

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlibatan Boki dalam dunia politik?

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Tidak setuju
4. Sangat tidak setuju
5. Tidak tahu



**JANGAN LUPA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA RESPONDEN.
PERIKSA SEKALI LAGI APAKAH SELURUH PERTANYAAN SUDAH DITANYAKAN
DAN PASTIKAN APAKAH JAWABAN SUDAH DITULIS DENGAN BENAR.**

Termasuk Atau Tidak Dalam Kelompok Marga * Partai Pilihan

Crosstab															
Count															
		PARTAI PILIHAN													
		Golkar	Demokrat	PPP	PDIP	PAN	PKS	PBR	PBB	PDK	Hanura	Gerindra	PKPB	lainnya	Total
Termasuk atau tidak dalam kelompok marga	Ya termasuk	7	23	2	5	2	0	0	0	2	0	1	1	5	48
	Tidak termasuk	26	15	5	4	5	2	6	1	1	2	0	0	5	72
Total		33	38	7	9	7	2	6	1	3	2	1	1	10	120

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	24.833 ^a	12	.016
Likelihood Ratio	29.636	12	.003
Linear-by-Linear Association	.247	1	.619
N of Valid Cases	120		
a. 20 cells (76.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.			

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 199 / BKBPPM / 2011

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor 167/H2.F9.02.PPs/PDP.04.02/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate, menyatakan bahwa :

Nama : **AGUSMAWANDA**
Nomor Pokok : 0906590811
Program Studi : Ilmu Politik Universitas Indonesia
Jenjang Program : Magister (S2)

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Kota Ternate dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "*Perilaku Memilih Masyarakat Adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate Tahun 2009*".

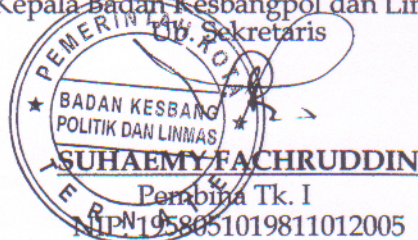
Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Walikota Ternate, C.q. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate.
2. Kegiatan dimaksud tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat daerah setempat.
4. Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 4 April 2011 s/d 4 Mei 2011.
5. Kepada para Instansi terkait yang dihubungi agar memberikan bantuan sesuai kebutuhan penelitian dimaksud.
6. Copy hasil penelitian agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota Ternate, C.q. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
7. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 4 April 2011

An. WALIKOTA TERNATE
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ternate (sebagai laporan) di Ternate.
2. Camat Kota Ternate Utara di Ternate.
3. Camat Kota Ternate Tengah di Ternate.
4. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta.
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-